



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. (021) 5994513, (Fax) 5994514
TIGARAKSA - TANGERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini,

Tigaraksa, 14 Maret 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TANGERANG

Dra. Hj. TINI WARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680721 198803 2 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Pemerintah Daerah ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa yang akan datang, guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, instansi terkait, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program yang tertuang dalam laporan ini. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi referensi berharga dalam perbaikan kinerja serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tigaraksa, Maret 2025

BUPATI TANGERANG



H. MOCH. MAESYAL RASYID

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 3 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2024 merupakan tahun Pertama pelaksanaan RPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Laporan ini mengukur keberhasilan dari 14 Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,69	0,68	98,6
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	2. Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,851	109,1
3	Meningkatkan	3. Indeks	Indeks	52	52,13	100,3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
	Daya Saing Pemuda		pembangunan Pemuda				
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	4.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64	63,84*	99,75
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	5.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka	1,3	1,25	104,0
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	6.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	2,14	1	214
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	7.	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Angka	2	-0,28	-714
		8.	Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	%	5,12	-11,5	-224,6
		9.	Persentase Daya saing produk unggulan lokal	%	22,73	28,83	126,8
		10.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3,41	2,6	76,2
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	11.	Indeks desa membangun	%	0,76	0,78	102,6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	12. Indeks ketahanan pangan	%	77,5	77,6	100,1
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	13. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka	67,85	65,88	97,1
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	14. Persentase PPKS yang berdaya	%	1,44	1,48	102,8
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	15. Nilai Sakip	Nilai	76	75,2	98,9
		16. Nilai indeks kemandirian fiskal	Nilai	0,52	0,53	101,9
		17. Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP
		18. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	82,28	115,89
		19. Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3	3	100,0
		20. Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,91	115,0
		21. Indeks Pelayanan publik	Indeks	4,2	4,17	99,3
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	22. Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	%	98	97	99,0
		23. Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai	%	37	37	100,0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		RTRW				
		24. Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemukiman yang layak	Rasio	0,9439	0,9453	100,1
		25. Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0,79	0,4	50,6
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	26. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56,25	55,87	99,3
		27. Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	120	125,22	95,8

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
I. LATAR BELAKANG	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN	4
III. DASAR HUKUM	5
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG	6
V. ISU STRATEGIS	30
VI. SISTEMATIKA PENULISAN	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
I. RENCANA STRATEGIS	38
II. PERJANJIAN KINERJA	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. CAPAIAN KINERJA	55
II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	59

III. REALISASI KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN SAstra	177
IV. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	190
BAB IV PENUTUP	196
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



**KABUPATEN
TANGERANG**

BAB I PENDAHULUAN

LKIP

TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

I. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban dalam kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap keempat dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKIP Kabupaten Tangerang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya, LKIP disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang tertuang di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 terdiri dari 14 Sasaran Strategis dan 27 Indikator Kinerja Sasaran. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud penyusunan LKjIP adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan yang target kinerja sudah diperjanjikan.

TUJUAN

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Gambaran umum daerah Kabupaten Tangerang disajikan berdasarkan kondisi geografis, demografis, perangkat daerah serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a. Kondisi Geografis Daerah

Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 103.244 Ha atau 1.027,76 km² 10,9% dari luas Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Rajeg dengan luas wilayah sebesar 5.370 Ha atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas wilayah 1.732 Ha atau 1,80% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.1.

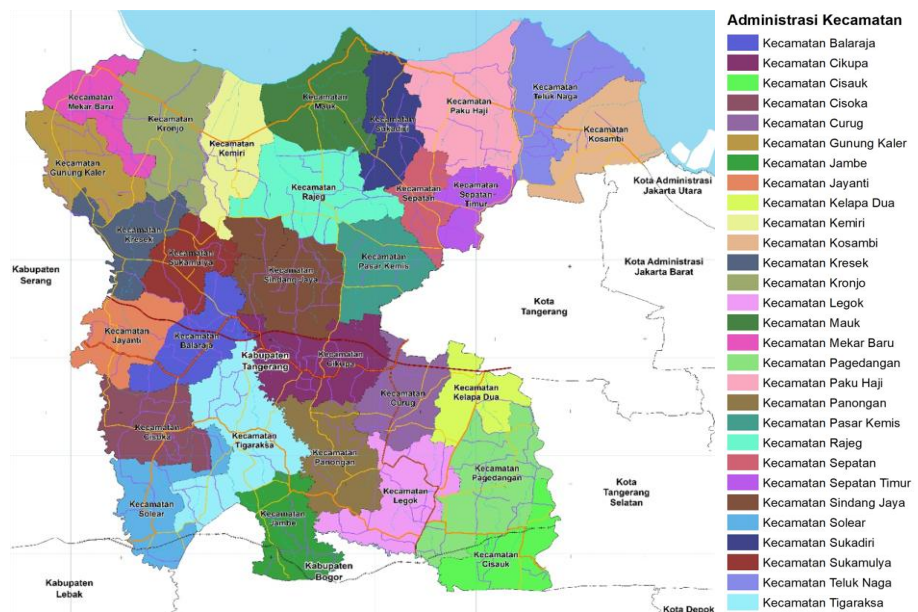
Sementara itu, jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif
di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Balaraja	3.148,38
2	Kecamatan Cikupa	4.314,81
3	Kecamatan Cisauk	2.966,97
4	Kecamatan Cisoka	3.358,47
5	Kecamatan Curug	3.010,98
6	Kecamatan Gunung Kaler	3.295,62
7	Kecamatan Jambe	3.009,18
8	Kecamatan Jayanti	2.872,53
9	Kecamatan Kelapa Dua	2.508,49
10	Kecamatan Kemiri	3.441,20
11	Kecamatan Kosambi	3.642,77
12	Kecamatan Kresek	2.643,79
13	Kecamatan Kronjo	4.851,29
14	Kecamatan Legok	3.986,69
15	Kecamatan Mauk	4.140,77
16	Kecamatan Mekar Baru	2.540,21
17	Kecamatan Pagedangan	5.110,06
18	Kecamatan Paku Haji	5.342,29
19	Kecamatan Panongan	3.640,31
20	Kecamatan Pasar Kemis	3.222,11
21	Kecamatan Rajeg	4.726,70
22	Kecamatan Sepatan	1.883,13
23	Kecamatan Sepatan Timur	1.846,21
24	Kecamatan Sindang Jaya	4.788,57
25	Kecamatan Solear	3.273,79
26	Kecamatan Sukadiri	2.826,05
27	Kecamatan Sukamulya	2.534,39
28	Kecamatan Teluk Naga	4.875,58
29	Kecamatan Tigaraksa	5.443,40
Total Luas		103.244,75

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 1.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang



Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2023

Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 54 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±54 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

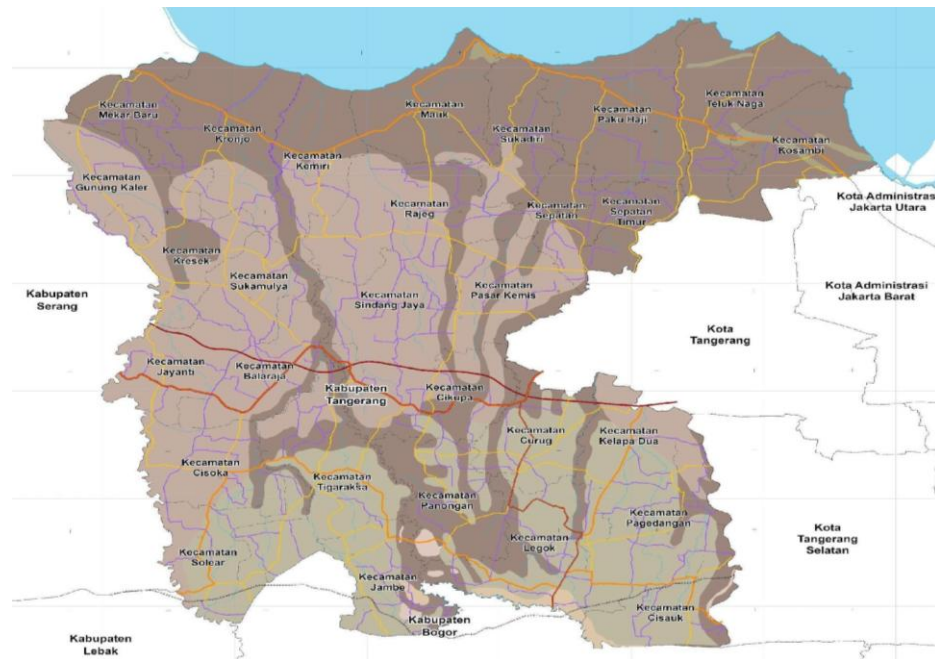
Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 54 km. Ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: Dataran rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0 – 25 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur.

1. Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 – 85 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 8 % menurun ke utara.

Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah:

1. Alluvium, terdiri dari lempung, kerikil, kerakal.
2. Tuf Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir tuffan.

Gambar 1.2
Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang



Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah. Daerah ini termasuk dalam kategori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padosolic kuning, asosiasi padosolic kuning, asosiasi padosolic kuning, dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budi daya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit padosolic yaitu asosiasinya.

Jika dilihat dari teksturnya, tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu, dan tanah liat pada agregat (massa) tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu: halus, sedang, dan

kasar. Luas wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan pengelompokan tersebut terdiri dari:

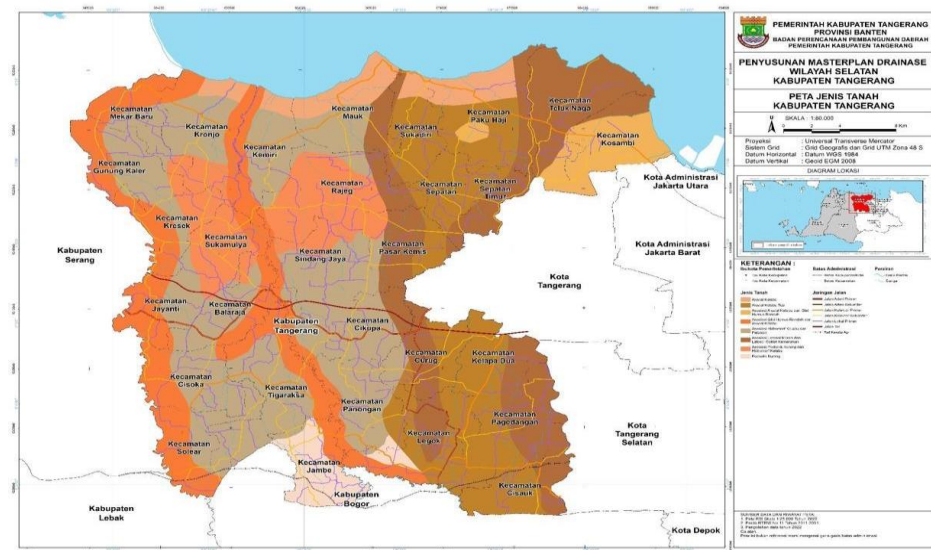
Tanah memiliki banyak jenis karena perbedaan proses pembentukan dan unsur yang terdapat di dalamnya juga berbeda. Berdasarkan data dan informasi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, jenis tanah di Kabupaten Tangerang rata-rata di dominasi oleh jenis tanah Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol dengan luas sebesar 30.363,83 ha. Adapun Luas dan Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini

Tabel 1.2.
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial Kelabu	4.411,22
2	Aluvial Kelabu Tua	17.871,50
3	Asosiasi Aluvial Kelabu dan Glei Humus Rendah	3.880,58
4	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	16.043,44
5	Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol	30.363,83
6	Asosiasi Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	18.221,99
7	Asosiasi Podsolik Kuning dan Hidromorf Kelabu	9.576,04
8	Podsolik Kuning	2.875,57
Total Luas		103.244,18

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

Gambar 1.3
Peta Jenis Tanah Hujan Kabupaten Tangerang



Menurut BMKG (2023), Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter.

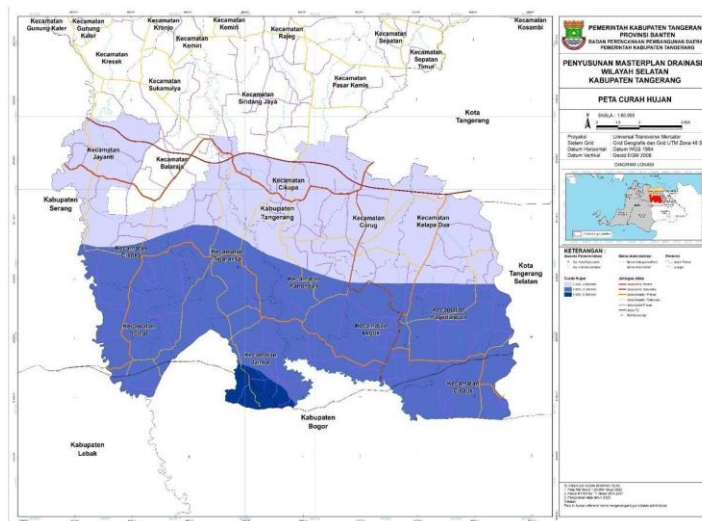
Berdasarkan data dan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Pondok Betung, rata-rata jumlah curah hujan per-bulan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar 246,03 mm dengan rata-rata jumlah hari sebesar 16 hari, sedangkan jumlah curah hujan tahunan Kabupaten Tangerang bagian selatan sebesar 2.500 - 3.000 mm dan 3.000 - 3.500 mm. Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3.
Curah Hujan Perbulan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Januari	129,90	18
Februari	246,70	24
Maret	234,70	21
April	124,90	20
Mei	78,60	13
Juni	223,90	15
Juli	171,40	11
Agustus	78,70	3
September	8.888.0	4
Oktober	12,90	4
November	308,60	23
Desember	156,30	14
Rata-rata		

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi dalam Kabupaten Tangerang dalam angka tahun 2024

Gambar 1.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang Bagian Selatan



Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. Kabupaten Tangerang terdapat 4 Daerah Aliran Sungai, dengan total luas seluas 64.016,14 ha.

Tabel 1.4.
Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan

No	DAS	Luas (Ha)
1	Cidurian	12.683,78
2	Cimanceuri	22.978,16
3	Cirarab	15.568,15
4	Cisadane	12.786,05
Total Luas		64.016,14

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

Sungai Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel. 1.5.
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang

No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer
1	Ci Apus	4.398,68	4,40
2	Ci Asin	8.352,70	8,35
3	Ci Barebeg	11.082,47	11,08
4	Ci Biuk (Cilaku)	19.022,32	19,02
5	Ci Bolang	2.740,00	2,74
6	Ci Bugel	5.383,19	5,38
7	Ci Calengka	5.665,02	5,67
8	Ci Cayur	17.593,12	17,59
9	Ci Conteng	3.239,67	3,24
10	Ci Garukgak	11.149,60	11,15
11	Ci Jantra	7.152,19	7,15
12	Ci Kakalen	8.318,01	8,32
13	Ci Kolear	9.484,69	9,48
14	Ci Leuleus	6.261,43	6,26
15	Ci Longo	4.499,33	4,50
16	Ci Longok	14.940,32	14,94
17	Ci Lowong	5.872,08	5,87
18	Ci Manaeh	9.061,90	9,06
19	Ci Manceuri	17.526,77	17,53
20	Ci Matuk	8.063,33	8,06
21	Ci Mauk	9.365,46	9,37
22	Ci Odeng	2.215,72	2,22
23	Ci Pasilian	14.989,00	14,99
24	Ci Payauen	25.979,68	25,98
25	Ci Rajeun	9.746,30	9,75
26	Ci Rangon	9.995,44	10,00
27	Ci Rarab	9.338,65	9,34
28	Ci Rumpak	3.141,77	3,14
29	Ci Sabi	16.288,51	16,29
30	Ci Sauk	9.405,77	9,41
31	Ci Slatip	4.573,85	4,57
32	Ci Soge	16.879,87	16,88
33	Ci Tuis	4.739,52	4,74

No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer
34	Kali Kramat	9.395,94	9,40
35	Kali Apung	5.985,33	5,99
36	Kali Asin	7.666,24	7,67
37	Kali Ketapang	5.218,47	5,22
38	Kali Perancis	10.597,04	10,60
39	S. Cidurian	3.746,69	3,75
40	S. Cimanceuri	69.091,40	69,09
41	S. Cirarab	49.657,11	49,66
42	S. Cisadane	40.794,53	40,79
43	Sungai Tahang	10.834,21	10,83
44	Terusan Apung	21.346,44	21,35
Total Panjang		50.799,75	550,80

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 22,8 - 33,9 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 0C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,3% dan 59,3%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3 mm. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.2.

Tabel 1.6
Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Uraian Data	Nilai	Satuan
Data geografis		
a. Luas Wilayah	1.027,76	km ²
b. Ketinggian	85	Mdpl
c. Wilayah Terluas (Rajeg)	53,7	Ha
d. Wilayah Terkecil (Sepatan)	17,32	Ha
Iklim		
a. Rata-rata Temperatur Udara	27,3°	°C
b. Rata-rata Kelembaban Udara	80,4	%
c. Rata-rata intensitas matahari	9999	Jam
d. Rata-rata Curah Hujan	887,8	Mm

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

b. Kondisi Demografis

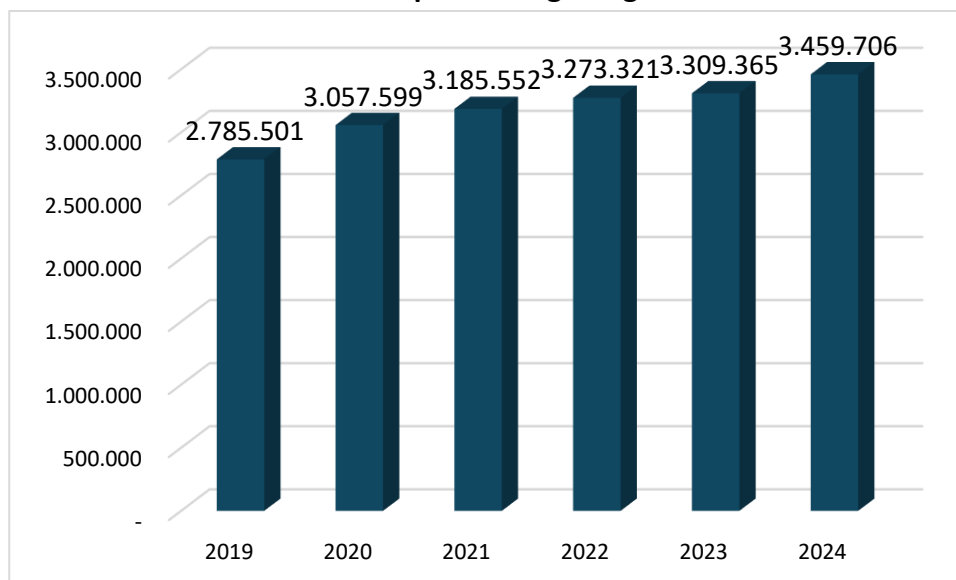
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berjumlah 3,459,706 jiwa, jiwa yang terdiri dari 1,761,008 jiwa penduduk laki-laki dan 1,698,698 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3,198,86 per km². Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, dan jumlah penduduk yang wajib KTP Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 2,458,216 jiwa, dengan jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP sebanyak 2,458,208 jiwa.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	127,011	116,830	243,841
5 – 9	166,595	154,130	320,725
10 – 14	163,462	152,209	315,671
15 – 19	126,969	121,467	248,436
20 -24	145,170	140,412	285,582
25 – 29	147,184	143,155	290,339
30 – 34	154,314	149,254	303,568
35 – 39	145,988	139,097	285,085
40 – 44	140,640	141,393	282,033
45 – 49	123,566	132,468	256,034
50 – 54	108,655	106,527	215,182
55 – 59	83,547	78,357	161,904
60 – 64	55,624	52,083	107,707
65 – 69	34,697	32,177	66,874
70 – 74	20,740	18,831	39,571
75+	16,846	20,308	37,154
Jumlah	1,761,008	1,698,698	3,459,706

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2024

Gambar 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 1.10
Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Balaraja	3.72	3,126.43	103.74
2	Jayanti	2.11	2,992.66	104.05
3	Tigaraksa	4.94	2,956.91	102.87
4	Jambe	1.70	1,969.80	104.36
5	Cisoka	2.98	4,546.97	105.15
6	Kresek	2.15	3,596.37	103.37
7	Kronjo	1.97	5,728.25	101.14
8	Mauk	2.73	6,390.51	104.90
9	Kemiri	1.54	3,335.09	104.07
10	Sukadiri	2.00	2,191.49	104.59
11	Rajeg	5.85	3,043.14	105.10
12	Pasar Kemis	7.61	8,308.34	102.67
13	Teluknaga	5.06	2,308.88	104.27
14	Kosambi	3.36	3,843.46	103.73
15	Pakuhaji	3.84	2,842.82	106.14
16	Sepatan	3.40	2,921.01	105.19
17	Curug	5.32	2,393.99	102.06
18	Cikupa	6.19	1,713.82	104.28
19	Panongan	3.95	141.03	103.67
20	Legok	3.77	1,712.34	104.61
21	Pagedangan	3.45	2,033.21	102.62

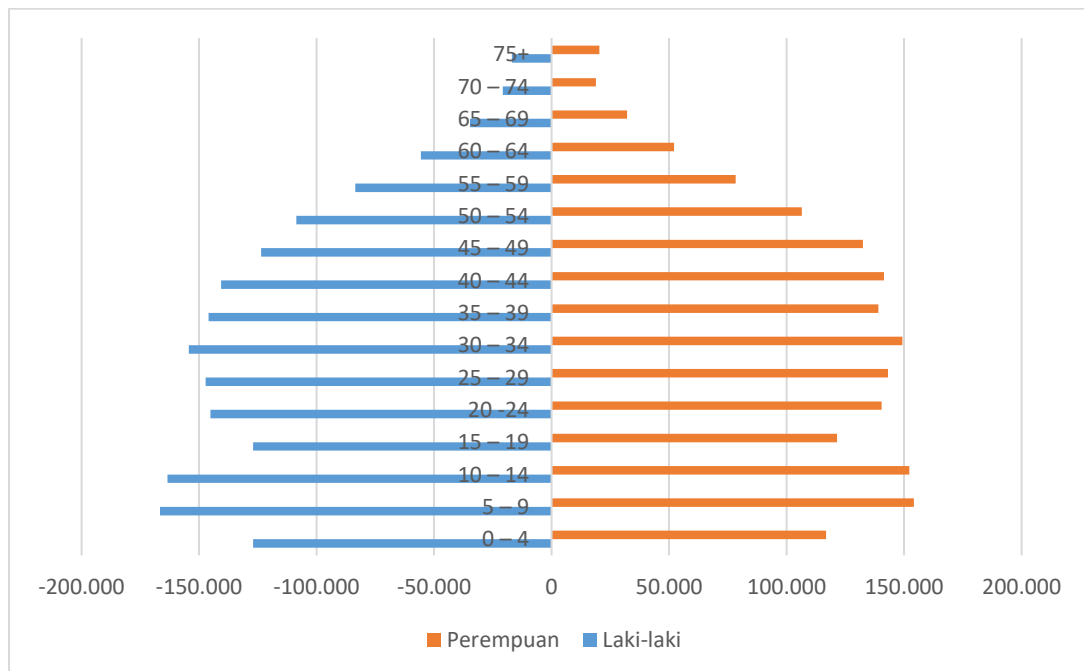
No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
22	Cisauk	2.81	1,524.00	102.63
23	Sukamulya	2.22	266.77	102.23
24	Kelapa Dua	5.03	3,531.07	99.28
25	Sindang Jaya	2.90	5,841.31	103.63
26	Sepatan Timur	3.21	5,390.78	106.61
27	Solear	3.16	2,334.29	105.81
28	Gunung Kaler	1.69	3,204.78	102.34
29	Mekar Baru	1.33	3,095.05	102.76
Kabupaten Tangerang		100,00	3,198.86	103,66

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , tahun 2025

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 adalah 103,66, sedangkan tahun 2023 adalah 103,59. Sex ratio 103.66 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 103 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Sepatan Timur yakni sebesar 106,61 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 99,28.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 5-9 tahun yaitu sebesar 320,725 jiwa naik dari tahun 2023 yang sebanyak 311.497 jiwa, usia 5-9 tahun merupakan usia anak balita dengan Pendidikan PAUD/TK serta usia anak kelas 3 Sekolah Dasar. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 37,154 jiwa naik dari tahun 2023 yang sebesar 33.334 jiwa, usia lanjut usia ini didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 20,308 jiwa naik dari tahun 2023 yang sebanyak 18.250 jiwa . Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.7.

Gambar 1.7
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024 (dalam jiwa)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2024 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi.

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar dapat mewujudkan pelayanan prima.

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	GURU	JF TERTENTU	NAKES	PELAKSANA	STRUKTURAL	JUMLAH
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		25		38	10	73
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				7	12	19
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		11		68	6	85
4	Badan Pendapatan Daerah		11		123	25	159
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6		44	15	65
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		18		18	9	45
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		4		82	47	133
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24		43	8	75
9	Dinas Kesehatan		14	2,027	185	96	2,322
10	Dinas Komunikasi dan Informatika		29		18	7	54
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		8		13	8	29
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		14		34	31	79
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		5		21	7	33
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		8		15	7	30
15	Dinas Pemuda, Olahraga,		5		24	7	36

NO.	PERANGKAT DAERAH	GURU	JF TERTENTU	NAKES	PELAKSANA	STRUKTURAL	JUMLAH
	Kebudayaan dan Pariwisata						
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		20		36	9	65
17	Dinas Pendidikan	4,196	94		154	14	4,458
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10		17	10	37
19	Dinas Perhubungan		7		23	19	49
20	Dinas Perikanan		5		18	10	33
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		21		14	7	42
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip		33		21	6	60
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		54		20	16	90
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		7		37	13	57
25	Dinas Sosial		15		13	9	37
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan		17		54	13	84
27	Dinas Tenaga Kerja		18		9	9	36
28	Inspektorat		65		10	10	85
29	Kecamatan Balaraja		1		7	13	21
30	Kecamatan Cikupa		1		6	18	25
31	Kecamatan Cisauk		2		10	13	25
32	Kecamatan Cisoka		1		7	8	16
33	Kecamatan Curug		1		14	22	37
34	Kecamatan Gunung Kaler		1		7	9	17
35	Kecamatan Jambe		2		13	9	24
36	Kecamatan Jayanti		1		5	8	14
37	Kecamatan Kelapa Dua		2		13	32	47
38	Kecamatan Kemiri		1		8	7	16
39	Kecamatan Kosambi		2		16	23	41
40	Kecamatan Kresek		1		8	8	17
41	Kecamatan Kronjo		1		11	7	19
42	Kecamatan Legok		1		13	14	28
43	Kecamatan Mauk		1		11	13	25
44	Kecamatan Mekar Baru		1		10	7	18
45	Kecamatan Pagedangan		1		18	12	31

NO.	PERANGKAT DAERAH	GURU	JF TERTENTU	NAKES	PELAKSANA	STRUKTURAL	JUMLAH
46	Kecamatan Pakuhaji		1		12	14	27
47	Kecamatan Panongan		2		13	12	27
48	Kecamatan Pasar Kemis		1		15	28	44
49	Kecamatan Rajeg				10	14	24
50	Kecamatan Sepatan		1		14	12	27
51	Kecamatan Sepatan Timur		1		9	9	19
52	Kecamatan Sindang Jaya		1		5	9	15
53	Kecamatan Solear		2		8	8	18
54	Kecamatan Sukadiri		2		12	8	22
55	Kecamatan Sukamulya		2		6	8	16
56	Kecamatan Teluk Naga		1		16	7	24
57	Kecamatan Tigaraksa		1		17	18	36
58	Satuan Polisi Pamong Praja		14		33	16	63
59	Sekretariat Daerah		69		58	23	150
60	Sekretariat DPRD		6		32	7	45
Total		4,196	673	2,027	1,596	856	9,348

d. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1611), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0222), susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari:

Gambar 1.2
Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Tahun 2024



e. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Laju ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2024 mengalami pelambatan di angka 5,00 persen yang sebelumnya sekitar 5,18 persen ditahun 2023, atau mengalami penurunan sekitar 0,18 persen. Terdapat dua (2) lapangan usaha Kabupaten Tangerang yang mengalami pertumbuhan negative yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan , dan sektor Pengadaan Listrik

dan Gas ditahun 2024. Beberapa sektor PDRB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yaitu :

1. Konstruksi sebesar 5,98%;
2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,94%;
3. Transportasi dan Pergudangan sebesar sebesar 6,04%;
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,15%;
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 23,36%;
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,23%.

Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.25	2.84	-0.84	2.26	1.74	-0.28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	(5,90)	(9,45)	-12.35	0.25	4.8
C	Industri Pengolahan	3,20	(8,74)	4,26	5.44	7.01	4.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(4,23)	(12,35)	11,69	5.59	-0.45	-13.42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1.35	5.69	1.93
F	Konstruksi	9,44	(3,29)	11,96	8.25	1.74	5.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	(3,70)	1,82	3.27	4.83	5.94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	(5,32)	9,90	7.89	5.84	6.04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	(5,63)	4,45	8.33	8.93	9.15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6.84	9.34	6.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6.81	-0.48	0.9
L	Real Estat	9,49	1,96	3,07	5.19	5.2	5.33
M,N	Jasa Perusahaan	9,20	(6,00)	(2,25)	4.46	8.52	8.39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	(0,38)	(0,76)	1.09	3.17	26.36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,69	(1,10)	-0.02	6.82	7.01

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2.94	8.94	13.23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	(6,11)	1,39	7.77	10.98	4.68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	(3,76)	4,70	5.47	5.18	5

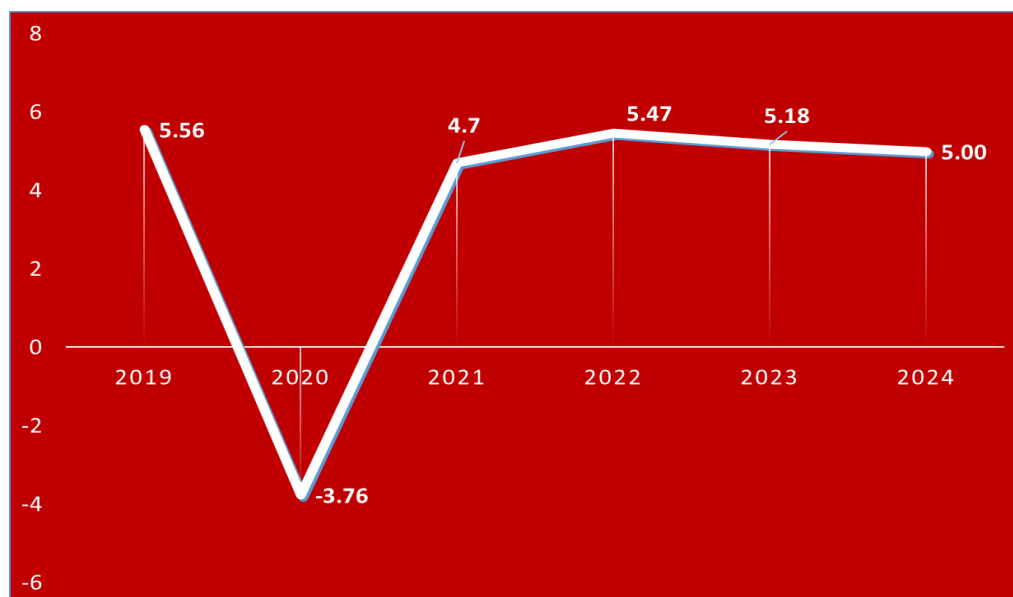
**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang melambat di tahun 2024, karena disebabkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan , dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang diproduksi di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan, tetapi sektor industry pengolahan tetap menjadi pilihan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang, dengan tumbuh positif ekonomi sektor industry pengolahan akan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Tangerang.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2016-2023, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2023. Wabah covid-19, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 diangka 5,47%, dan tahun 2024 sebesar 5,00 persen, tetapi Provinsi Banten dibawah Kabupaten Tangerang yang tumbuh sekitar 4,79 %.

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2024



f. Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Data dan informasi kemiskinan dirilis oleh BPS pada bulan Maret dan September tiap tahun, untuk bulan Maret BPS akan merilis Data dan Informasi Kemiskinan meliputi Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk bulan September BPS mempublikasikan data dan Informasi Kemiskinan per provinsi. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.4
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2024



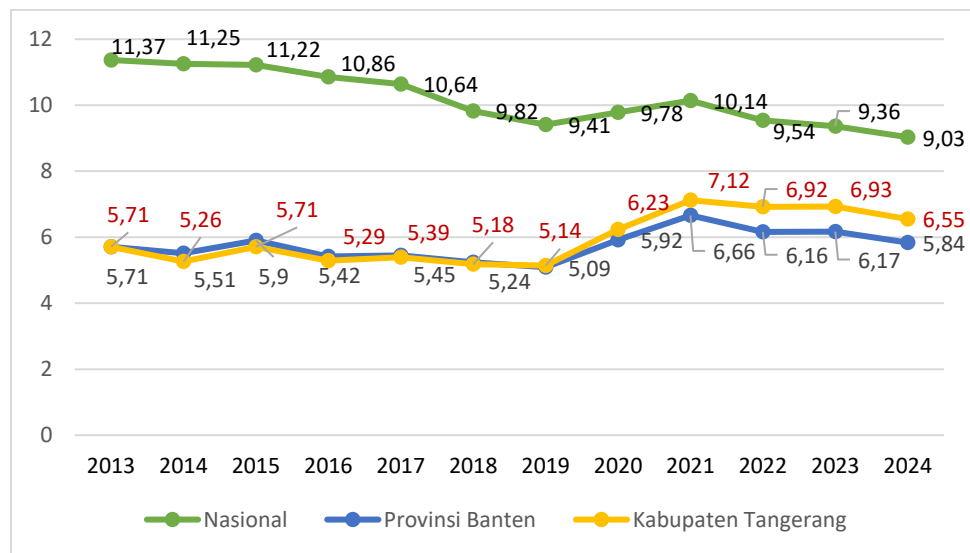
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21 dan tahun 2023 naik di angka 1,31. Sedangkan pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 dan tahun 2023 mencapai 0,39. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang atau sekitar 6,92 persen, tahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 276.330. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp 576.122,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2023 sekitar 604,362 ,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,23 - 7,12%, dan sampai Maret 2022 kembali

turun diangka 6,92%, Maret 2023 menjadi. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.14
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di tahun 2023 dengan melakukan tiga strategi intervensi antara lain: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 7,12% ditahun 2021 tahun 2022 menurun diangka 6,92%, tahun 2023 kembali mengalami kenaikan diangka 6,93%, sedangkan di level Provinsi Banten tahun 2023, persentase penduduk

miskin juga meningkat menjadi 6,17%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 9,36%. Maret tahun 2023 angka kemiskinan baik di provinsi dan di Kabupaten Tangerang Kembali naik, di level nasional angka kemiskinan turun sampai 9,36% yang tahun 9,54%, di Banten angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021-2022, angka kemiskinan Kabupaten Tangerang turun tahun 2021-2022.

V. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan isu strategis yang dikaitkan dengan isu internasional, isu nasional dan isu daerah yang merupakan tantangan pembangunan yang perlu dicarikan solusinya.

a. **Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Hijau serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk**

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki fokus terkait dengan green economy atau ekonomi hijau yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Pembangunan berkelanjutan yang difokuskan oleh Kabupaten Tangerang saat ini mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka kemiskinan, Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan pada tahun 2013-2019, pada tahun 2019 merupakan persentase terendah yaitu 5,14 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,23 persen ini disebabkan pandemi covid-19 yang belum mereda sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,12 persen, dengan berbagai program untuk mengatasi pandemi pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 6,92 persen.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya

Angkatan Kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan ada pendidikan vokasi. Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha dapat juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tentu dalam upaya pelayanan peningkatan keterampilan tenaga kerja ini, perlu diidentifikasi kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya. Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari kerja di Kabupaten Tangerang adalah mulai sempitnya lapangan pekerjaan karena banyak industri dan pabrik yang pindah beroperasi di daerah lain. Hal ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan berwirausaha. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya fasilitas modal untuk UM dan IKM, informasi potensi dan peluang investasi yang kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi menjadi satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Tantangan yang dimiliki Kabupaten Tangerang terkait dengan IKM dan UM adalah pendataan dan pembinaan IKM dan UM yang belum berkelanjutan dan merata. Beberapa IKM juga terkendala terkait dengan legalitas produk, sehingga IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi sangat sulit untuk mendapatkan legalitas tersebut. Untuk wilayah kebijakan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi kebutuhan di sektor yang sedang meningkat contohnya adalah pada sektor kesehatan. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dikarenakan, semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan yang gencar dijalankan. Sektor unggulan lain yang harus

dikuatkan karena menjadi ikon dan wajah Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dan perdagangan, yang belakangan ini mengalami penurunan karena beberapa hal. Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan “bottleneck” yang menghambat proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Tangerang. Selain itu, ekonomi kreatif juga menstimulasi lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah.

b. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut. Beberapa indikator lain yang digunakan Kabupaten Tangerang terkait dengan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah terkait dengan: Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap

organisasi perangkat daerah diperlukan sehingga Kabupaten Tangerang mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata; Revitalisasi reformasi administrasi juga digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif; Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan; Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; Pengembangan Smart City untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern; Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti e-purchasing sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Sedangkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Tangerang terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui BKPSDM sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

c. Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Sektor Sosial Budaya

Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi

mutu dan kualitas sektor pendidikan karena terbagunya fokus pengajar kepada lebih dari satu tugas yang harus dilaksanakan sekaligus. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020-2024. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Pada bidang kesehatan juga terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan stunting. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih.

Pada sektor kependudukan, isu kepemilikan dokumen kependudukan masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dan data kependudukan. Selain itu, masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengarahkan Kabupaten/Kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar, masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni, dan proses verifikasi data PMKS yang masih tumpang tindih, yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah PMKS yang terekam.

d. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang digunakan untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur yang melibatkan berbagai macam pihak.

Isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang yang pertama adalah terkait sektor bina marga yang masih kurang memadainya kapasitas jalan kabupaten yang mana masih banyak kerusakan jalan. Hal ini ditandai dengan proporsi jalan yang memenuhi kualifikasi dalam kondisi mantap adalah 77,07% pada tahun 2021. Kabupaten Tangerang juga memiliki daerah rawan banjir yang cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah resapan air dan daya tampung dari Drainase Jalan/Sungai/Situ yang ada disekitar daerah rawan banjir. Selain itu, tingginya sedimentasi/endapan/ dan sampah pada drainase jalan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir. Kedua, aksesibilitas transportasi di Kabupaten Tangerang termasuk terminal dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang. Pelayanan transportasi di Kabupaten Tangerang belum terintegrasi karena belum ada Kajian Rencana Umum Jaringan Transportasi yang disusun. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua teratasi karena belum terdapat pemetaan jaringan trayek sesuai kebutuhan baik dalam trayek maupun yang tidak dalam trayek, Rencana Pembangunan terkait BRT, LRT, dan MRT serta Terminal Tipe A dan C yang terintegrasi juga menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang.

Ketiga, rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah tangga yang ada di Kabupaten Tangerang sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat

pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi wilayah pedesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten Tangerang menimbulkan adanya perbedaan tingkat sanitasi. Kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih terhitung tinggi, yaitu sebesar 29,66% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas infrastruktur permukiman dan masih terbatasnya kemampuan SDM dalam penyediaan infrastruktur tersebut.

Keempat, pencemaran dan kerusakan di Kabupaten Tangerang juga menjadi isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik dan juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.

e. Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur terkait dengan Pemekaran Daerah. Pemekaran yang dimaksud adalah pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru. Pemekaran daerah baru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan daerah. Rencana pemekaran di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujud

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, secara ringkas profil Kabupaten Tangerang, dan isu strategis serta arah kebijakan di Kabupaten Tangerang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian singkat Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi pencapaian kinerja Tahun 2024 dan realisasi anggaran, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2024) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Meliputi secara ringkas tentang capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, mengungkapkan permasalahan, dan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2024.



**KABUPATEN
TANGERANG**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LKIP

TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

I. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Kabupaten Tangerang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dalam RPD tersebut telah dituangkan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Yang dimaksud dengan :

a. Daya Saing (Competitive Forces);

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

b. Masyarakat Madani (Civil Society); adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaran/kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan

kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tangerang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.55	73.82	74.1
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.69	0.7	0.71
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.78	0.79	0.8

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	52	53	54
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	62.67	63.17	63.17
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.3	1.15	1.05
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalehan Sosial	74	76	78
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	2.14	2.26	2.38
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.11-5.25	5.20-5.33	5.27-5.41
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7.51	7.36	7.2
			Persentase Penduduk Miskin	5.94	5.74	5.5
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	3,08	3,48	3,88

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		Sektor Unggulan	dan Perikanan			
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	5.12	5.12	5.12
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	22.73	26.52	30.30
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3.41	3.57	3.73
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0.7307	0.7407	0.7507
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.50	78.00	78.50
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.85	68.25	68.65
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1.44%	1.69%	1.87%
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	73	74	75
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	76	78	80.5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0.520	0.525	0.530
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	71	75	81
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3	3	3
			Indeks SPBE	3.17	3.19	3.21
			Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.3	4.4
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	94,5	95	95,5
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	37%	55%	55%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	0.9439	0.9442	0.9442
			Rasio Konektivitas	0.79	0.83	0.83

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten			
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56.25	56.89	56.89
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	120	115	115

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang periode 2024-2026

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam RPD 2024, sejumlah target kinerja telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan daerah. Namun, berdasarkan hasil realisasi tahun 2023, ditemukan bahwa beberapa indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2024 telah terlampaui lebih awal sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta adanya percepatan pencapaian sasaran strategis.

Akibat dari pencapaian ini, target yang terdapat dalam PK 2024 mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan mencerminkan tantangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan kinerja instansi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks	0.69
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	2. Indeks Kesehatan	Indeks	0.78
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	3. Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	52
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	5. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.3
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	6. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	2.14
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	7. Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	%	2
		8. Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	%	5.12
		9. Persentase Daya saing produk unggulan lokal	%	22.73
		10. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3.41
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	11. Indeks desa membangun	Indeks	0.76
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	12. Indeks ketahanan pangan	Indeks	77.50
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	13. Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67.85
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	14. Persentase PPKS yang berdaya	%	1.44
12	Meningkatkan Kualitas	15. Nilai Sakip	Nilai	76

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Tata Kelola Pemerintah	16. Nilai indeks kemandirian fiskal	Indeks	0.52
		17. Opini BPK	Kategor	WTP
		18. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71
		19. Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3
		20. Indeks SPBE	Indeks	3.4
		21. Indeks Pelayanan publik	Indeks	4.2
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	22. Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	%	98
		23. Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	37
		24. Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	Rasio	0.9439
		25. Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0.79

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	26. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56.25
		27. Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	120

Tabel 2.3
Program Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	834.301.765.278,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	459.714.850,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	99.991.000,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	252.284.600,00
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	313.015.189.342,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.864.998.310,00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	778.206.260,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.634.116.040.541,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	130.556.360.720,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	55.641.046.708,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	348.470.407.864,00
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	250.060.500.753,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	21.434.134.220,00
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.434.328.401,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.466.392.600,00
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	40.318.904.767,00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	112.253.365.907,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.382.218.750,00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	30.735.570.800,00
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	181.632.034.066,00
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.601.915.000,00
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13.975.362.600,00
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.466.432.736,00
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	960.253.200,00
25	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.506.500,00
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.433.703.500,00
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	45.887.126.501,00
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	710.489.800,00
29	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	301.586.185,00
30	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	194.932.900,00
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	13.614.588.186,00
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.960.318.480,00
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.291.805.630,00
34	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.898.572.260,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
35	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	724.289.030,00
36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	394.318.910,00
37	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	35.956.400,00
38	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	664.864.760,00
39	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	925.146.790,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	648.957.400,00
41	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.443.427.060,00
42	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	895.295.330,00
43	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	144.178.500,00
44	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	423.914.116.344,00
45	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.408.876.500,00
46	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.310.262.063,00
47	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.051.622.855,00
48	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	353.174.100,00
49	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	578.463.500,00
50	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	584.678.710,00
51	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	437.789.000,00
52	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	97.367.410.906,00
53	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.283.809.150,00
54	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.483.220,00
55	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.222.565.745,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
56	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880,00
57	PROGRAM PENATAAN DESA	2.039.982.750,00
58	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	919.548.750,00
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.524.001.640,00
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	42.294.983.842,00
61	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.249.362.400,00
62	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	16.028.388.424,00
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	15.217.215.000,00
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	90.542.253.445,00
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11.944.781.100,00
66	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	55.190.913.780,00
67	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	253.985.580,00
68	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	111.529.790,00
69	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	150.229.630,00
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	930.767.700,00
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.159.914.000,00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.320.543.336,00
73	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3.125.205.280,00
74	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	502.112.300,00
75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.464.340.950,00
76	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.229.570,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	728.826.640,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.639.362.280,00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	36.083.304.475,89
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.488.331.340,00
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	17.107.902.710,00
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.086.236.480,00
83	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.394.820.530,00
84	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.135.312.810,00
85	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	656.481.480,00
86	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.760.402.000,00
87	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.744.201.020,00
88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.372.574.881,00
89	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	399.777.650,00
90	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.617.999.600,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	65.027.030,00
92	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.351.418.350,00
93	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	86.770.500,00
94	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6.566.805.582,00
95	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	56.330.480,00
96	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.075.135.620,00
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	54.346.640,00
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.064.897.400,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
99	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	448.838.650,00
100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.539.827.530,00
101	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	112.709.000,00
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.251.344.000,00
103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	305.537.470,00
104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.713.397.390,00
105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	22.911.580,00
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	66.329.858.040,00
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.454.710.300,00
108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.987.198.726,00
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.249.285.842,00
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.270.626.430,00
111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.847.535.700,00
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.984.447.465,00
113	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	918.689.880.061,00
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.523.743.830,00
115	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.024.952.840,00
116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.592.912.100,00
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.380.526.462,00
118	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.142.499.900,00
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.408.830.863.853,11
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.372.507.081,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.678.714.691,00
122	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.462.429.496,00
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.315.538.030,00
124	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.369.925.320,00
125	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	86.868.763.166,00
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.220.422.400,00
127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.642.030.000,00
128	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.842.280.840,00
TOTAL ANGGARAN		9.092.893.599.225,00



**KABUPATEN
TANGERANG**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP

TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merujuk pada transparansi pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selama satu periode kepada masyarakat. Pengukuran capaian kinerja memiliki manfaat yang penting, yaitu memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal pemerintah tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menggunakan capaian dari target kinerja sebagai tolak ukur realisasi program mereka dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja, dilakukan perbandingan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.55	74.09	100.7
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indekss	0,69	0,68	98,55
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,851	109,10
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	52,13*	100,3
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64	63,84*	99,75
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	1,25	104

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalahan Sosial	Indeks	74	78	105.4
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	2.14	1	214
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.11-5.25	5,00	97,84
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.51	6.06	80.7
			Persentase Penduduk Miskin	%	5.94	6.55	110.3
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2	-0,28	-714
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	%	5.12	-11.50	-224.6
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	%	22,73	28,83	126,84
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3,41	2,6	76,25

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,76	0,78	102,63
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,5	77,6	100,13
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,85	65,88	97,10
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	%	1,44	1,48	102,78
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	84.44	131.9
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	76	75,2	98,95
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0,52	0,53	101,92
			Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	82,28	115,89
			Maturitas SPIP Terintegrasi	Angka	3	3	100,00
			Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,91	115,00
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,2	4,17	99,29
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76.61	-	-
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	%	98	97	98,98

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	37	37	100
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Rasio	0,9439	0,9453	100,15
			Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,79	0,4	50,63
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,25	55,87	99,32
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	120	125,22	104,35

Keterangan :

**menggunakan capaian 2023*

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebanyak 14 Sasaran Strategis.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang. dari sebanyak 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RPD.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Tangerang melalui rencana aksi kedepan sebagai upaya nyata pelaksanaan peningkatan dan perbaikan.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 01

61

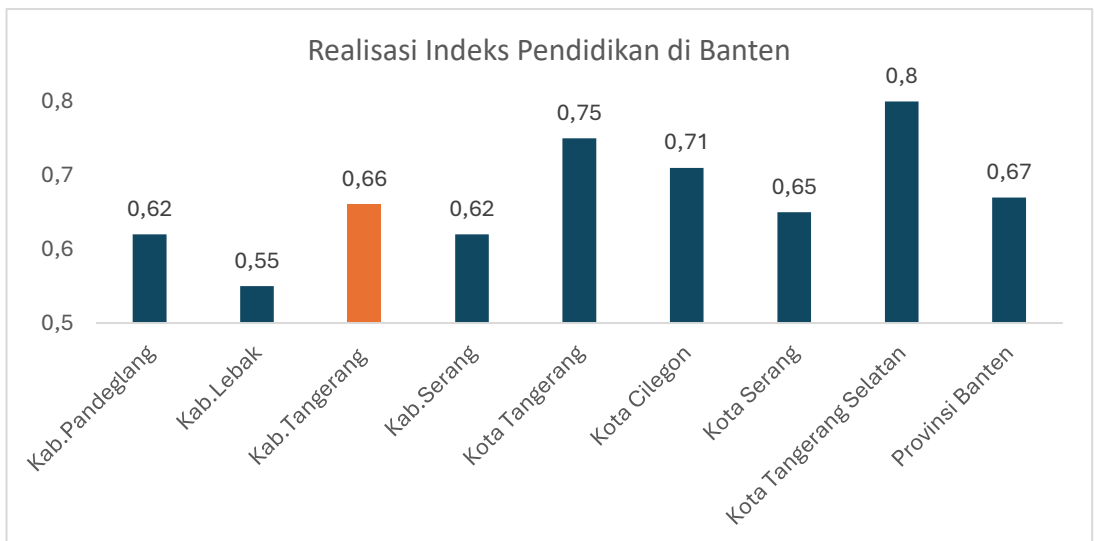
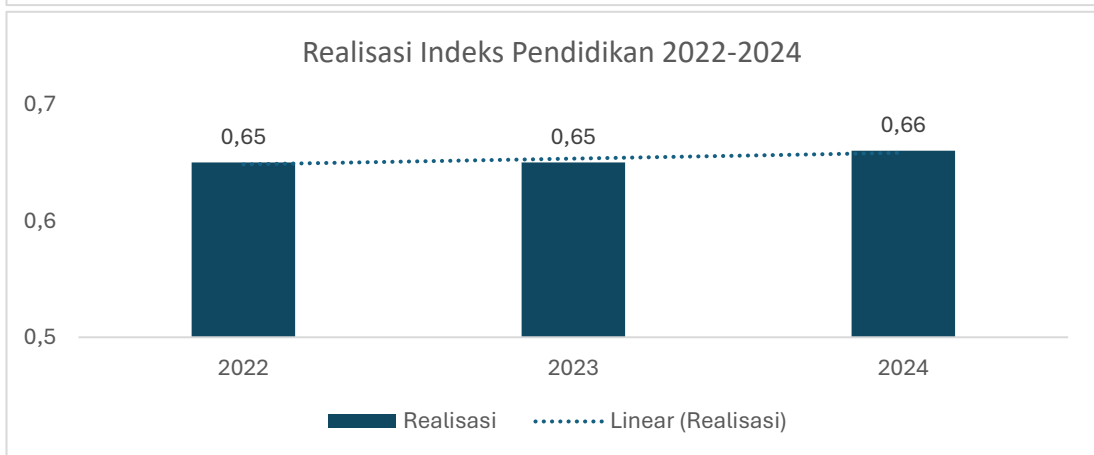
**Meningkatkan
Kualitas Pendidikan**

INDEKS PENDIDIKAN

Tabel 3.2

Indeks Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
0,69	0,66	95%	0,71



Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Indeks ini dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan akses serta tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Tabel 3.3 Capaian RLS dan HLS Kabupaten Tangerang tahun 2024

Data Capaian RLS dan HLS Kabupaten Tangerang	
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,06 Tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,88 Tahun

Sumber: banten.bps.go.id

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{pend} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Langkah perhitungan :

1. Menghitung Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$IHLS = \frac{12,88 - 0}{18 - 0} = \frac{12,88}{18} = 0,715$$

2. Menghitung Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS)

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{9,06 - 0}{15 - 0} = \frac{9,06}{15} = 0,604$$

3. Menghitung Indeks Pendidikan (Ipend)

$$I_{pend} = \frac{0,715 + 0,604}{2} = \frac{1,319}{2} = 0,66$$

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan indeks pendidikan, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 dan 2023, indeks pendidikan tercatat sebesar 0,65, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,66. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih belum memenuhi target 2024 sebesar 0,69.

Berdasarkan realisasi Indeks Pendidikan di Provinsi Banten, terlihat adanya kesenjangan antara kabupaten dan kota. Secara umum, kabupaten memiliki indeks pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kota.

Dari empat kabupaten di Banten, **Kabupaten Tangerang** memiliki capaian tertinggi dengan indeks **0,66**, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang sama-sama berada di angka **0,62**, serta Kabupaten Lebak yang memiliki indeks pendidikan terendah sebesar **0,55**.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kota-kota di Banten, indeks pendidikan kabupaten tertinggal cukup jauh. Kota Tangerang Selatan mencatat capaian tertinggi sebesar **0,80**, disusul oleh Kota Tangerang **0,75** dan Kota Cilegon **0,71**. Bahkan Kota Serang yang memiliki indeks **0,65**, masih lebih tinggi dari tiga kabupaten di Banten.

Hal ini mencerminkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor seperti infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Kabupaten umumnya menghadapi tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan sarana dan prasarana pendidikan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
2. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal
3. Sebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
4. Pemenuhan layanan satuan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas
5. Tersedianya unit layanan disabilitas Kabupaten Tangerang
6. Meningkatkan angka partisipasi siswa
7. Menurunkan angka putus sekolah
8. Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di Satuan Pendidikan Negeri

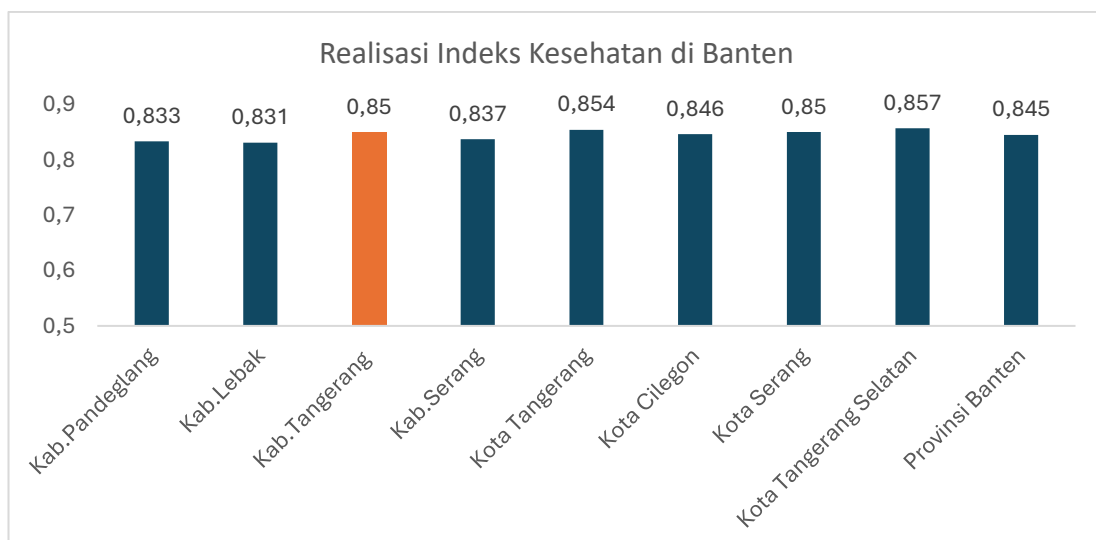
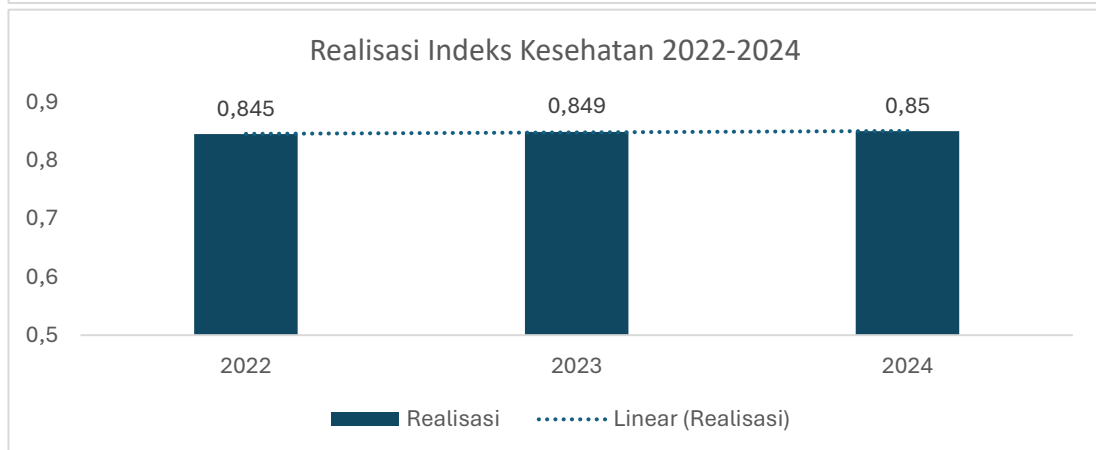
SASARAN 02

**Meningkatkan
Kualitas Kesehatan**

INDEKS KESEHATAN

Tabel 3.4
Indeks Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
0,78	0,85	109%	0,80



Indeks kesehatan adalah salah satu komponen dasar dalam mengukur kualitas hidup berdasarkan dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Berdasarkan banten.bps.go.id data capaian UHH Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 75,34 tahun.

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Ikes = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

$$Ikes = \frac{75.34 - 20}{85 - 20}$$

$$Ikes = \frac{55.34}{65} = 0.850$$

Keterangan

- $UHH_{min} = 20$
- $UHH_{max} = 80$
- UHH Kabupaten Tangerang tahun 2024 = **75,34**

Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor kesehatan, sebagaimana tercermin dalam pencapaian Indeks Kesehatan yang terus meningkat. Dengan realisasi indeks kesehatan yang mencapai 0,85 pada tahun 2024, pencapaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan.

Kabupaten Tangerang memiliki indeks kesehatan sebesar 0,85. Ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, setara dengan Kota Serang (0,85) dan hanya sedikit lebih rendah dibanding Kota Tangerang Selatan (0,857), yang mencatat indeks tertinggi di Banten.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur medis, peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, serta program preventif dan promotif yang aktif dijalankan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Salah satu faktor keberhasilan ini adalah penambahan fasilitas kesehatan dengan dibangunnya RSUD Tigaraksa. Rumah sakit ini hadir sebagai pelengkap layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap fasilitas medis yang memadai. RSUD Tigaraksa adalah RSUD ke 4 setelah RSUD Balaraja, RSUD Paku Haji dan RSU Tangerang.

Hambatan dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tangerang:

1. Keterbatasan Akses

Meskipun fasilitas kesehatan telah berkembang, beberapa kelompok masyarakat masih menghadapi kesulitan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan transportasi yang menghambat mobilitas tenaga medis dan distribusi peralatan kesehatan.

2. Keterbatasan Fasilitas Sanitasi

Kualitas sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular. Beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak, seperti toilet yang higienis.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya layanan kesehatan preventif dan promotif, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat upaya pencegahan penyakit dan deteksi dini masalah kesehatan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan
2. Digitalisasi Layanan Kesehatan
3. Optimalisasi Program Pencegahan Penyakit
4. Penguatan Tenaga Kesehatan
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

SASARAN 03

Meningkatkan Daya
Saing Pemuda

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Tabel 3.5

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
52	52,13*	100,2%	54

*Data Proyeksi Berdasarkan IPP 2023



Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Tangerang mencapai angka **52,13**, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **52**, dengan capaian kinerja **100,3%**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang hampir setara dengan IPP Provinsi Banten yang berada di angka **52,17**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan pemuda. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian realisasi kinerja IPP tahun 2024 antara lain:

- **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, termasuk pengembangan

Sekolah Terpadu Ramah Anak (SETARA), peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta program **beasiswa pendidikan bagi pemuda kurang mampu**. Selain itu, pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan berbasis teknologi digital telah diperluas untuk meningkatkan kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

- **Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kepemudaan**

Pembangunan dan revitalisasi **pusat kegiatan kepemudaan dan fasilitas olahraga** terus dilakukan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam aktivitas positif. Stadion, gelanggang olahraga, serta ruang kreatif bagi komunitas pemuda telah diperbaiki dan diperluas agar dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan potensi generasi muda.

- **Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda**

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda, Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai program **pelatihan kewirausahaan, akses permodalan usaha mikro, serta pendampingan startup kepemudaan**. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi wirausaha muda agar dapat bersaing dalam ekonomi berbasis inovasi.

- **Penguatan Kepemimpinan dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan**

Melalui program **Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Penguatan Organisasi Kepemudaan**, Kabupaten Tangerang terus membangun kapasitas pemuda sebagai agen perubahan. Berbagai kegiatan seperti **forum kepemimpinan, seminar kebangsaan, dan pelatihan advokasi sosial** telah digelar untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.

- **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat**

Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas pemuda menjadi kunci dalam peningkatan IPP. Program kemitraan dengan perusahaan untuk mendukung **magang dan peningkatan keterampilan kerja**, serta kerja sama dengan organisasi kepemudaan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan inovasi, turut berkontribusi pada pencapaian target IPP 2024.

Meskipun capaian tahun ini telah melampaui target, tantangan masih tetap ada. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan ke depan mencakup **pengurangan angka pengangguran pemuda, peningkatan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi kreatif, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi.**

SASARAN 04

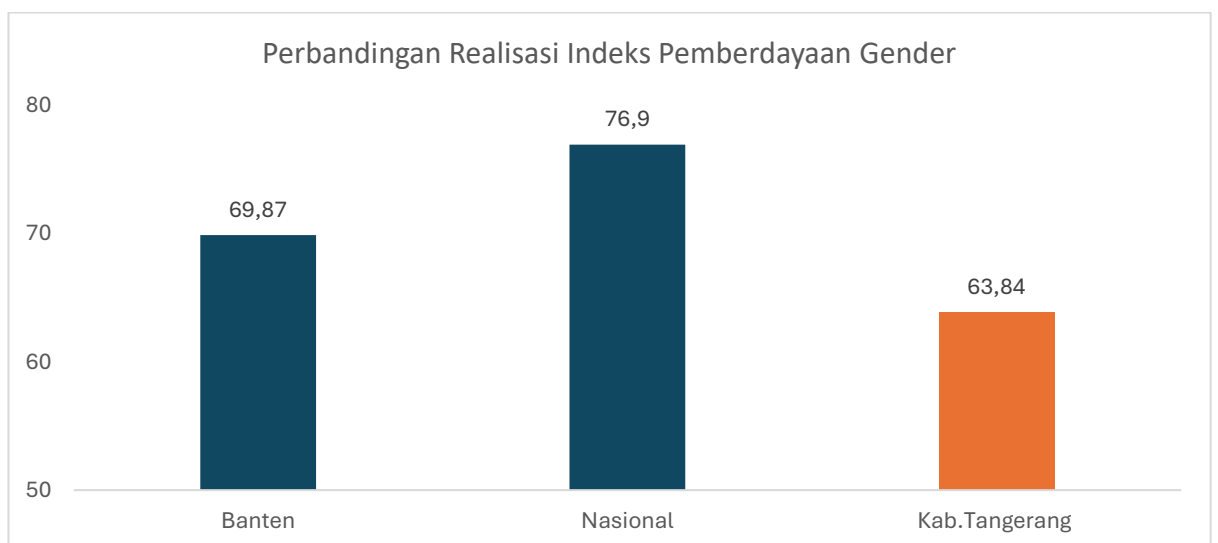
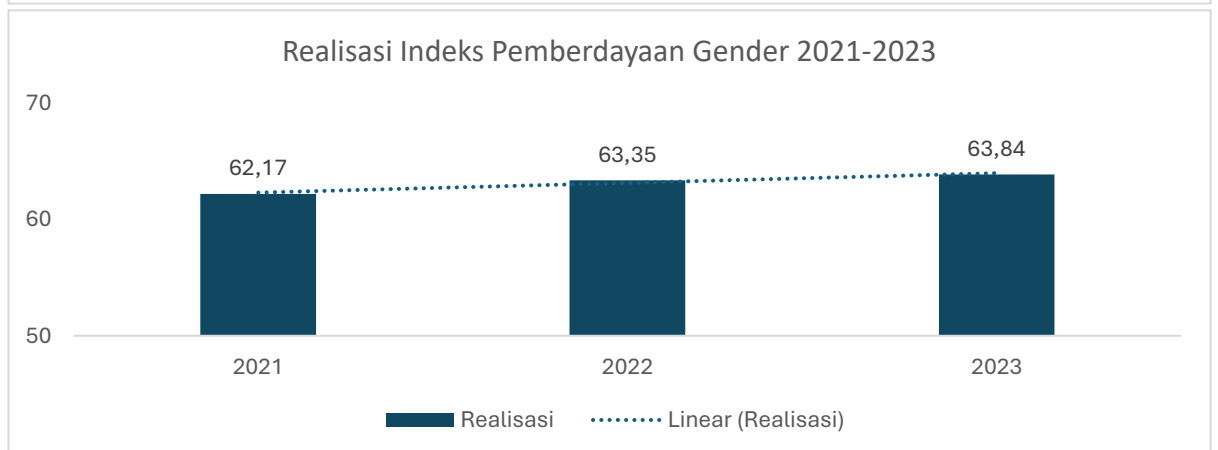
**Meningkatkan Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan**

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Tabel 3.6

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
64	63,84*	99,8%	63,67



Indeks Pemberdayaan Gender merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan **Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)** sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan kesetaraan gender di berbagai sektor. Untuk tahun 2024, nilai realisasi IPG masih menunggu rilis resmi dari **Badan Pusat Statistik (BPS)**, sehingga sebagai acuan sementara digunakan **realisasi tahun 2023**, yang mencapai **63,84**.

Meskipun belum mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar **64**, pencapaian ini sudah mendekati dengan **capaian kinerja mencapai 99,8%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender di Kabupaten Tangerang terus mengalami perkembangan yang positif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Tangerang tercatat sebesar **63,84**, lebih rendah dibandingkan rata-rata **Provinsi Banten (69,87)** dan **nasional (76,9)**. Ketertinggalan ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Tangerang masih perlu ditingkatkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertinggalan IPG Kabupaten Tangerang

1. Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi

- Perempuan di Kabupaten Tangerang masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan formal dan kepemimpinan di sektor ekonomi.
- Minimnya peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di perusahaan dan UMKM yang masih didominasi oleh laki-laki.

2. Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan

- Belum optimalnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di pemerintahan daerah maupun lembaga legislatif.
- Budaya patriarki yang masih kuat menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

3. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

- Meskipun angka melek huruf perempuan tinggi, namun masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi.
- Akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dan gizi, masih perlu diperbaiki.

4. Persepsi Sosial dan Budaya

- Norma sosial yang masih membatasi perempuan dalam mengambil peran yang lebih luas di masyarakat.
- Beban ganda bagi perempuan yang harus mengurus keluarga sekaligus bekerja, yang dapat menghambat keterlibatan mereka dalam sektor publik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan Akses Perempuan ke Sumber Daya Ekonomi

- Mendorong pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan memperluas akses mereka terhadap permodalan.
- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam industri berbasis teknologi dan digital.

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemimpinan

- Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kebijakan afirmatif.
- Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk mendukung peran mereka dalam pengambilan keputusan.

Memperkuat Pendidikan dan Kesehatan untuk Perempuan

- Menyediakan lebih banyak program pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan perempuan di berbagai sektor.
- Memperluas akses layanan kesehatan reproduksi dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Mengubah Pola Pikir Sosial tentang Peran Perempuan

- Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

SASARAN 05

Meningkatkan

Pengendalian Penduduk

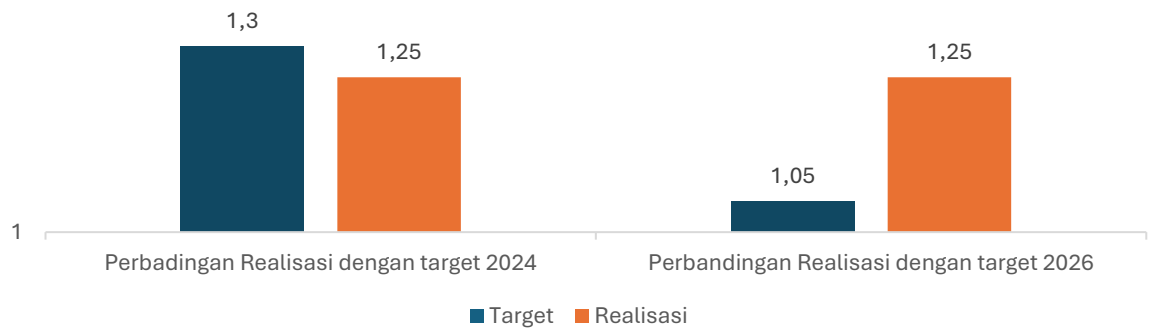
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tabel 3.6

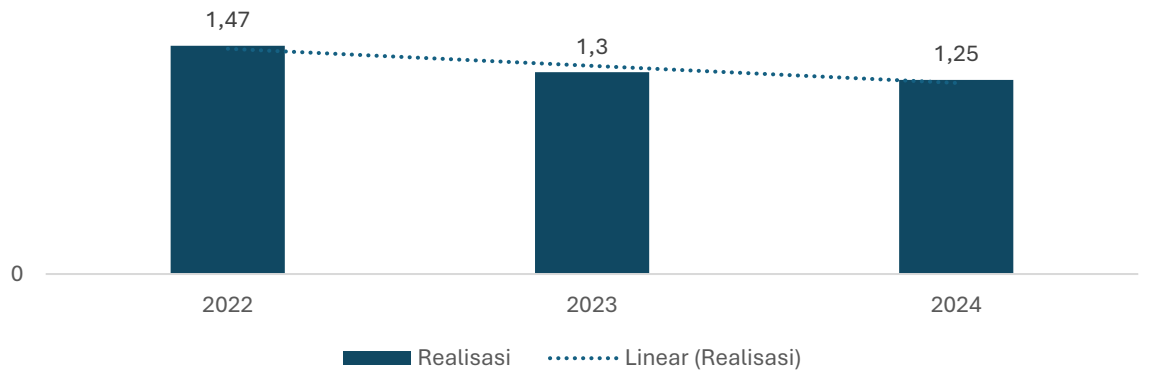
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1.3	1.25	104%	1.05

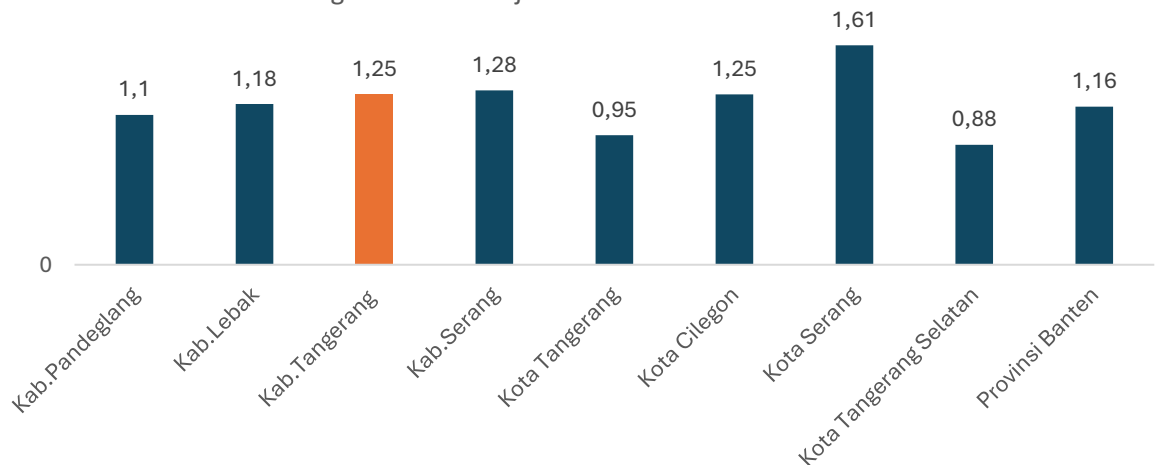
Perbandingan Kinerja



Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk 2022-2024



Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk di Banten



Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Target laju pertumbuhan penduduk yang ditetapkan adalah **1.3**. Realisasi yang dicapai adalah **1.25 (Sumber : BPS Banten)**, Dengan pencapaian ini, kinerja pengendalian penduduk mencapai **104%**, menandakan efektivitas program yang dijalankan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Untuk jangka panjang, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), target akhir yang ingin dicapai adalah **1.05**, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk lebih lanjut melalui berbagai kebijakan dan program kependudukan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian target pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang antara lain:

1. Penyediaan Layanan KB yang Mudah Diakses

- Pemerintah daerah secara aktif menyediakan layanan KB gratis di puskesmas, posyandu, dan melalui mobil layanan KB keliling agar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

2. Sosialisasi dan Edukasi Perencanaan Keluarga

- Kampanye kesadaran dilakukan secara intensif melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan penyuluhan langsung di masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya perencanaan keluarga dalam menekan angka kelahiran yang tidak terencana.

3. Pendekatan Kependudukan Berbasis Data

- Dengan memperkuat sistem pendataan kependudukan, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengendalian jumlah penduduk.

4. Penguatan Peran Penyuluh dan Kader KB

- Penyuluh KB dan kader keluarga berencana aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai serta memberikan pemahaman tentang

pentingnya keseimbangan antara jumlah anak dan kesejahteraan keluarga.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang mengalami tren **penurunan** dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka pertumbuhan mencapai **1,47%**, kemudian turun menjadi **1,3%** pada 2023, dan kembali turun menjadi **1,25%** pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian pertumbuhan penduduk yang cukup efektif.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang masih **lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (1,16%)**, tetapi lebih rendah dari beberapa daerah seperti Kota Serang yang memiliki pertumbuhan tertinggi (**1,61%**).

Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang antara lain **urbanisasi, ketersediaan lapangan kerja**, serta **program pengendalian penduduk** seperti keluarga berencana. Dengan pertumbuhan yang masih relatif tinggi, diperlukan strategi dalam **penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan** agar dapat mengimbangi perkembangan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan Program Keluarga Berencana (KB)
 - Meningkatkan akses dan edukasi terkait alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur.
 - Mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB untuk meningkatkan efektivitas pengendalian jumlah kelahiran.
 - Mengoptimalkan peran Posyandu dan Puskesmas dalam memberikan penyuluhan tentang perencanaan keluarga.
2. Pengendalian Urbanisasi dan Migrasi
 - Mengembangkan kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan di daerah-daerah sekitar Kabupaten Tangerang untuk mengurangi urbanisasi tinggi.

- Meningkatkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi di daerah asal migran untuk mengurangi arus perpindahan penduduk yang tidak terkendali.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesadaran Kependudukan
 - Memasukkan materi kesadaran kependudukan dan perencanaan keluarga dalam kurikulum sekolah.
 - Memberikan edukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi untuk menekan angka pernikahan dini.
 4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - Meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi ibu hamil untuk mencegah kehamilan berisiko dan tidak terencana.
 - Memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan berkualitas, terutama di daerah dengan tingkat kelahiran tinggi.
 5. Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
 - Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor ekonomi berbasis desa agar masyarakat tidak perlu bermigrasi ke kota besar.
 - Memberikan insentif bagi keluarga yang menerapkan keluarga kecil dan sejahtera sebagai bentuk apresiasi terhadap perencanaan keluarga yang baik.

SASARAN 06

Mewujudkan Lingkungan yang
Kondusif, Aman, dan Tertib

INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Tabel 3.7
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
2.14	1	214%	2.38

Pada tahun 2024, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, target indeks ketentraman dan ketertiban untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar **2,14**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah **1,00**. Dengan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai **214%**, yang mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas dalam penyelesaian permasalahan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tangerang.

Perhitungan indeks ini didasarkan pada persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilaporkan. Pada tahun 2024, jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah **98 kasus**, yang juga merupakan jumlah total pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang terjadi telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.

Namun, dalam dokumen perencanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2026, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan **Target Akhir RPD 2026**, di mana angka yang tercantum adalah **2,38**. Seharusnya, nilai target akhir ini lebih kecil dari target tahun 2024, mengingat bahwa indeks ini dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks, semakin baik capaian ketertiban dan ketentraman di daerah tersebut.

Komposisi penyusun indeks ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, laporan jumlah kriminalitas di tingkat kabupaten, serta faktor konflik sosial. Keberhasilan dalam peningkatan indeks ketentraman dan ketertiban diukur dengan membandingkan nilai indeks tahun berjalan (tahun n) dengan tahun sebelumnya (tahun n-1). Apabila nilai indeks lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Tangerang tahun 2024 telah menunjukkan progres yang baik. Namun, tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di tahun-tahun mendatang guna mencapai target akhir RPD 2026.

Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK). Berikut beberapa langkah yang telah diambil:

1. **Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2022:** Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Perda ini untuk mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Perda ini mencakup kebijakan, kewenangan, dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.
2. **Sosialisasi Perda kepada Masyarakat:** Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketertiban umum, sosialisasi Perda dilakukan di berbagai kecamatan. Misalnya, pada Oktober 2024, Kecamatan Gunung Kaler mengadakan sosialisasi yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat guna membahas strategi menjaga ketertiban di wilayah tersebut.
3. **Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas):** Pemerintah Kabupaten Tangerang memberdayakan Satlinmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. Upaya ini bertujuan memaksimalkan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan,
4. **Kolaborasi Antar Pihak:** Pencapaian kinerja Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencakup perumusan kebijakan, implementasi, serta pengawasan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Penguatan Regulasi dan Pengawasan**
 - Optimalisasi Perda No. 13 Tahun 2022.
 - Peningkatan kapasitas Satpol PP dan penerapan sanksi tegas.
2. **Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat**
 - Kampung tertib dan Siskamling berbasis komunitas.
 - Kerja sama dengan aparat keamanan.
3. **Pemanfaatan Teknologi**
 - CCTV, aplikasi pelaporan, dan sistem monitoring digital.
 - Analisis big data untuk deteksi dini daerah rawan.
4. **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**
 - Sosialisasi regulasi, pemberdayaan pemuda, dan rehabilitasi sosial.
5. **Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan**

- Sistem evaluasi kinerja, benchmarking dengan daerah lain, dan peningkatan anggaran.

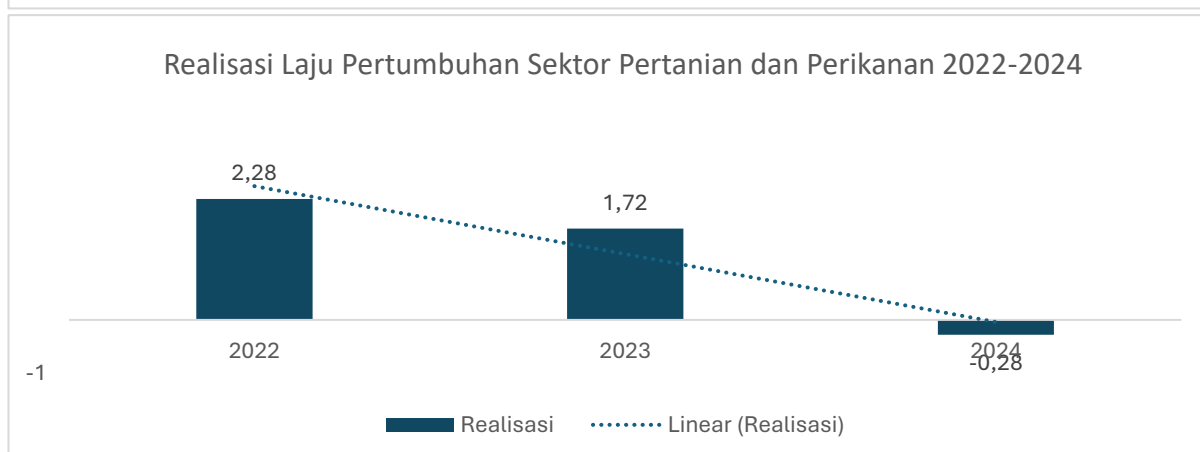
SASARAN 07

Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Sektor
Unggulan

LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

Tabel 3.8
Indeks Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
2%	-0,28%	-714%	3,88%



Sektor pertanian dan perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap laju pertumbuhan sektor ini menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Berdasarkan data yang tersedia, target pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar **2%**, namun realisasi menunjukkan angka negatif sebesar **-0,28%**. Hal ini menunjukkan capaian yang jauh di bawah target, dengan tingkat pencapaian sebesar **-714%**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar **3,88%**, maka tren pertumbuhan saat ini masih sangat mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi segera.

Analisis tren pertumbuhan selama tiga tahun terakhir juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, sektor ini masih mencatatkan pertumbuhan sebesar **2,28%**, namun mengalami perlambatan menjadi **1,72%** di tahun 2023, dan akhirnya mengalami kontraksi sebesar **-0,28%** pada tahun 2024.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan antara lain:

1. **Alih Fungsi Lahan Pertanian**
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Tangerang telah mendorong konversi lahan sawah irigasi menjadi area non-pertanian.
2. **Penurunan Jumlah Petani**
Alih fungsi lahan menyebabkan banyak petani kehilangan mata pencaharian, mengancam ketersediaan pangan, dan menurunkan jumlah petani di Kabupaten Tangerang.
3. **Bencana Alam**
Banjir yang terjadi di Kabupaten Tangerang menyebabkan lahan pertanian terendam, mengakibatkan gagal panen dan kerugian bagi petani. Tanaman padi, sayur-mayur, dan buah-buahan mengalami kerusakan signifikan, berdampak pada penurunan produksi pertanian dan kenaikan harga bahan pangan di pasaran.
4. **Fenomena Cuaca Ekstrem**
Fenomena El Niño yang terjadi pada paruh kedua tahun 2023 berdampak negatif pada produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan. Hal ini berkontribusi pada kontraksi sektor pertanian sebesar 3,54% pada awal tahun 2024.

RENCANA TINDAK LANJUT

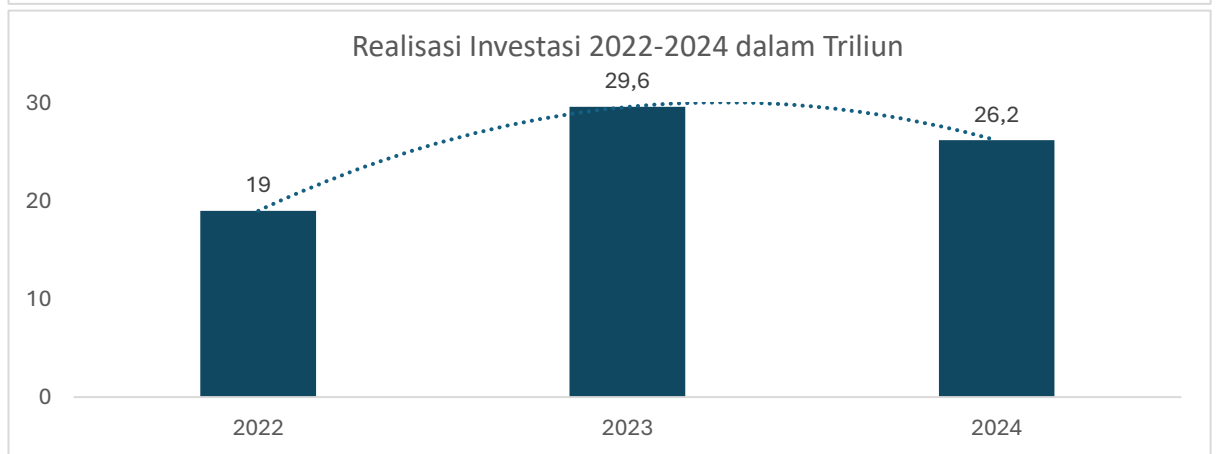
1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan menetapkan Kawasan Pertanian Berkelanjutan (KPB), memberikan insentif bagi petani, dan menerapkan pertanian vertikal.
2. Menarik Minat Generasi Muda melalui pelatihan pertanian modern, program petani milenial, dan pemasaran digital hasil pertanian.
3. Mitigasi Bencana Alam dengan upaya pembangunan irigasi, pertanian tahan bencana, dan asuransi pertanian.

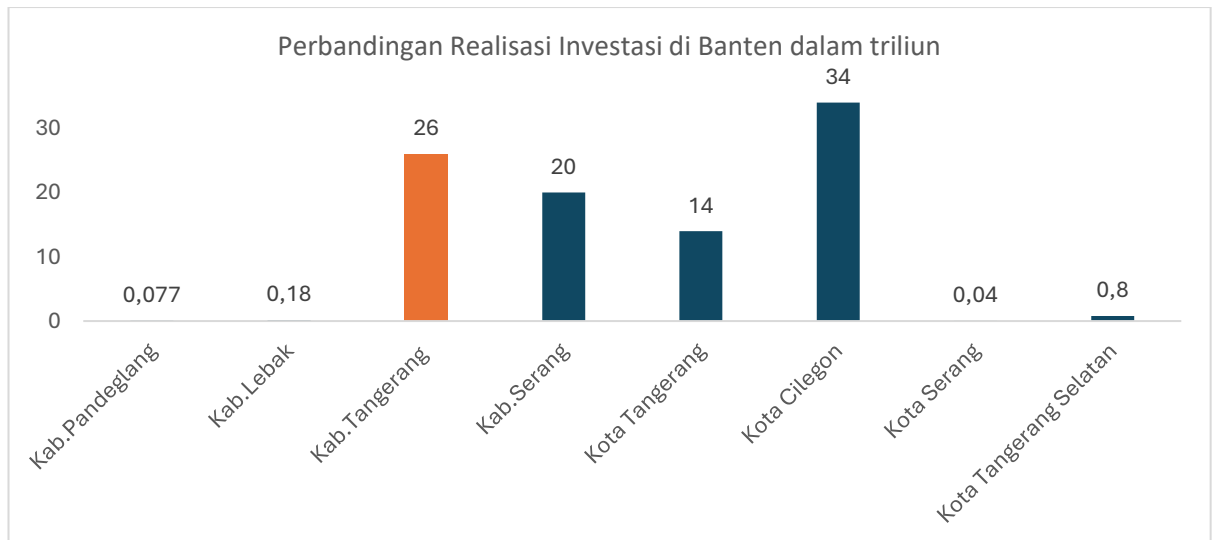
4. Mengatasi Dampak Cuaca Ekstrem melalui teknologi irigasi, varietas tanaman tahan kekeringan, dan prediksi cuaca berbasis data.
5. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi dengan penyediaan *cold storage*, monitoring tanaman dengan *drone*, dan embung untuk cadangan air.
6. Dukungan Finansial dan Kebijakan melalui aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi tepat sasaran, dan kemitraan dengan swasta.

PERSENTASE REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN)

Table 3.8
Persentase Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang (PMA/PMDN) Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
5,12%	-11,5%	-224%	5,12%



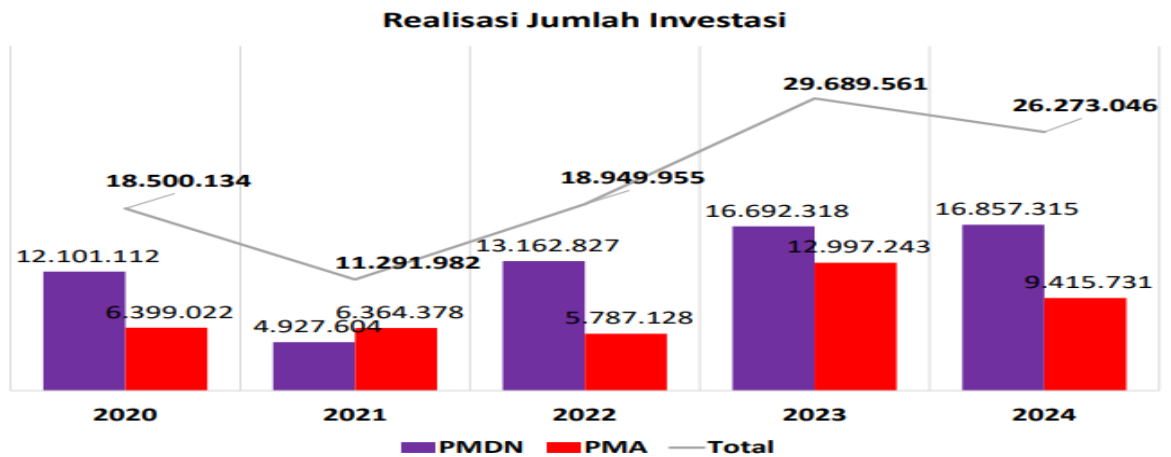


Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2024, terlihat bahwa target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar **5,12%** tidak tercapai, dengan realisasi justru mengalami penurunan sebesar **-11,5%** dibandingkan tahun sebelumnya. capaian kinerja investasi terlihat **-224%**, yang menunjukkan kegagalan mencapai target.

Namun, perhitungan ini kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika target dan realisasi investasi dikonversikan ke dalam nilai rupiah, target investasi tahun 2024 diperkirakan sekitar **Rp 31,1 triliun**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **Rp 26,27 triliun**. Dengan demikian, capaian kinerja yang lebih realistis adalah sekitar **85% dari target nominal investasi**.

Kesalahan utama dalam penetapan target ini terletak pada asumsi bahwa investasi akan selalu tumbuh secara linear setiap tahun dengan angka tetap **5,12%**, tanpa mempertimbangkan **tren historis investasi yang fluktuatif serta faktor eksternal yang berpengaruh**.

Selain itu, metode perhitungan capaian kinerja yang membandingkan realisasi terhadap target pertumbuhan tahunan menyebabkan hasil yang terlihat lebih buruk dari kenyataan. Meskipun realisasi investasi masih mencapai Rp 26,27 triliun atau sekitar 85% dari target dalam rupiah, capaian kinerja yang dihitung dari persentase pertumbuhan malah menunjukkan **-224%**, yang bisa memberikan kesan bahwa tidak ada yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang padahal realisasi investasi cukup besar.



Data Realisasi Investasi dalam jutaan (Rp)

Berdasarkan grafik realisasi jumlah investasi dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa tren investasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi investasi mencapai puncaknya sebesar **Rp 29,68 triliun**, sebelum mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi **Rp 26,27 triliun**.

Penurunan investasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan situasi politik nasional, di mana Indonesia mengadakan **Pemilihan Umum (Pemilu 2024)**. Tahun politik sering kali menciptakan **ketidakpastian bagi investor**, baik PMDN maupun PMA, karena adanya potensi perubahan kebijakan, pergeseran kepemimpinan, serta dinamika ekonomi yang belum stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan

- Khawatiran Investor terhadap kemungkinan perubahan aturan investasi, pajak, dan insentif bisnis yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha mereka.

2. Fluktuasi Ekonomi dan Nilai Tukar

- Tahun politik sering kali diiringi oleh gejolak ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar modal yang tidak menentu.

3. Perubahan Prioritas Pembangunan

- Fokus pemerintah pada penyelenggaraan pemilu dapat mengalihkan perhatian dari sektor investasi dan infrastruktur, sehingga program yang mendukung investasi mungkin mengalami perlambatan.

Dampak dari faktor-faktor ini terlihat dalam realisasi investasi Kabupaten Tangerang pada tahun 2024, yang mengalami **penurunan sebesar -11,5% dibandingkan tahun sebelumnya**. Meskipun nilai investasi masih cukup besar, ketidakpastian yang terjadi selama tahun politik membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

RENCANA TINDAK LANJUT

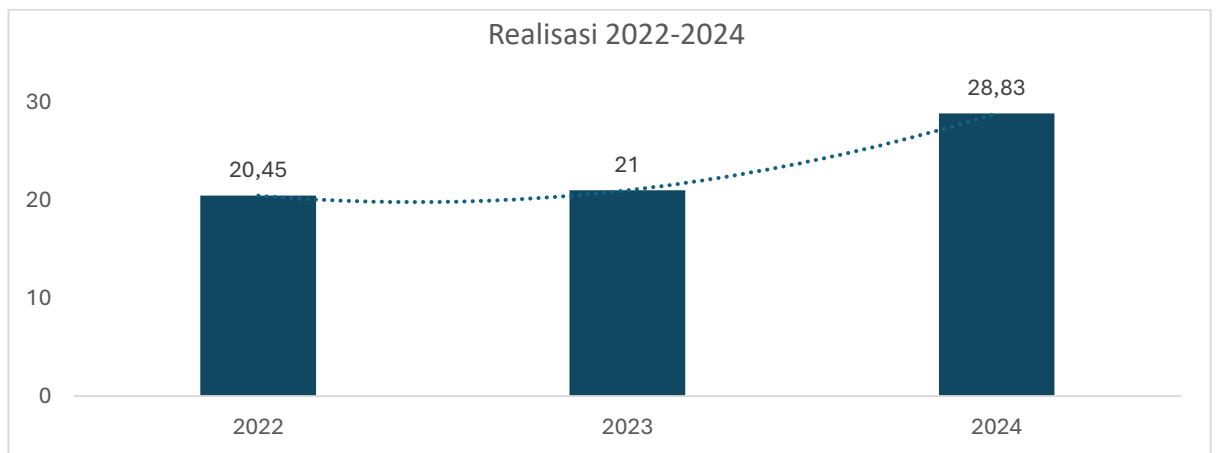
- a. Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia;
- b. Peningkatan intensitas edukasi pada calon pemohon dan pemroses izin mengenai PBUMKU mengingat perizinan tersebut sangat dibutuhkan pelaku usaha untuk dapat melanjutkan ke tahap operasional dan/atau tahap komersial;
- c. Akses dan fitur akun OSS RBA untuk helpdesk di daerah perlu diperluas agar dapat membantu secara langsung permasalahan perizinan yang terjadi di daerah dalam rangka mempercepat waktu layanan;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan proses bisnis penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan baik di Provinsi maupun

Kabupaten/Kota secara daring dan tatap muka, membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

PERSENTASE DAYA SAING PRODUK UNGGULAN

Table 3.9
Persentase Daya Saing Produk Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
22,73%	28,83%	126,8%	30,30%



Daya saing produk Unggulan Lokal dari usaha mikro, kecil dan menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah dari dua jumlah produk tersebut yang dijual keluar daerah Kab Tangerang baik sekala regional, nasional maupun internasional (ekspor).

Pada tahun 2024, **target yang ditetapkan sebesar 22,73%** berhasil terlampaui dengan **realisasi mencapai 28,83%**. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk unggulan, dengan capaian kinerja yang mencapai **126,8% dari target yang direncanakan**.

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan, Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai kegiatan kemitraan dan promosi sepanjang tahun. Berdasarkan data capaian, total **703 kegiatan promosi dan kemitraan** telah terlaksana melalui berbagai event strategis, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Kabupaten Tangerang.

Beberapa kegiatan utama yang berkontribusi dalam promosi ini antara lain **Pameran Bandara 2024, Tangexpo, Digital Marketing, Pameran HUT RI, serta berbagai festival kuliner dan produk unggulan lainnya**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas serta daya tarik produk lokal di berbagai segmen pasar.

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan **produk unggulan yang dipasarkan di luar Kabupaten Tangerang**, sebanyak **173 kegiatan telah difokuskan pada pameran dan promosi di tingkat nasional**. Beberapa event penting dalam upaya ini mencakup **Pameran Apkasi, IKN Expo, Pameran Indoma, serta Pameran Hari UMKM Nasional**. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai pameran luar daerah, diharapkan produk unggulan Kabupaten Tangerang semakin dikenal dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar yang lebih luas.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan ekosistem bisnis dan UMKM lokal agar semakin kompetitif. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar di luar daerah dan memperluas akses produk unggulan melalui strategi digitalisasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Ke depan, strategi pemasaran yang lebih luas dan inovatif akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Ekspansi Pasar ke Level Nasional dan Internasional

- Meningkatkan partisipasi dalam pameran dan expo bertaraf internasional.
- Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan kementerian terkait untuk membuka akses pasar lebih luas.
- Memanfaatkan platform perdagangan digital global untuk memperkenalkan produk unggulan ke luar negeri.

2. Optimalisasi Digital Marketing dan E-Commerce

- Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pemasaran digital melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
- Membangun platform e-commerce lokal atau bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas jangkauan produk.
- Menggunakan strategi iklan digital yang lebih efektif, seperti pemasaran melalui media sosial, influencer, dan iklan berbayar.

3. Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk

- Memastikan produk unggulan memiliki standar kualitas yang sesuai dengan pasar nasional dan internasional.
- Mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, BPOM, dan SNI untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
- Meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk agar lebih kompetitif di pasar.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

- Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pelaku usaha besar, ritel modern, dan eksportir.
- Mendorong kerja sama dengan instansi pendidikan dan pusat riset untuk meningkatkan inovasi produk.
- Memperkuat kolaborasi dengan komunitas bisnis dan asosiasi industri guna meningkatkan daya saing bersama.

5. Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan

- Menyelenggarakan kampanye promosi terintegrasi yang mengangkat keunikan dan nilai tambah produk lokal.
- Mengembangkan konsep branding daerah yang kuat agar produk unggulan lebih dikenal secara luas.
- Mengadakan festival produk unggulan secara rutin untuk menarik lebih banyak pembeli dan investor.

6. Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

- Mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kredibilitas produk.
- Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti pusat distribusi, gudang penyimpanan, dan sistem logistik yang efisien.
- Memberikan insentif dan bantuan modal bagi UMKM yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing lebih kuat

PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

Table 3.10
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
3,41%	-0,17%	-5%	3,73%

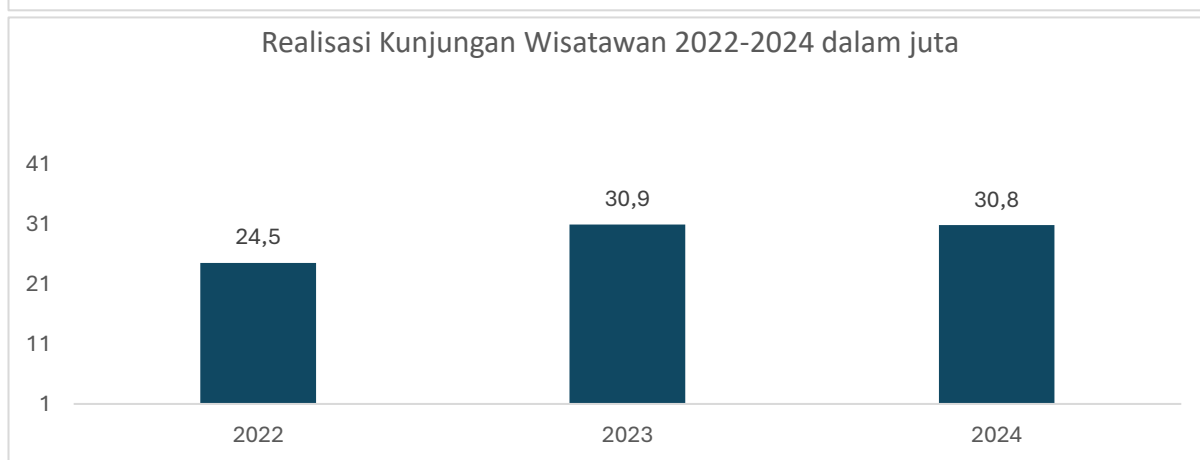


Table 3.11
Jumlah Wisatawan Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2024

2023		2024	
Wisatawan nusantara	Wisatawan mancanegara	Wisatawan nusantara	Wisatawan mancanegara
30.915.147	16.904	30.842.595	34.871

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah wisatawan domestik (wisnus) pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari **30.915.147 orang di tahun 2023 menjadi 30.842.595 orang di tahun 2024**. Sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mengalami lonjakan signifikan dari **16.904 orang pada tahun 2023 menjadi 34.871 orang di tahun 2024**.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, secara keseluruhan target pertumbuhan wisatawan sebesar **3,41% di tahun 2024 tidak tercapai**, dengan realisasi yang justru mengalami **penurunan sebesar -0,17%**. Hal ini menyebabkan capaian kinerja hanya berada di angka **-5%** dari target yang diharapkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan wisatawan di Kabupaten Tangerang antara lain:

1. **Promosi yang masih kurang efektif** – Strategi pemasaran yang belum maksimal dalam menjangkau wisatawan domestik maupun internasional.
2. **Aksesibilitas yang masih perlu ditingkatkan** – Meskipun sudah ada perbaikan infrastruktur, beberapa destinasi wisata masih sulit dijangkau dengan transportasi umum.
3. **Kurangnya event wisata yang menarik** – Acara atau festival wisata yang menjadi daya tarik utama masih perlu diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya.
4. **Masalah kebersihan dan pengelolaan destinasi wisata** – Beberapa lokasi wisata masih menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah dan fasilitas umum.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata, antara lain:

1. **Kerja Sama dengan PHRI** dalam pengembangan destinasi wisata dan peningkatan fasilitas pendukung.
2. **Penyelenggaraan Festival Pesisir**, seperti Sedekah Laut, untuk menarik lebih banyak wisatawan ke daerah pesisir.

3. **Peningkatan infrastruktur wisata**, seperti perbaikan jalan menuju destinasi wisata utama.
4. **Promosi melalui pemilihan Kang dan Nong Tangerang** sebagai duta pariwisata daerah.
5. **Pengelolaan kebersihan dan keamanan destinasi wisata** untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Meningkatkan promosi wisata secara digital** melalui media sosial, platform pariwisata, dan kerja sama dengan influencer.
2. **Memperluas aksesibilitas transportasi** dengan menyediakan lebih banyak rute kendaraan umum ke destinasi wisata.
3. **Mengadakan event wisata berskala nasional** guna menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai daerah.

SASARAN 08

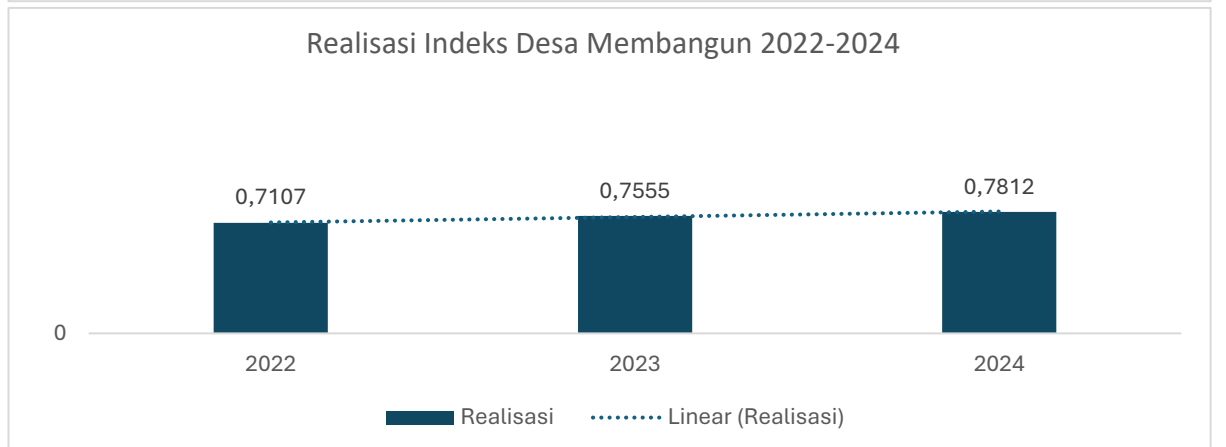
103

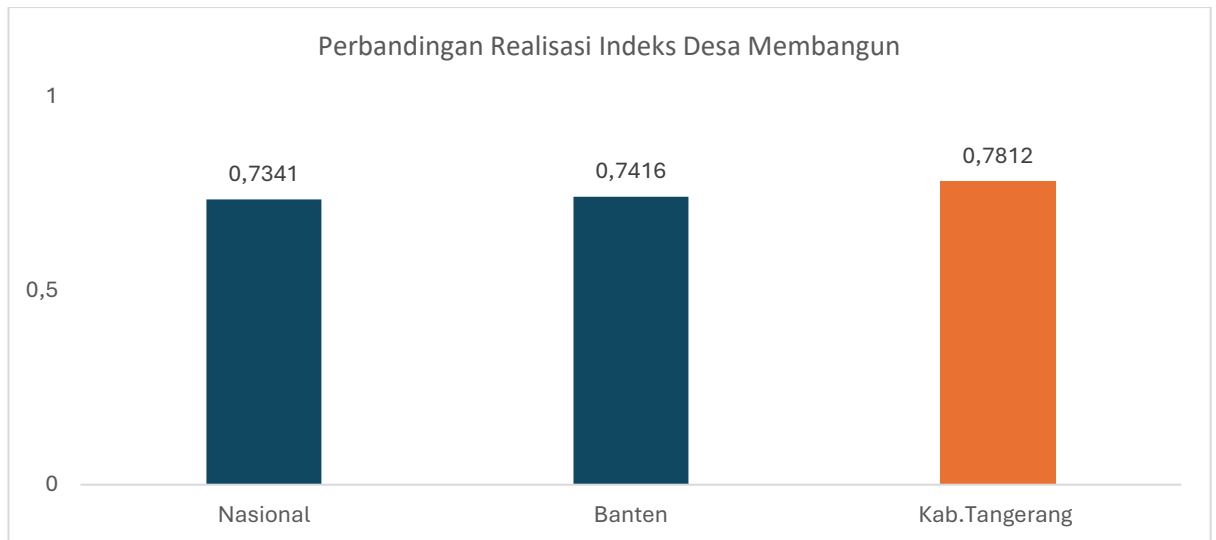
**Meningkatkan
Kemampuan Desa**

INDEKS DESA MEMBANGUN

Tabel 3.12
Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.76	0.78	102.6%	0.7507





Indeks Desa Membangun terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

IDM dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

Keterangan :

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi).

Perhitungan Indeks Desa Membangun memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pembangunan desa
2. Menjadi alat evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan pembangunan desa
3. Memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat desa
4. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran

IDM selanjutnya digunakan dalam pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal. Adapun progress status Desa di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 3.13

Klasifikasi Desa Berdasarkan Status Tahun 2019-2024

TAHUN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2019	0 DESA	46 DESA	191 DESA	9 DESA	0 DESA
2020	1 DESA	50 DESA	195 DESA	0 DESA	0 DESA
2021	1 DESA	55 DESA	190 DESA	0 DESA	0 DESA
2022	5 DESA	114 DESA	127 DESA	0 DESA	0 DESA
2023	36 DESA	167 DESA	43 DESA	0 DESA	0 DESA
2024	78 DESA	143 DESA	25 DESA	0 DESA	0 DESA

Pada tahun 2024, Kabupaten Tangerang berhasil mencapai target kinerja yang sangat signifikan dalam meningkatkan pembangunan desa melalui peningkatan jumlah desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan

Kemandirian Desa Tahun 2024, capaian desa mandiri mencapai 31,71% atau sebanyak 78 desa dari total 246 desa di Kabupaten Tangerang. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,16% atau 25 desa, dengan capaian sebesar 312,11%, yang tergolong sangat baik.

Capaian yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah peningkatan pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap manfaat menjadi desa mandiri. Keuntungan utama status desa mandiri adalah pencairan anggaran yang dapat dilakukan dua kali dalam setahun, yang mempercepat realisasi pembangunan desa. Selain itu, desa mandiri juga mendapatkan berbagai manfaat lainnya, seperti peningkatan akses keuangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, penguatan koperasi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta akses pasar yang lebih luas untuk memasarkan produk unggulan desa. Pemerintah juga memberikan insentif berupa dana tambahan, penghargaan, dan kemudahan akses program pembangunan kepada desa yang mencapai status mandiri, yang memotivasi desa-desa lain untuk terus meningkatkan kinerja.

Peningkatan signifikan dalam jumlah desa mandiri bukan hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun, yang menjadi ukuran utama dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan desa di Indonesia. Target Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 0.76, dengan realisasi yang dicapai melampaui target, yaitu 0.78. Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 102.6%, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan desa dibandingkan dengan perencanaan awal.

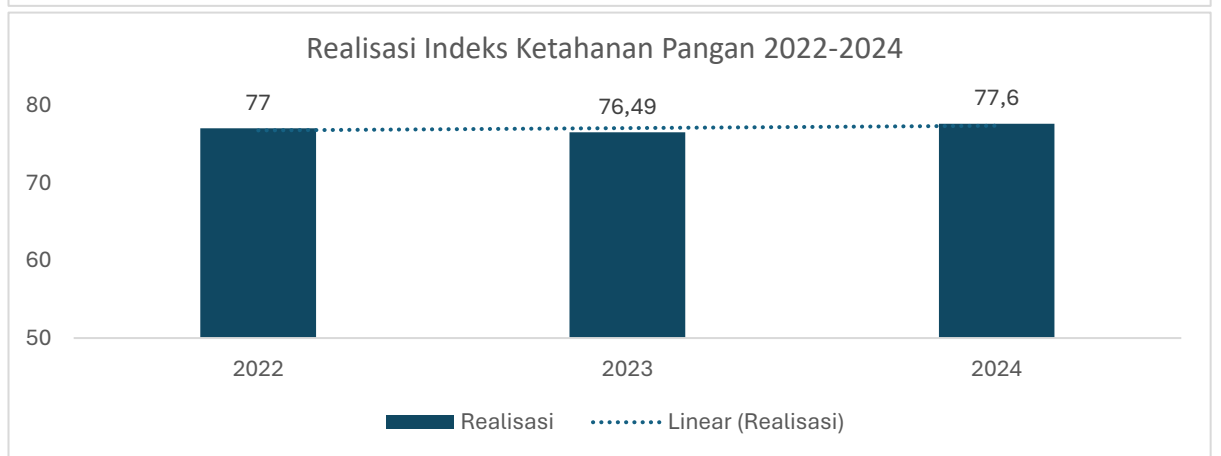
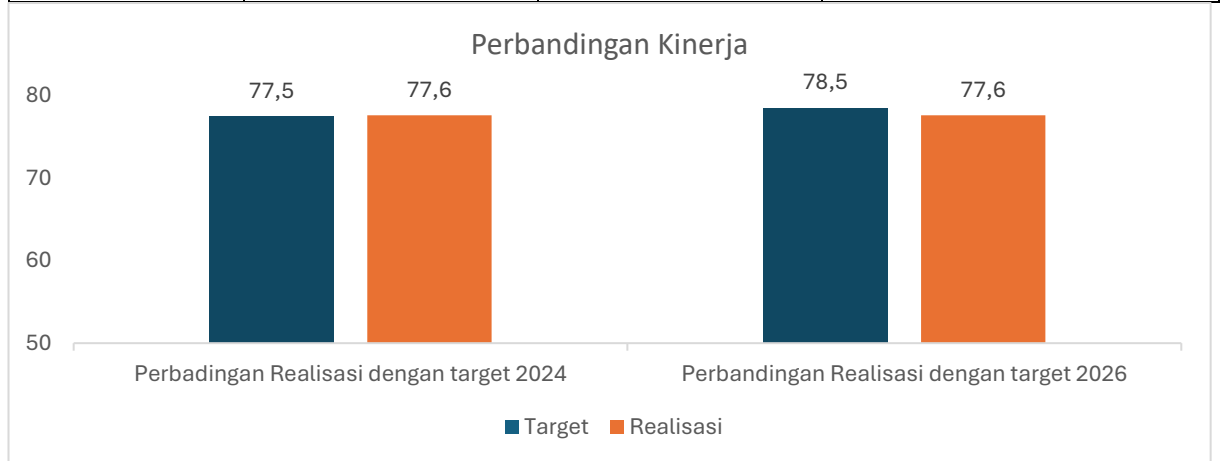
SASARAN 09

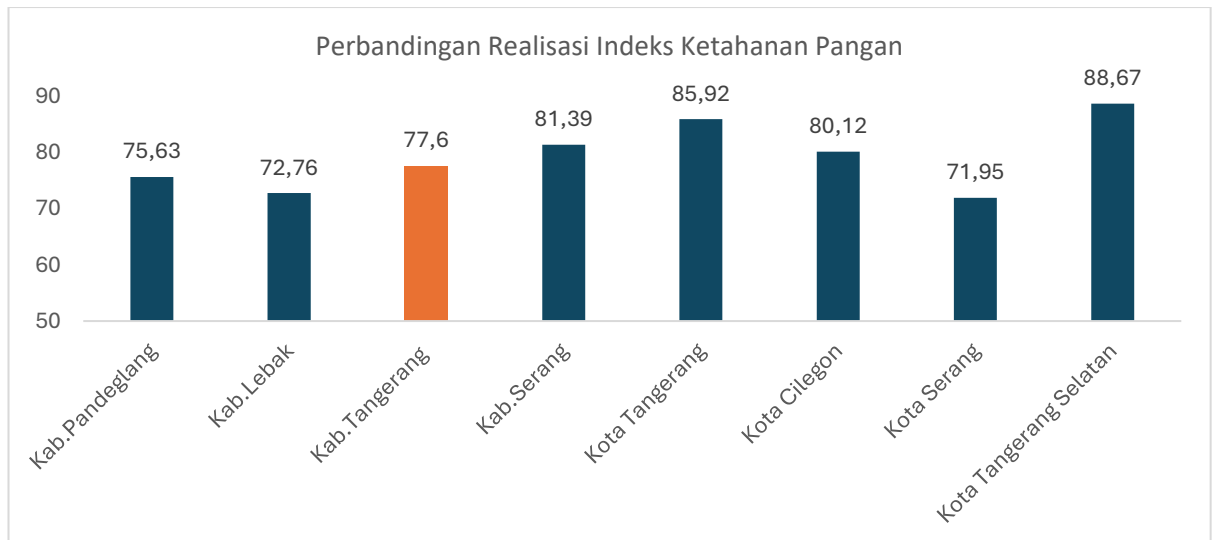
**Meningkatnya
Ketahanan Pangan**

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Tabel 3.14
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
77,5	77,6	100.1%	78,50





Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting dalam mengukur ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di suatu daerah. Ketahanan pangan yang baik mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan mencapai **77,6**, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar **77,5**. Capaian ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan terkait ketahanan pangan telah berjalan dengan baik, dengan persentase capaian kinerja sebesar **100,1%**.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- **Tahun 2022:** 77,0
- **Tahun 2023:** 76,49
- **Tahun 2024:** 77,6

Terlihat bahwa pada tahun 2023, indeks mengalami sedikit penurunan menjadi **76,49** dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai **77,0**. Namun, pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi **77,6**, menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan dalam aspek ketahanan pangan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang masih berada pada tingkat yang cukup baik. Beberapa daerah

di sekitarnya memiliki angka yang lebih tinggi, seperti Kota Tangerang (**85,92**) dan Kota Tangerang Selatan (**88,67**), namun ada juga daerah yang memiliki angka lebih rendah, seperti Kabupaten Lebak (**72,16**) dan Kabupaten Pandeglang (**75,63**). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang sudah berada dalam tren positif, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai standar yang lebih tinggi.

Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai target Indeks Ketahanan Pangan, di antaranya:

1. **Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan (MANTAP):** Program unggulan ini bertujuan mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus pada pembangunan sentra hortikultura.
2. **Pengembangan Kawasan Agropolitan:** Sebagai bagian dari Program Tangerang MANTAP, Kabupaten Tangerang mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Fokusnya adalah pembangunan sentra hortikultura, yang juga berperan dalam meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan.
3. **Penyaluran Bantuan Pangan Beras Fortifikasi:** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyalurkan beras fortifikasi ke 18 desa yang rentan rawan pangan. Tujuannya adalah menurunkan jumlah desa rentan rawan pangan dan gizi di Kabupaten Tangerang.

Meskipun target tahun 2024 telah tercapai, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan ketahanan pangan ke depannya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. **Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Kabupaten Tangerang terus mengalami urbanisasi yang pesat, menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi area pemukiman dan industri.

Hal ini dapat berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah semakin meningkat.

2. Ketergantungan terhadap Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Tangerang masih dipenuhi melalui distribusi dari daerah lain. Ketergantungan ini menyebabkan risiko ketahanan pangan, terutama jika terjadi gangguan distribusi, kenaikan harga, atau krisis pangan akibat faktor eksternal seperti perubahan iklim dan bencana alam.

3. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan

Faktor cuaca dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Intensitas hujan yang tinggi, kekeringan, serta perubahan pola musim dapat mengganggu produksi pangan lokal. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan dan berkurangnya ketersediaan bahan pangan pokok.

4. Kualitas Gizi dan Diversifikasi Pangan

Meskipun ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang relatif stabil, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan gizi yang cukup. Diversifikasi pangan dan peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang bernutrisi tinggi perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal

- Mendorong program pertanian berkelanjutan dengan penggunaan teknologi modern, seperti pertanian hidroponik dan pertanian berbasis digital.
- Meningkatkan insentif dan dukungan kepada petani lokal untuk memperluas area pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan yang ada.
- Memanfaatkan lahan-lahan marginal untuk dijadikan lahan produktif guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

2. Penguatan Distribusi dan Akses Pangan

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap stabil dan akses pangan merata di seluruh wilayah.
- Mengembangkan pasar pangan lokal yang dapat mendukung petani dan produsen pangan dalam memasarkan hasil panennya.
- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah-daerah yang rawan pangan.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

- Mengembangkan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
- Memanfaatkan sistem irigasi yang lebih efisien untuk mengantisipasi risiko kekeringan.
- Menggalakkan program penghijauan dan konservasi lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

4. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi pangan.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan mendorong pemanfaatan pangan lokal yang lebih beragam.
- Mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, seperti kebun pangan rumah tangga dan urban farming.

SASARAN 10

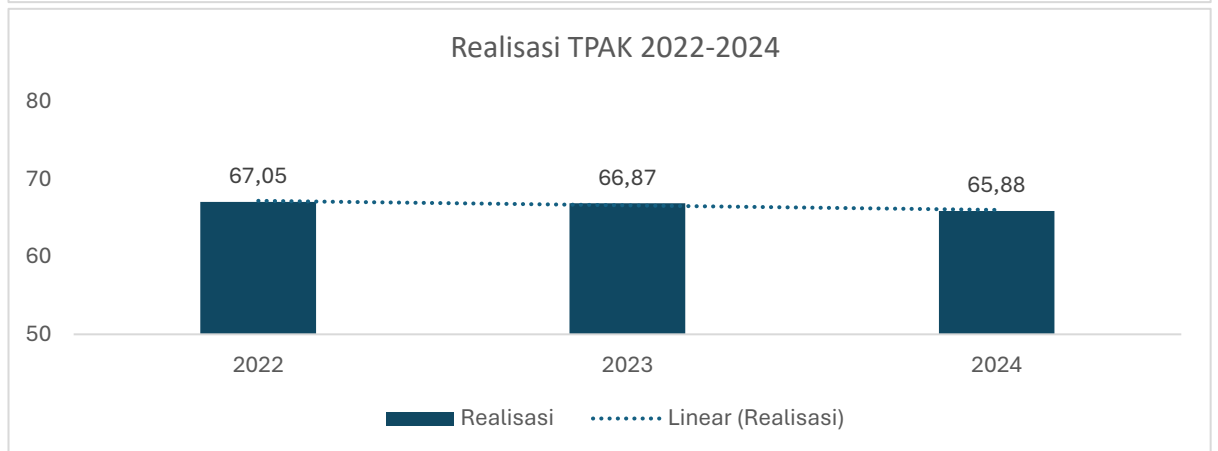
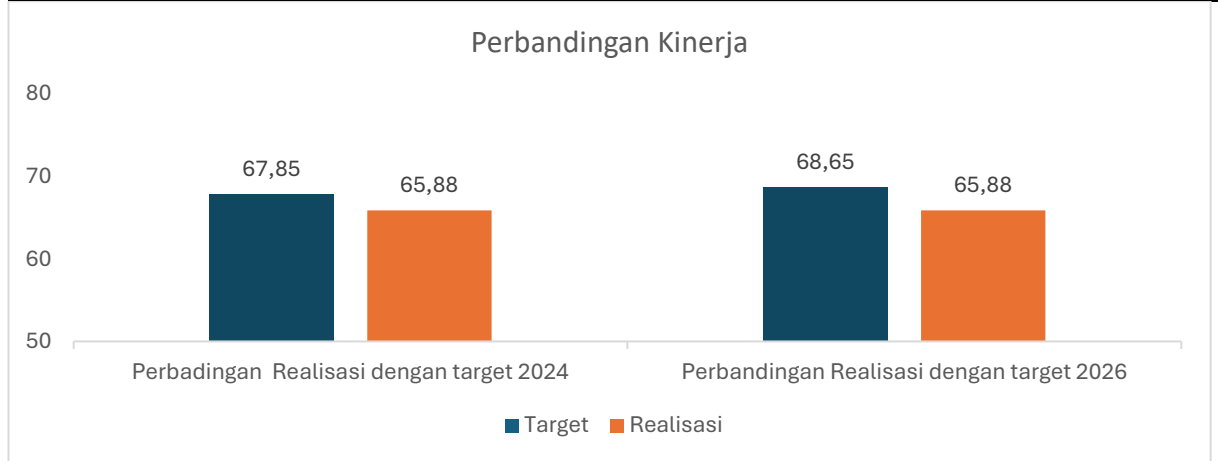
Meningkatnya Daya

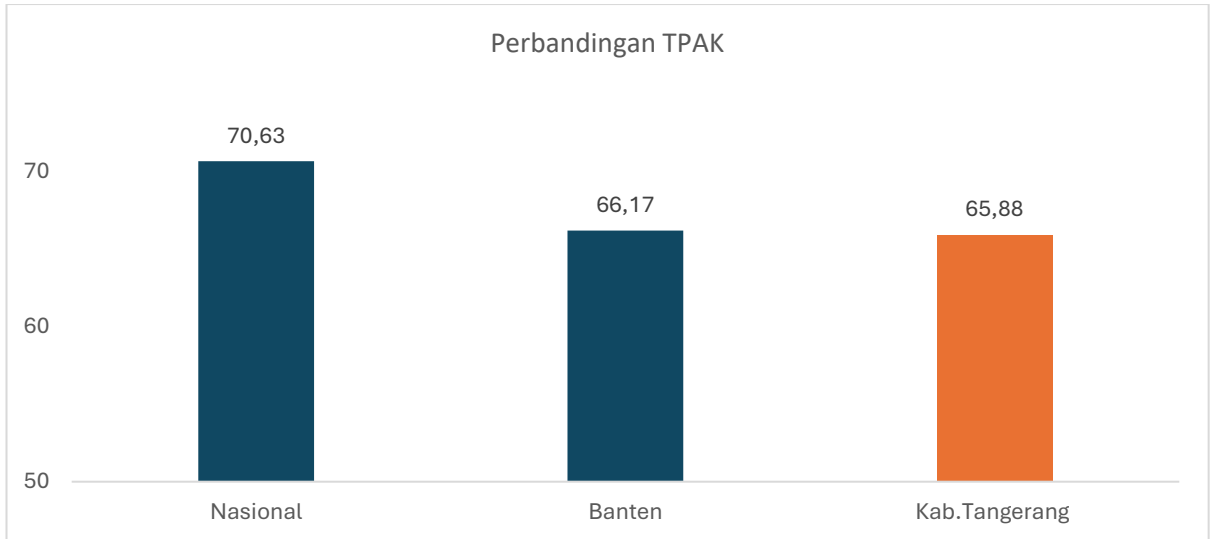
Saing Tenaga Kerja

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tabel 3.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
67.85	65.88	97.1%	68.65





Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja dalam dunia kerja. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total jumlah penduduk usia kerja. Secara rinci rumus tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$\text{TPAK} = \text{jumlah angkatan kerja} / \text{jumlah penduduk 15 tahun ke atas} \times 100\%$$

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 dari target sebesar 67,85 % terealisasi 65,88 % dengan capaian kinerja sebesar 97,1 %. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2024 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	1.102.479	589.397	1.691.876
1.1	Bekerja	1.038.191	551.175	1.589.366

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.2	Pengangguran	64.288	38.222	102.510
2	Bukan Angkatan Kerja	205.499	670.671	876.170
	Jumlah	1.307.978	1.260.068	2.568.046
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,83	6,48	6,06
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,29	46,78	65,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

selama 3 tahun terakhir 2022-2024 angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dimana tahun 2024 sebesar 65,88 % turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 66,87% ini menggambarkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 65 hingga 66 orang yang aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian baik mereka yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tangerang masih dibawah angka Provinsi Banten dan Nasional. Angka TPAK Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 65,88 % di sedangkan Angka TPAK Provinsi Banten sebesar 66,17% dan Nasional 70,63%.

Hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) Oleh BPS mencatat bahwa Tingkat Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tangerang mencapai 65,88 %. Mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi, dari total jumlah penduduk usia kerja produktif (15-64 tahun) hanya 65,88 % atau 1.691.876 juta orang yang bekerja dan sedang menganggur yang aktif secara ekonomi dan masih terdapat 34,12 % atau 876.170 ribu orang usia produktif yang tidak aktif secara ekonomi dimana mayoritas dari mereka adalah mengurus rumah tangga dan siasanya masih sekolah.

Upaya yang dilaksanakan dalam optimalisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Sebagai Berikut :

1. Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat Tahun 2024 UPT Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat bagi pencari kerja berjumlah 1744 Orang.

Tabel 3.17

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat

No	Jenis Pelatihan	Jumlah yang dilatih
1	Menjahit Sepatu	192
2	Menjahit Garment	64
3	Menjahit Pakaian	96
4	Basic Office	64
5	Desain Grafis	32
6	Multimedia	32
7	Otomotif Sepeda Motor	32
8	Operator Forklift	192
9	Las Listrik SMAW 2F	96
11	Barista	64
12	Instalasi Listrik	96
13	Teknisi AC	32
14	Teknisi AC MTU	272
15	Kebutuhan Rumah Tangga MTU	32
17	Pangkas Rambut (MTU)	64
19	Menjahit Pakaian (MTU)	64
20	Kuliner	48
22	Bahasa Korea	16
23	Bahasa Jepang	16
24	Bahasa Inggris	16
25	Bahasa Mandarin	16
28	Otomotif Sepeda Motor (MTU)	16
29	Digita Marketing	64
30	Tata Rias	16
31	Tata Rias (MTU)	32
32	Service handphoe (MTU)	48
33	Sablon	32
34	Anyaman Bambu	32
	JUMLAH	1.744

Selain menggunakan dana APBD Dinas Tenaga Kerja melakukan kerjasama pelatihan dengan Lembaga atau organisasi berjumlah 406 orang Kerjasama pelatihan dengan lembaga terkait seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga/Organisasi tahun 2024

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Jumlah
1.	Computer Operator Asistens	Kementerian Ketenagakerjaan	16
2.	Practical Official Advance	Kementerian Ketenagakerjaan	48
3.	Las Listrik	Kementerian Ketenagakerjaan	16
4.	Menjahit Pakaian	Kementerian Ketenagakerjaan	32
5.	Pelatihan dan Sertifikasi jasa konstruksi	Habitat For humanity Indonesia	210
6.	Pelatihan <i>Sanitary Higiene</i> dan Pemeliharaan Ac	STPI Curug Kementerian Perhubungan	100

2. Melalui Perluasan Kesempatan Kerja

Selain melaksanakan pelatihan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 melaksanakan perluasan kesempatan kerja Melalui kegiatan Pembentukan wira usaha baru

Tabel 3.19
Pembentukan Wira Usaha Baru

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PESERTA	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1	Menjahit Aksesoris Rt	16	Cikupa	Sukadamai
2	Sablon	16	Sindang Jaya	Sindang Panon
3	Sablon	16	Sepatan	Pondok Jaya
4	Pengolahan Krupuk	16	Sindang Jaya	Sukaharja
5	Pangkas Rambut	16	Pakuhaji	Pakualam
6	Pangkas Rambut	16	Pasarkemis	Pangadegan

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PESERTA	KECAMATAN	DESA
7	Pangkas Rambut	16	Sukadiri	Se Kec. Sukadiri
8	Pangkas Rambut	16	Sepatan Timur	Se Kec. Sepatan Timur
9	Service Ac	32	One Village One Partisipant	Pelatihan Disnaker
10	Service Ac	16	Pagedangan	Se Kec. Pagedangan
11	Service Ac	16	Tigaraksa	Margasari
12	Service Ac	16	Jambe	Tipar Raya
13	Service Ac	16	Kelapa Dua	Bojong Nangka
14	Service Ac	16	Cikupa	Sukadamai
15	Service Ac	16	Solear	Solear
16	Service Ac	16	Pakuhaji	Pakualam
17	Service Ac	16	Pakuhaji	Sukawali
18	Service Ac	16	Pakuhaji	Laksana
19	Service Ac	16	Pakuhaji	Surya Bahari
20	Service Ac	16	Pakuhaji	Kramat
21	Service Ac	16	Pakuhaji	Kiara Payung
22	Service Ac	16	Pakuhaji	Buaran Bambu
23	Service Ac	16	Pakuhaji	Buaran Mangga
24	Service Ac	16	Cisoka	Caringin, Selapajang
25	Menjahit Aksesoris Rt	16	Cisoka	Caringin, Selapajang
26	Menjahit Busana	16	Cikupa	Bunder
27	Menjahit Busana	16	Tigaraksa	Sodong
28	Bengkel Sepeda Motor	16	Tigaraksa	Sodong
29	Anyaman Bambu	16	Sukamulya	Buniayu
30	Anyaman Peci Bambu	16	Jambe	Tipar Raya
31	Tata Rias Kecantikan	16	Mekarbaru	Waliwis
32	Menjahit	16	Panongan	Mekarbakti
33	Kuliner Jajanan	16	Mekarbaru	Klutuk
34	Mie Ayam Bakso	16	Pakuhaji	Pakualam
35	Tata Rias Kecantikan	16	Kronjo	Pasilian
36	Service Hp	16	Pakuhaji	Bonisari
37	Service Hp	16	Pakuhaji	Pakualam
38	Digital Marketing	16	Pakuhaji	Pakualam
	Jumlah	576		

Hambatan dalam pencapaian realisasi TAPK antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Ekonomi

- Berkurangnya peluang kerja di sektor padat karya (misalnya industri manufaktur yang mengalami otomatisasi).
- Pergeseran dari sektor formal ke informal yang tidak tercatat dalam survei ketenagakerjaan.

2. Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi

- Kabupaten Tangerang memiliki kawasan industri yang cukup besar, namun persaingan kerja yang ketat serta dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memengaruhi angka TPAK.
- Tingginya kebutuhan keterampilan baru akibat perubahan industri menyebabkan tidak semua tenaga kerja dapat bersaing.

3. Faktor Sosial dan Demografi

- Bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif atau meningkatnya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- Meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja karena kondisi sosial-ekonomi.

4. Kurangnya Akses dan Peluang Kerja bagi Masyarakat Lokal

- Tidak meratanya informasi terkait peluang kerja dan pelatihan keterampilan.
- Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan Program Pelatihan dan Upskilling

- Meningkatkan akses pelatihan keterampilan berbasis industri 4.0, seperti digital marketing, data analytics, dan manufaktur modern.
- Kolaborasi dengan perusahaan di Tangerang untuk program magang dan rekrutmen tenaga kerja lokal.

2. Mendorong Sektor UMKM dan Wirausaha

- Memberikan dukungan modal dan pendampingan bagi UMKM agar lebih banyak menciptakan lapangan kerja.

- Mempermudah akses permodalan bagi pengusaha kecil dan startup lokal.

3. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dan Generasi Muda di Pasar Kerja

- Program kerja fleksibel bagi perempuan yang ingin bekerja sambil mengurus keluarga.
- Pelatihan kerja bagi anak muda agar lebih siap memasuki dunia kerja.

4. Peningkatan Investasi dan Insentif bagi Perusahaan

- Menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- Insentif pajak bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

5. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja

- Optimalisasi platform digital dan bursa kerja online untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan.
- Mengadakan job fair rutin dan memperluas layanan bimbingan karir.

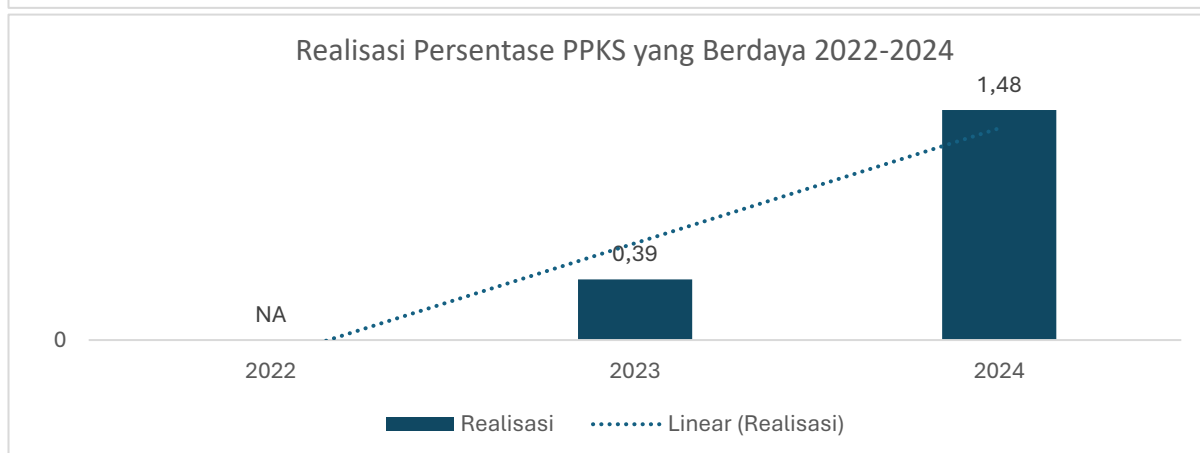
SASARAN 11

**Meningkatnya Cakupan
Penanganan PPKS**

PERSENTASE PPKS YANG BERDAYA

Table 3.20
Persentase PPKS yang Berdaya Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1,44%	1,48%	102,8%	1,87%



Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan **Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa kelompok rentan di masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai kesempatan ekonomi, pendidikan, serta layanan sosial.

PPKS mencakup berbagai kelompok rentan, seperti **anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, korban tindak kekerasan, warga miskin, serta**

fakir miskin. Berdasarkan data terbaru, jumlah total PPKS yang terdaftar di wilayah ini mencapai **80.946 orang**. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya agar sebanyak mungkin dari mereka dapat berdaya secara ekonomi dan sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan.

Pada tahun 2024, persentase PPKS yang berdaya telah mencapai **1,48%**, yang berarti sekitar **1.198 individu** berhasil memperoleh kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **1,44%**, dengan tingkat pencapaian **102,8%**. Tren positif ini mencerminkan efektivitas berbagai program yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk **pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, bantuan sosial produktif, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.**

Jika melihat tren realisasi dari tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, persentase PPKS yang berdaya masih berada di angka **0,39%**, namun dalam waktu satu tahun, jumlahnya meningkat hampir empat kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mulai memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan para penerima manfaat.

Meskipun capaian saat ini cukup menggembirakan, masih terdapat tantangan besar untuk mencapai **target akhir tahun 2026 sebesar 1,87%**. Untuk mencapai angka tersebut, diperlukan peningkatan sebesar **0,39% lagi**, atau sekitar **316 individu tambahan** yang harus diberdayakan dalam dua tahun ke depan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya ini meliputi:

1. Minimnya Keterampilan dan Akses Pekerjaan

- Sebagian besar PPKS berasal dari kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Banyak dari mereka tidak memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja yang cukup untuk memasuki dunia kerja formal.

2. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

- Faktor ekonomi menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kemandirian PPKS.
- Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan modal bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil.

3. Kurangnya Kesempatan dalam Dunia Usaha dan Industri

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki kebijakan inklusif dalam merekrut tenaga kerja dari kelompok rentan.
- Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam program pemberdayaan juga menjadi salah satu kendala.

4. Ketergantungan pada Bantuan Sosial

- Sebagian PPKS masih bergantung pada bantuan sosial yang sifatnya sementara, sehingga sulit untuk bertransisi menuju kemandirian penuh.
- Kurangnya program pendampingan jangka panjang menyebabkan banyak dari mereka kembali ke kondisi awal setelah menerima bantuan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memastikan lebih banyak PPKS yang dapat berdaya, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan Akses Pelatihan dan Pendidikan Vokasi

- Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis industri, teknologi, dan kewirausahaan bagi PPKS agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk menyediakan program magang dan sertifikasi bagi kelompok rentan.

2. Mendorong Kewirausahaan Sosial bagi PPKS

- Memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan bagi PPKS yang ingin memulai usaha kecil dan menengah (UMKM).
- Mengembangkan program inkubasi bisnis yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta untuk membantu PPKS mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan Peran Dunia Usaha dan Industri

- Mendorong kebijakan rekrutmen inklusif di perusahaan-perusahaan agar lebih banyak PPKS yang mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal.
- Memberikan insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan yang aktif mempekerjakan dan memberdayakan PPKS.

4. Memperkuat Program Pendampingan dan Monitoring

- Membentuk tim pendamping sosial yang secara aktif membantu PPKS dalam proses transisi menuju kemandirian.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan bahwa PPKS yang telah diberdayakan tetap berada dalam kondisi yang stabil dan mandiri.

5. Optimalisasi Program Bantuan Sosial Produktif

- Mengubah pola pemberian bantuan sosial dari yang bersifat konsumtif menjadi bantuan yang lebih produktif, seperti modal usaha, alat kerja, dan akses pembiayaan mikro.
- Memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang dan tidak hanya menyelesaikan masalah dalam waktu singkat.

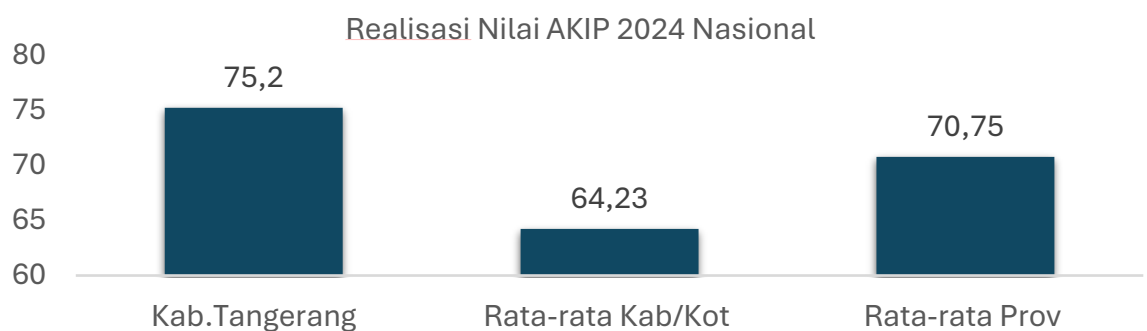
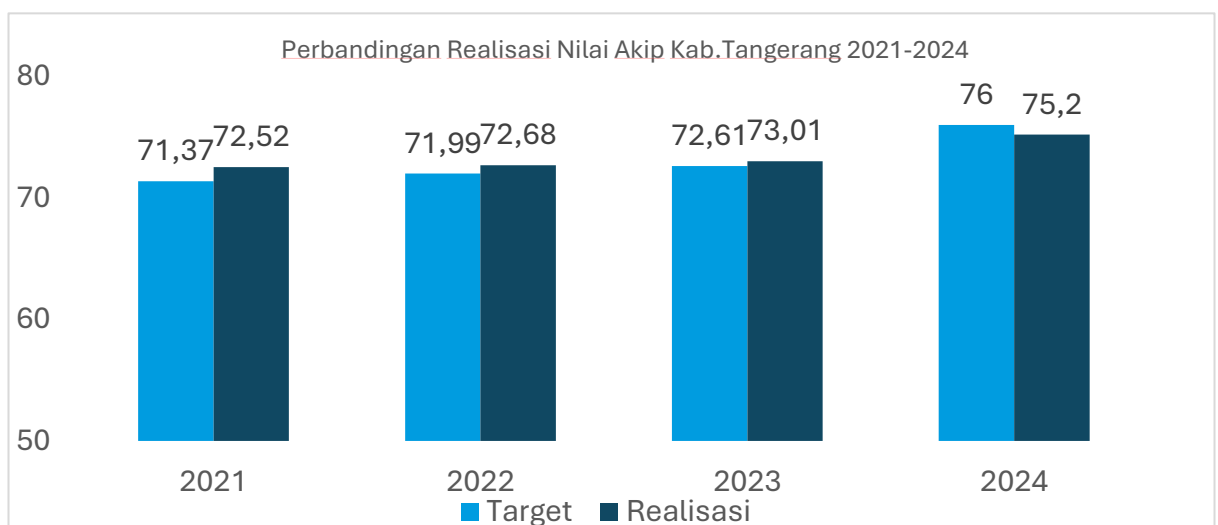
SASARAN 12

**Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintah**

NILAI SAKIP

Tabel 3.21
Nilai SAKIP Kabupaten Tangerang

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
76	75,2	98,9%	80,5



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi akip yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada setiap instansi pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Realisasi nilai SAKIP pada tahun ini mencapai 75,2, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 76. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi target, capaian kinerja masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 98,9%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ke depan, dengan target akhir RPD sebesar 80,5, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Tabel 3.22
Predikat Nilai SAKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa nilai sebesar **75.20 (sumber. KemenPANRB RI)** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik". yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit

kerja utama. namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.23
Komponen Nilai SAKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24.18	25,00
b. Pengukuran Kinerja	30	17.96	18,55
c. Pelaporan Kinerja	15	11.94	12,02
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.93	19,63
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.01	75,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan agar tujuan/sasaran strategis pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah lebih berorientasi pada hasil.
- b. Melaksanakan reviu dan perbaikan terhadap dokumen penjenjangan kinerja untuk memastikan adanya keselarasan antara misi, tujuan, sasaran kinerja, serta indikator kinerja dengan kinerja yang ada di bawahnya.
- c. Memastikan seluruh perangkat daerah mengidentifikasi keterkaitan/crosscutting kinerja dengan perangkat daerah lain dalam pohon kinerja.
- d. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tangerang dan perangkat daerah dengan menambahkan informasi mengenai definisi operasional serta formulasi perhitungan indikator kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan indikator yang bukan merupakan informasi utama dalam dokumen IKU.
- e. Memastikan seluruh perangkat daerah Kabupaten Tangerang menyampaikan informasi terkait target indikator kinerja dalam rencana aksi yang tidak

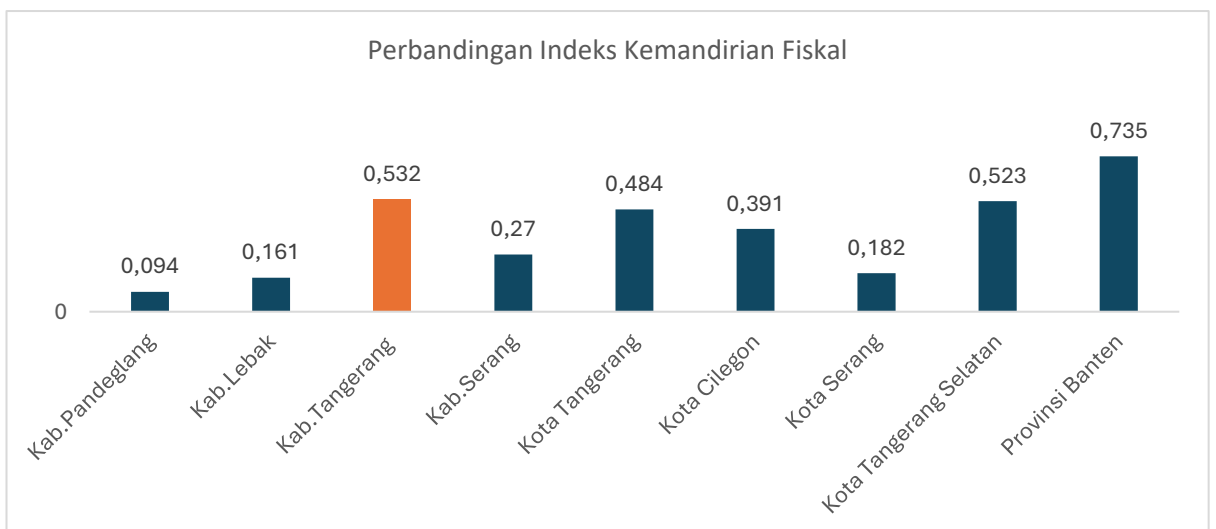
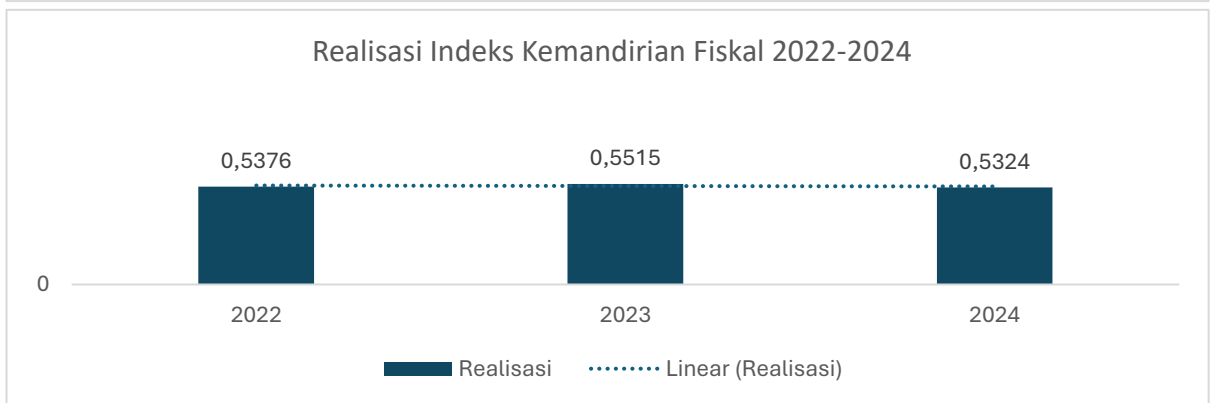
terrealisasi. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja seluruh perangkat daerah serta pemberian umpan balik (feedback) atas informasi kinerja yang disampaikan oleh perangkat daerah.

- f. Mengoptimalkan capaian kinerja individu dan organisasi sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Tangerang.
- g. Melakukan benchmarking terhadap kinerja di tingkat regional (Provinsi Banten) maupun nasional berdasarkan laporan kinerja perangkat daerah.
- h. Memanfaatkan informasi yang tersedia dalam laporan kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan kinerja, terutama informasi terkait dengan realisasi kinerja dan rekomendasi perbaikan.
- i. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki implementasi SAKIP agar terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Fokus utama adalah menurunkan nilai hasil evaluasi internal terakhir (tahun 2023) dan meningkatkan capaian nilai implementasi AKIP yang masih belum optimal.
- j. Inspektorat daerah perlu melakukan pemantauan terhadap progres tindak lanjut hasil evaluasi AKIP serta membuka layanan konsultasi bagi perangkat daerah yang mengalami kendala dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap aparat daerah guna meningkatkan implementasi SAKIP.
- k. Memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam pelaksanaan evaluasi internal dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi internal agar dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Evaluasi yang dilakukan juga harus dapat dimonitoring secara real-time.

INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL

Tabel 3.24
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,52	0,53	101%	0,53



Indeks Kemandirian Fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang disajikan, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah **0,52**, sementara realisasi yang dicapai sebesar **0,53 (Sumber: djpk.kemenkeu.go.id)**, sehingga capaian kinerja mencapai **101%**. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, target akhir dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026 juga ditetapkan di angka **0,53**, yang menunjukkan bahwa capaian saat ini telah sejalan dengan rencana jangka menengah.

Pada tahun 2024, Kabupaten Tangerang berhasil merealisasikan **Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,61 triliun**. Capaian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama didukung oleh sektor **pendapatan pajak daerah**, yang menyumbang porsi terbesar dalam PAD.

Namun, di sisi lain, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,532 atau 53,2%, yang masuk dalam kategori "Mandiri". Meskipun masih berada dalam status yang cukup baik, angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,551 (55,1%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD meningkat, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah.

Tren IKF Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif, di mana pada **tahun 2020 dan 2021 masih berada dalam kategori "Menuju Mandiri" (46%)**, kemudian mengalami peningkatan menjadi **53,7% pada 2022** dan mencapai puncaknya di **55,1% pada 2023** sebelum sedikit turun di tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi beberapa factor diantaranya :

1. **penyederhanaan tarif pajak**, yang mengakibatkan pertumbuhan pajak daerah tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, tarif pajak parkir mengalami penurunan dari **25% menjadi 10%**, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun demikian, kinerja OPD penghasil tetap menunjukkan performa yang baik dengan mencatat pertumbuhan PAD sebesar **4,9%**.

2. meningkatnya porsi pendapatan dari sumber lain, terutama dari **dana hibah sebesar Rp5,3 miliar yang diterima dari pemerintah pusat**. Meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer ini menyebabkan rasio kemandirian fiskal sedikit terdampak, meskipun secara nominal, pendapatan daerah mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan **Indeks Kemandirian Fiskal ke level "Sangat Mandiri" (IKF \geq 0,75)**, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah merancang berbagai strategi optimalisasi PAD, antara lain:

1. **Digitalisasi layanan dan sistem pembayaran pajak serta retribusi daerah**, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
2. **Penggalian potensi baru sumber pendapatan daerah**, baik dari sektor pajak maupun non-pajak, termasuk optimalisasi aset daerah dan pengembangan sektor usaha daerah.
3. **Implementasi pajak baru sesuai dengan amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)**, yakni **opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**. Pada APBD 2025, **target penerimaan dari opsen PKB ditetapkan sebesar Rp 300 miliar, sementara opsen BBNKB sebesar Rp 280 miliar**, yang diharapkan menjadi tambahan sumber PAD yang signifikan.

Tabel 3.25
Opini BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
WTP	WTP	100%	WTP

Tabel 3.26
Realisasi Opini BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024

Tahun	Opini BPK
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP
2024	WP

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Kabupaten Tangerang telah berhasil mencapai opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan **100% capaian kinerja**.

Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Keberhasilan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain:

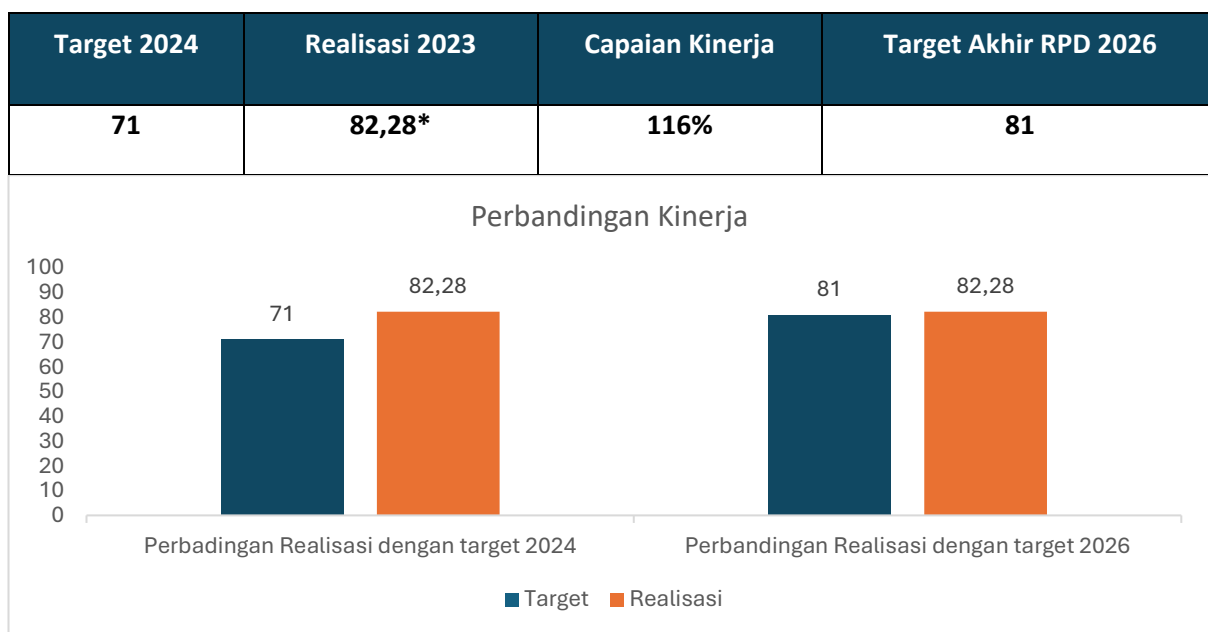
1. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:** Pemkab Tangerang secara konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan, memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh publik.

2. **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):** Dengan mengikuti SAP yang ditetapkan, Pemkab Tangerang memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku, meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan.
3. **Penguatan Sistem Pengendalian Internal:** Melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi rutin, Pemkab Tangerang memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif, meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
4. **Komitmen Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK:** Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti dengan serius, menunjukkan komitmen Pemkab Tangerang untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Tabel 3.26
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang Tahun 2024



Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting dalam mengukur kompetensi, kinerja, serta dedikasi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Profesionalisme ASN yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Tangerang telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan data terbaru, realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 mencapai **82,28**, melampaui target tahun 2024 yang hanya ditetapkan pada **71**. Capaian ini setara dengan **116% dari target**, menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam peningkatan profesionalitas ASN. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar **81**, maka realisasi tahun 2023 sudah melampaui target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah lebih cepat mencapai standar profesionalisme ASN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN yang melampaui target tidak lepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain:

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil:

1. Penghargaan bagi ASN Berprestasi: Pada tahun 2024, Pemkab Tangerang mengadakan "ASN Award" sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras ASN yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan memotivasi seluruh ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Pelantikan Jabatan Fungsional: Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kompetensi dan profesionalisme ASN, sehingga mereka dapat lebih fokus pada bidang tugasnya dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Sosialisasi Penegakan Disiplin dan Etika: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan disiplin dan etika ASN. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar profesional dan kode etik yang berlaku.
4. Pengembangan Kompetensi Pegawai: Pemerintah Kabupaten Tangerang mengembangkan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
5. Layanan Kepegawaian Berbasis Digital: BKPSDM Kabupaten Tangerang menyediakan layanan kepegawaian untuk ASN, termasuk pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, promosi jabatan, serta konsultasi dan verifikasi data kepegawaian. Layanan ini mempermudah ASN dalam mengelola karier mereka dan memastikan proses administrasi berjalan efisien.

Meskipun capaian Indeks Profesionalitas ASN telah melampaui target, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Ketimpangan Kompetensi di Beberapa OPD

- Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tingkat kompetensi ASN yang merata.
- Masih terdapat pegawai yang membutuhkan peningkatan keterampilan khusus.

2. Adaptasi terhadap Teknologi Digital

- Sebagian ASN masih mengalami kendala dalam mengadopsi teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari.
- Kurangnya pelatihan khusus terkait digitalisasi layanan pemerintahan.

3. Beban Kerja yang Tidak Merata

- Beberapa unit kerja mengalami kelebihan beban kerja, sementara unit lain memiliki beban yang lebih ringan.
- Kurangnya redistribusi pegawai untuk menyeimbangkan beban kerja antar OPD.

4. Resistensi terhadap Perubahan

- Masih terdapat ASN yang kurang adaptif terhadap perubahan kebijakan dan sistem kerja baru.
- Tantangan dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja konvensional menjadi lebih inovatif.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Kapasitas ASN Secara Merata

- Melakukan pemetaan kompetensi ASN di setiap OPD untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang spesifik.
- Menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan berbasis kebutuhan nyata di masing-masing unit kerja.

2. Percepatan Digitalisasi dalam Tata Kelola ASN

- Mengadakan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menggunakan sistem berbasis teknologi.

- Mengembangkan aplikasi terpadu untuk mempermudah akses layanan kepegawaian secara real-time.

3. Peningkatan Sistem Redistribusi Pegawai

- Melakukan analisis beban kerja untuk mendistribusikan pegawai secara lebih proporsional.
- Menempatkan ASN sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki agar lebih produktif.

4. Transformasi Budaya Kerja ASN

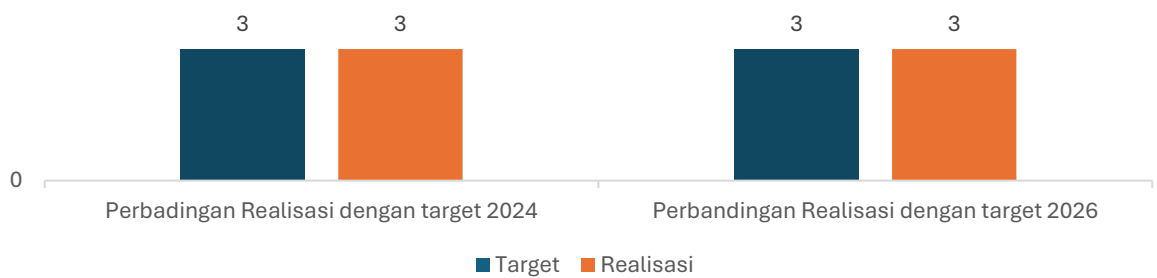
- Mengadopsi model kerja berbasis kinerja dan hasil, bukan sekadar kehadiran fisik.
- Mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan ASN dengan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

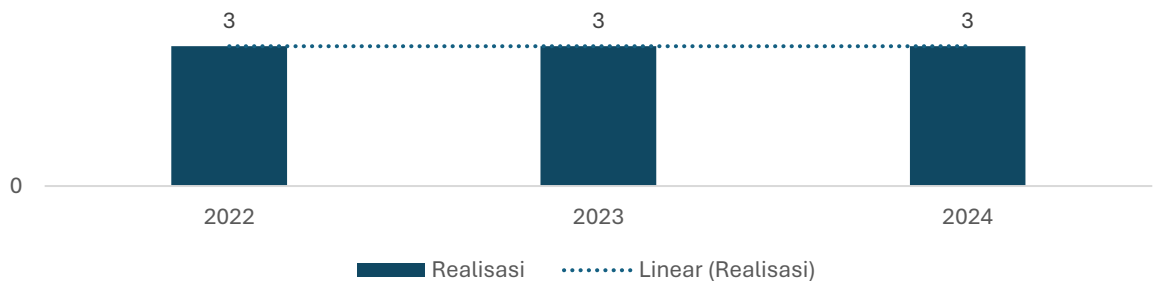
Tabel 3.27
Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3	3	100%	3

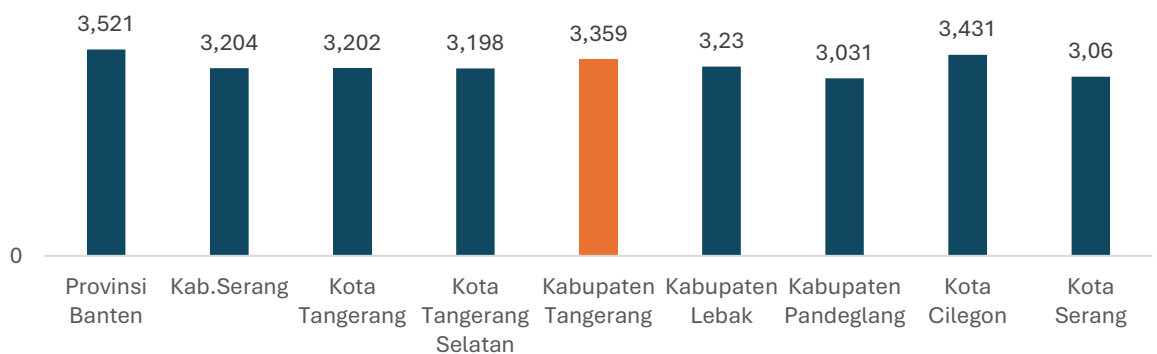
Perbandingan Kinerja



Realisasi Maturitas SPIP 2022-2024



Perbandingan Maturitas SPIP



Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024** yang dilakukan oleh **BPKP Perwakilan Banten**, capaian maturitas SPIP terintegrasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam tabel capaian kinerja, target maturitas SPIP untuk tahun 2024 adalah **level 3**, dan realisasi berdasarkan hasil evaluasi juga mencapai **level 3**. Dengan demikian, capaian kinerja berada pada angka **100%**, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Selain itu, target akhir yang ditetapkan dalam **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026** juga berada di **level 3**. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai target yang ditetapkan lebih awal, dan tantangan selanjutnya adalah mempertahankan serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal agar tetap efektif dan berkelanjutan

Capaian SPIP Terintegrasi pada level 3 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kerjanya telah relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya.

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tangerang secara umum mampu merumuskan kinerja, indikator, dan target serta menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja.
2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang, juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.
3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan Hasil penilaian menunjukkan bahwa masih adanya tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang belum berjalan secara efektif, permasalahan

dalam pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Percepatan Penurunan Stunting dan Sektor Pengembangan UMKM, sebagai berikut:

a. Sektor Penurunan Stunting

(1) Tingginya prevalensi stunting, sehingga percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang menjadi prioritas utama. Jumlah balita stunting di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 (per Juli 2024) sebanyak 17.154 3 balita, terbanyak di Provinsi Banten. Intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan misi 1 (satu) RPD 2024-2026, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan parameter keberhasilannya adalah meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat.;

(2) Pengendalian pada Sektor Percepatan Penurunan Stunting telah dilaksanakan namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan Sasaran Strategis belum berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis, dan Indikator kinerja yang belum terukur, dan belum berorientasi hasil.

b. Sektor Pengembangan UMKM

(1) Pengembangan UMKM yang berkualitas menjadi penting guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan ekonomi dengan menciptakan peluang usaha di berbagai wilayah, termasuk di daerah terpencil atau pedesaan. Oleh karena itu dukungan yang kuat terhadap UMKM melalui kebijakan, pelatihan, dan akses ke sumber daya dapat meningkatkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakat. Intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap Pengembangan UMKM sesuai dengan misi 2

(dua), yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal sesuai dengan RPD Tahun 2024-2026; dan Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah.

(2) Pengendalian pada Sektor UMKM telah dilaksanakan namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan Sasaran Strategis belum berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis.

RENCANA TINDAK LANJUT

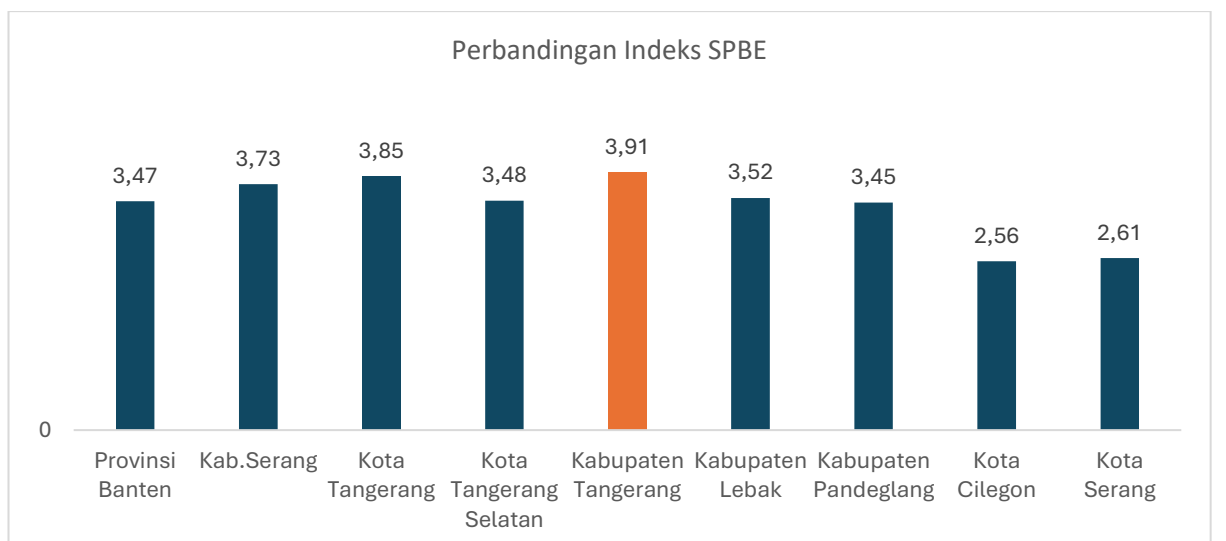
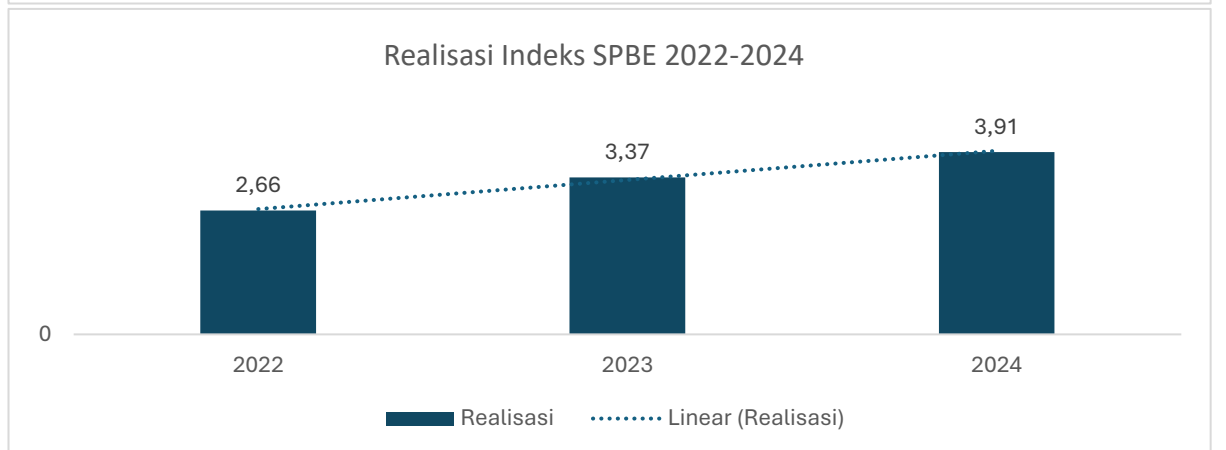
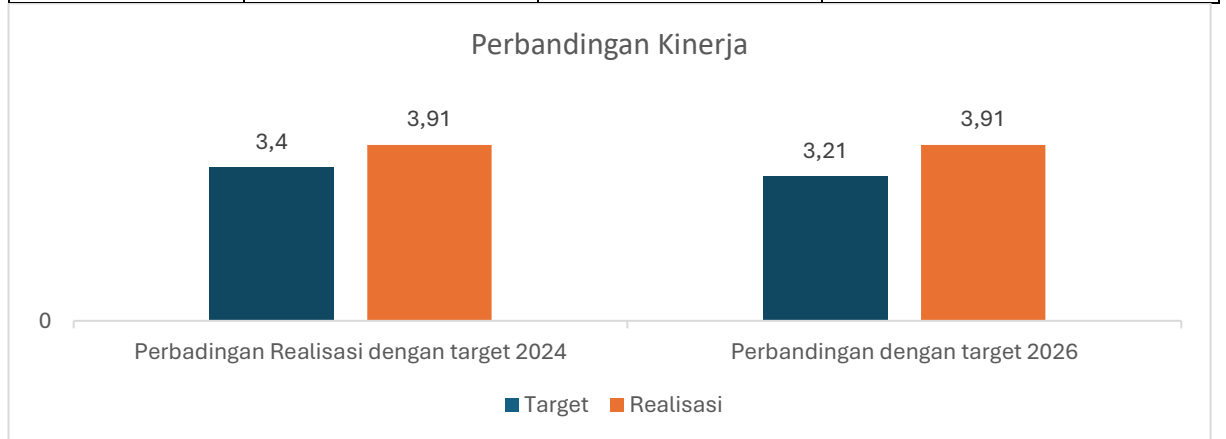
1. Melakukan perbaikan kualitas perencanaan (sasaran program dan sasaran kegiatan) masing-masing OPD dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dalam sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Menetapkan target indikator secara tepat dan baik serta memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound (SMART) dalam dokumen perencanaan;
3. Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko Indeks pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan:
 - a. Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan risk appetite, strategi anti fraud dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;
 - b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal, serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis;
 - c. Mendorong proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang, dan mendorong adanya inovasi di Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - d. Unit Kepatuhan menyusun Laporan Pemantauan Risiko triwulanan.
4. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:

- a. Melakukan identifikasi risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama untuk menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian pada seluruh OPD;
- b. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan anti korupsi yang telah dilakukan secara formal dan terjadwa
- c. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

INDEKS SPBE

Tabel 3.28
Indeks SPBE Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,4	3,91	115%	3,21



Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif berdasarkan evaluasi dari **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)**. Realisasi indeks SPBE pada tahun ini mencapai angka 3,91, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,4. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa strategi dan kebijakan digitalisasi yang diterapkan telah berjalan dengan baik, serta adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2024 dilakukan berdasarkan instrumen yang diatur dalam **Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020** tentang **Pemantauan dan Evaluasi SPBE**. Hasil pemantauan tersebut kemudian dituangkan dalam **Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024** tentang **Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023**.

Adapun rincian capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Komponen Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,91
Domain Kebijakan SPBE	3,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,50
Domain Tata Kelola SPBE	3,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,75
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

Faktor pendukung ketercapaian kinerja indeks SPBE :

1. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit dan Tim Koordinasi SPBE.
2. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Perencanaan strategis SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE dan Dokumen Proses Bisnis.
3. Secara keseluruhan penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya SOP pembangunan aplikasi yang sesuai SDLC dan di konsultasikan dengan Kominfo. Juga dengan sudah digunakannya Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan oleh seluruh unit kerja.
4. Secara keseluruhan penerapan aspek Penyelenggara SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Tim Kordinasi yang telah melaksanakan semua rencana kegiatannya dan dilakukannya kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja.
5. Secara keseluruhan penerapan Manajemen SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan dilaksanakannya penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan yang dilakukan berdasar peta rencana SPBE.
6. Secara keseluruhan pelaksanaan Audit TIK yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE.

7. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.
8. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, JDIH, dan tiga layanan Publik Sektor.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kedua nya belum secara lengkap menyebutkan muatan-muatan yang seharusnya ada pada isi kebijakan internal.
2. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dimana belum seluruh unit kerja belanja TIK nya telah dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum lengkapnya dormasi untuk 6 bidang kompetensi, dan Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan yang belum dimanfaatkan untuk seluruh unit kerja.
4. Pelaksanaan Audit Keamanan yang belum dilakukan oleh BSSN.

RENCANA TINDAK LANJUT

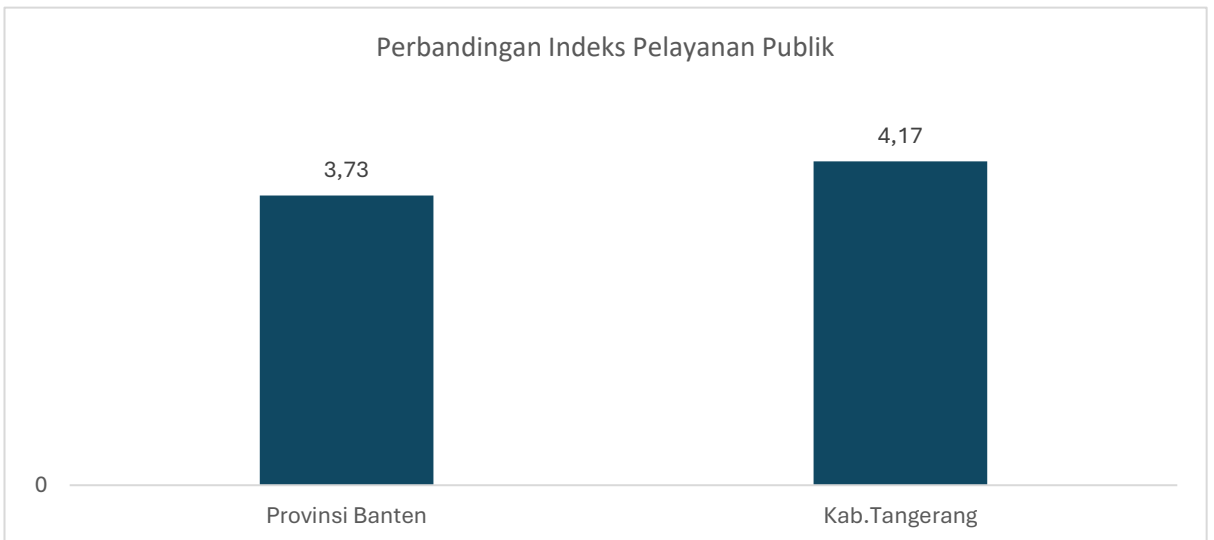
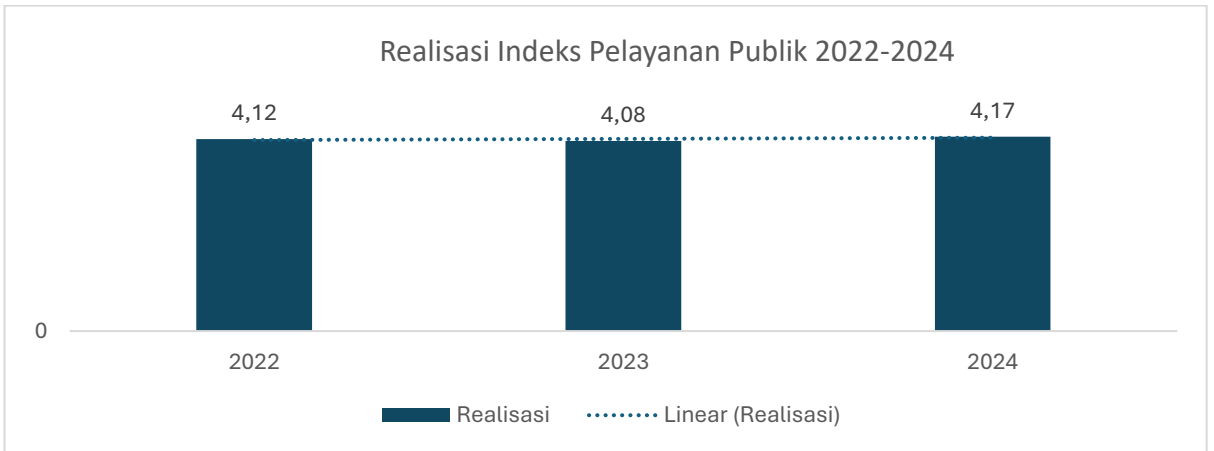
1. Perlu dilakukan pembaharuan Perda SPBE yang mencakup secara lengkap muatan yang diperlukan, sehingga beberapa nilai yang belum bernilai 3 akan ada di nilai standar 3 sekaligus beberapa nilai lain dapat masuk pada nilai 5. Dengan catatan, sebelumnya telah dilakukan review per indikator untuk indikator yang sudah bernilai 3.
2. Perlu dilakukan pendokumentasian secara lengkap saat adanya konsultasi anggaran semua unit kerja kepada dinas Kominfo. Sebaiknya terdapat dokumen resmi yang didalamnya terdapat persetujuan Dinas Kominfo untuk anggaran TIK.

3. Pembuatan SOP atau pedoman untuk pelaksanaan Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan. Sehingga apa yang dilaksanakan sudah berdasar pada pedoman.
4. Pengajuan Audit Keamanan kepada BSSN
5. Evaluasi aplikasi, penambahan fitur dalam aplikasi Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Tabel 3.30
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
4,2	4,17	99,5%	4,4



Berdasarkan tabel Indeks Pelayanan Publik tahun 2024, realisasi yang dicapai adalah 4,17 (**Sumber: KemenPAN RB**) dari target yang ditetapkan sebesar 4,2. Dengan capaian kinerja sebesar 99,5%, terlihat bahwa pencapaian ini hampir mendekati target, meskipun terdapat sedikit selisih.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan

Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.

2. Profesionalisme SDM

Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.

4. Inovasi Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana

instansi pemerintah mampu mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.

5. Kepuasan Pengguna Layanan

Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan sering digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Faktor keberhasilan capaian kinerja :

1. Meningkatkan Kecepatan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kabupaten Tangerang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan responsivitas terhadap masukan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan dan konsultasi.

2. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah meluncurkan **80 aplikasi inovasi daerah** yang dirancang untuk mempermudah pelayanan publik. Peluncuran ini melibatkan 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mencakup berbagai sektor pelayanan.

3. Peningkatan Konsultasi dan Pengaduan

Kabupaten Tangerang telah mengadopsi **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)** sebagai platform utama untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Platform ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui berbagai kanal, termasuk situs web resmi dan aplikasi mobile. Implementasi SP4N-LAPOR! di Kabupaten Tangerang telah diakui secara nasional dan dijadikan sebagai **pilot project** oleh pemerintah pusat, menunjukkan efektivitasnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

4. Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan antara lain:

PETIS (Pengaduan, Kritik, Konsultasi, dan Saran): Inovasi dari Puskesmas Salemban Jaya yang menyediakan kanal komunikasi daring melalui WhatsApp,

Instagram, dan email, memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan konsultasi.

Saturday Services: Program pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Kecamatan Kelapa Dua, dirancang untuk masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen selama hari kerja.

5. Penguatan Profesionalisme SDM dalam Pelayanan

Informasi spesifik mengenai program peningkatan profesionalisme SDM belum ditemukan dalam sumber yang tersedia. Namun, dengan berbagai inovasi dan peningkatan layanan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah diambil oleh Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi rekomendasi yang telah diberikan.

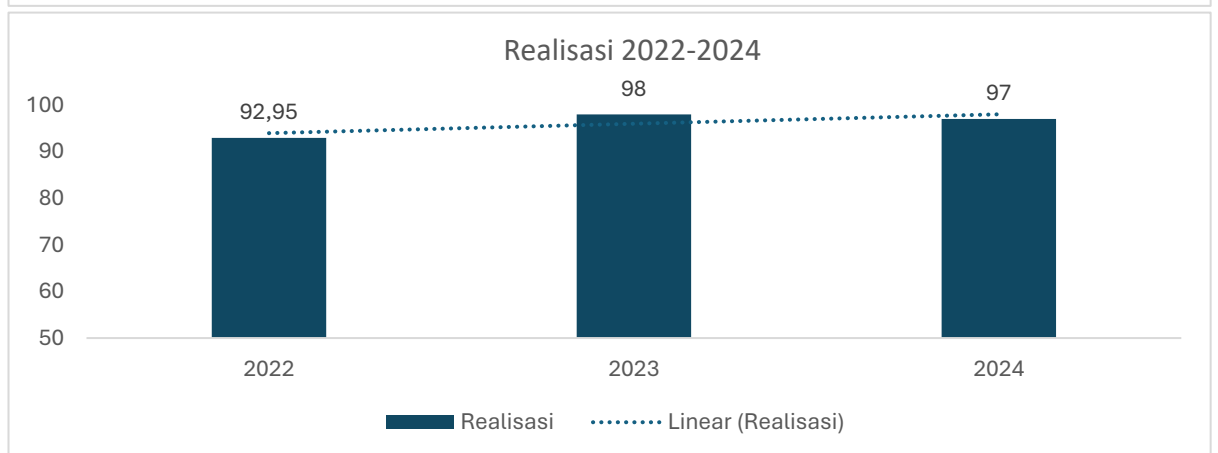
SASARAN 13

Meningkatkan Pemerataan dan
Kualittas Infrastruktur

PRESENTASE INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK

Tabel 3.31
Presentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
98%	97%	99%	95,5%



Capaian kinerja infrastruktur dalam kondisi baik merupakan salah satu indikator utama dalam memastikan layanan publik yang optimal. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 98%, dengan realisasi mencapai 97%. Meskipun terdapat sedikit selisih dari target awal, kinerja yang dicapai tetap menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur. Bahkan, capaian kinerja mencapai 99%, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mempertahankan infrastruktur dalam kondisi layak guna. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 terjadi penurunan kinerja sebesar 2%. Adapun rinciannya sebagai berikut : Dari

12.893 gedung dan bangunan, 12.506 nya dalam kondisi baik, sementara dari 207 rusak ringan dan 180 lainnya rusak berat.

Adapun penetapan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 ditetapkan sebesar 95,5%. Penyesuaian target ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, meningkatnya biaya perbaikan, serta tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Selain itu, banyaknya infrastruktur yang telah berusia tua membutuhkan perhatian lebih dalam rehabilitasi, yang tidak hanya memerlukan anggaran besar tetapi juga perencanaan teknis yang lebih matang.

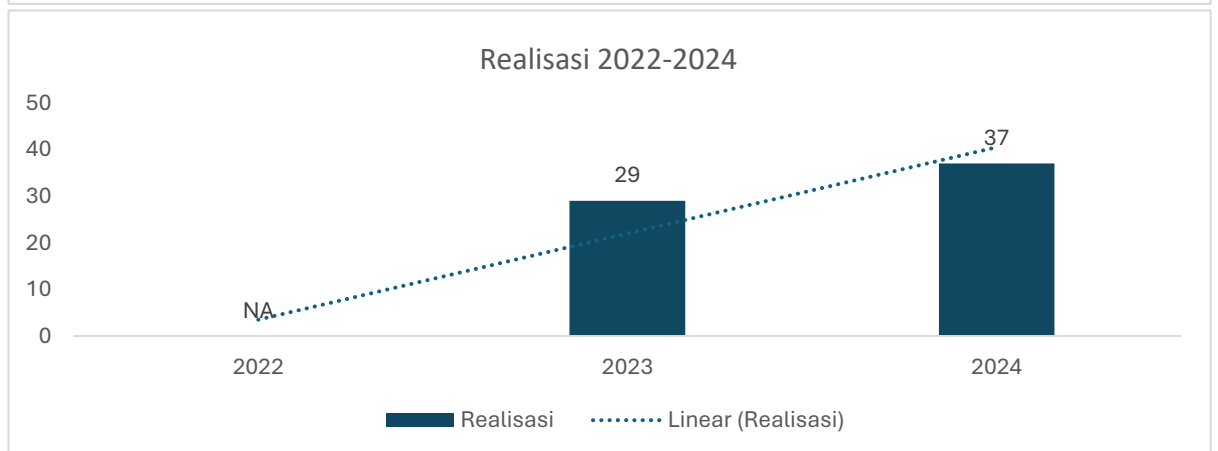
Dalam upaya memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pemeliharaan berkala, optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan infrastruktur dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PRESENTASE REALISASI POLA PEMANFAATAN RUANG SESUAI RTRW

Tabel 3.32

Presentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
37%	37%	100%	55%



Pada tahun 2024, persentase realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mencapai **37%**, sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai **29,02%**. Namun, masih terdapat tantangan dalam penataan ruang, terutama terkait indikasi pelanggaran pola ruang yang masih cukup tinggi.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari total kawasan lindung RTRW seluas **2.774 hektar**, hanya **805 hektar (29,02%)** yang sesuai dengan RTRW, sementara

1.969 hektar mengalami indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Pada tahun 2024, luas kawasan yang sesuai dengan RTRW meningkat menjadi **1.026,38 hektar (37%)**, sedangkan luas area dengan indikasi pelanggaran menurun menjadi **1.747,62 hektar**.

Capaian ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengelola pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun mengalami peningkatan, terdapat beberapa kendala dalam realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW, di antaranya:

1. **Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**

- Masih terdapat indikasi pelanggaran sebesar **1.747,62 hektar** pada tahun 2024, yang mencakup pembangunan rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dan pengembang dalam mematuhi RTRW.

2. **Kurangnya Kapasitas Pengawasan**

- Keterbatasan jumlah personel dan teknologi dalam melakukan pengawasan tata ruang di lapangan.
- Masih ada tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pembangunan dan perlindungan lingkungan.

3. **Tantangan dalam Rehabilitasi Kawasan yang Sudah Terdampak**

- Upaya pemulihan kawasan yang sudah mengalami pelanggaran membutuhkan anggaran dan kebijakan yang lebih terintegrasi.
- Perlu adanya langkah konkret dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

- Mengoptimalkan teknologi pemantauan seperti sistem informasi geospasial untuk mendeteksi pelanggaran tata ruang secara lebih cepat dan akurat.

- Menerapkan sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang untuk mencegah pembangunan ilegal di kawasan lindung.
2. **Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antar Instansi**
- Memastikan aturan RTRW lebih ketat dan tidak mudah diubah untuk kepentingan tertentu.
 - Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta masyarakat dalam menjaga tata ruang yang berkelanjutan.
3. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Publik**
- Melakukan kampanye masif terkait pentingnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
 - Memberdayakan masyarakat lokal dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tata ruang.
4. **Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan**
- Mendorong pembangunan yang berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembang yang patuh terhadap RTRW.

RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN YANG LAYAK

Tabel 3.33

Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan Dan Pemakaman Yang Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,9439	0,9453	100,1%	0,9442



Kawasan permukiman yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak melalui berbagai program pembangunan dan penataan kawasan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja hingga tahun 2024 serta membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.

Target rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak pada tahun 2024 ditetapkan sebesar **0,9439**. Realisasi hingga tahun 2024 mencapai **0,9453**, yang berarti melampaui target dengan capaian kinerja **100,1%**. Target akhir RPD 2026 sebesar **0,9442**, yang berarti realisasi saat ini sudah lebih tinggi dari target jangka panjang.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih baik dari proyeksi tahun 2026.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan kawasan kumuh tahun 2024, luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai **167 Ha**, sehingga luas kawasan permukiman layak meningkat menjadi **90.713,65 Ha**.

Tahun 2023, luas kawasan permukiman layak tercatat sebesar **90.546,65 Ha**. Tahun 2024, luas tersebut bertambah menjadi **90.713,65 Ha**. Artinya, terjadi peningkatan luas kawasan layak sebesar **167 Ha** dalam satu tahun terakhir.

Dari total luas Kabupaten Tangerang sebesar **95.961 Ha**, luas kawasan permukiman layak kini mencapai hampir **94,6%** dari total luas wilayah.

Meskipun capaian kinerja cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- **Kawasan kumuh yang belum tertangani sepenuhnya:** Masih terdapat sisa kawasan kumuh yang belum mendapat intervensi optimal.
- **Tingkat urbanisasi yang tinggi:** Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian layak yang lebih besar.
- **Keterbatasan anggaran:** Kebutuhan infrastruktur perumahan memerlukan dana yang besar, sementara alokasi anggaran masih terbatas.
- **Pelanggaran RTRW:** Masih ditemukan pelanggaran tata ruang yang berakibat pada ketidaksesuaian pola pemanfaatan lahan.

RENCANA TINDAK LANJUT

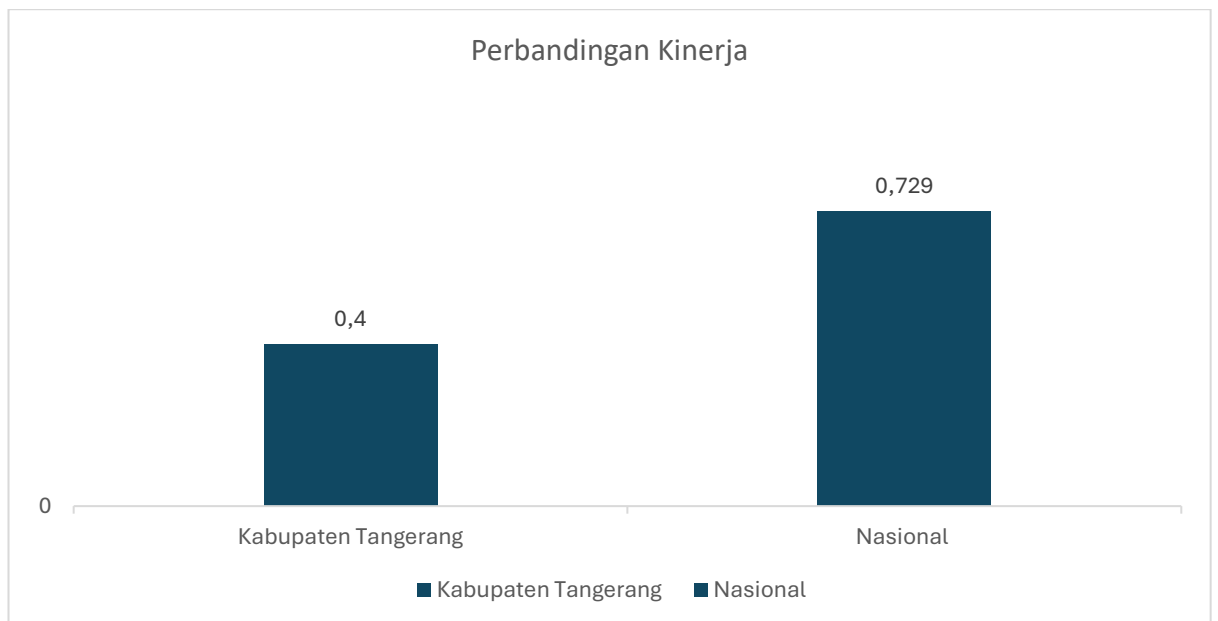
1. **Optimalisasi Program Rehabilitasi Kawasan Kumuh:** Peningkatan alokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi.
2. **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran RTRW:** Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pembangunan tidak sesuai tata ruang.
3. **Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Perumahan Layak:** Mendorong investasi sektor swasta untuk membangun hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. **Penyediaan Infrastruktur Berbasis Smart City:** Memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan tata kota dan pemantauan perkembangan kawasan permukiman.

5. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Sosialisasi pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan permukiman.

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

Tabel 3.34
Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.79	0.4	50.6%	0.83



Berdasarkan data ketercapaian Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang, realisasi tahun 2024 menunjukkan angka 0.4, yang lebih rendah dibandingkan target 0.79. Capaian kinerja hanya 50.6%, menandakan bahwa target jauh dari pencapaian optimal. Sementara itu, target akhir RPD 2026 ditetapkan sebesar 0.83, menunjukkan gap yang jauh antara target dengan capaian realisasi yang ada. Hal ini dibabkan

karena perhitungan ratio konektivitas dihitung dengan pertimbangan dua komponen utama yaitu :

$$\text{Rasio Konektivitas} = (\text{IK1} \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot Angkutan Sungai})$$

Keterangan :

A. IK1 (angkutan jalan) :

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek angkutan pedesaan;
- Jumlah kebutuhan trayek adalah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek angkutan pedesaan dalam kurun waktu tertentu.

B. IK2 (angkutan sungai, danau, dan penyebrangan)

- Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi adalah lintas perintis ditambah lintasan komersil;
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

C. Rasio konektivitas dari angkutan sungai (persentase infrastruktur angkutan air yang tersedia dibandingkan kebutuhan ideal).

D. Bobot Angkutan Jalan adalah Proporsi angkutan jalan dalam sistem transportasi (biasanya lebih besar di daerah yang bergantung pada transportasi darat).

E. Bobot Angkutan Sungai adalah Proporsi angkutan sungai dalam sistem transportasi (biasanya lebih kecil atau nol jika tidak tersedia).

Karena metode angkutan sungai tidak dimungkinkan di Kabupaten Tangerang, maka nilai IK2 dan bobot angkutan sungai menjadi nol, sehingga perhitungan rasio konektivitas hanya bergantung pada angkutan jalan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan sinkronisasi dengan rencana induk jaringan transportasi di Jabodetabek
2. Pembangunan dan perbaikan jalan utama serta jalan penghubung antar-kecamatan.

3. Peningkatan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan. Dengan cara Optimalisasi Transportasi Umum
4. Penguatan jaringan angkutan umum berbasis jalan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi atau TOD;
5. Integrasi sistem transportasi agar lebih efisien, dengan cara Penggunaan Teknologi untuk Manajemen Lalu Lintas
6. Sistem smart traffic management untuk mengurangi bottleneck di titik rawan kemacetan.

Karena angkutan sungai tidak dapat digunakan, fokus utama harus pada pengembangan jaringan jalan dan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Kabupaten Tangerang.

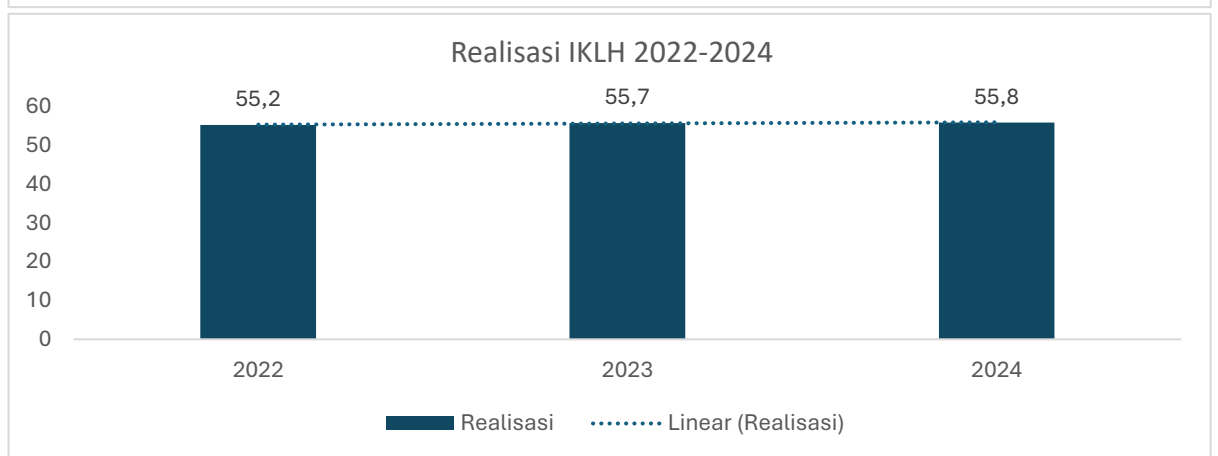
SASARAN 14

Meningkatkan Kualitas Hidup
yang Sehat dan Tangguh
Terhadap Bencana

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.35
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
56,25	55,87	99,3%	56,89



IKLH Kabupaten Tangerang dihitung dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari data hasil pemantauan kualitas air sungai di empat DAS utama (Cimanceuri, Cirarab, Cisadane, dan Cidurian), data hasil pemantauan kualitas udara di empat lokasi yang berbeda (transportasi, industri, permukiman/perumahan, dan perkantoran), dan data luas tutupan lahan. Berikut hasil perhitungan masing-masing indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2024:

- Indeks Kualitas Air (IKA) = 55,69
- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 73,33

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 23,86

Hasil perhitungan masing-masing indeks kemudian digunakan untuk menghitung IKLH berdasarkan data yang sudah terverifikasi oleh KLH, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{IKLH Kab. Tangerang} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\ &= (0,376 \times 55,69) + (0,405 \times 73,33) + (0,219 \times 23,86) \\ &= 55,87 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 adalah sebesar 55,87. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Nilai IKLH di Kabupaten Tangerang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, nilai IKLH sempat mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021 nilainya kembali menurun dan pada tahun 2022 kembali meningkat. Meskipun demikian, nilai IKLH setelah tahun 2019 selalu melampaui target, namun pada tahun 2023 nilai IKLH mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

IKLH Kabupaten Tangerang dihitung dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari data hasil pemantauan kualitas air sungai di empat DAS utama (Cimanceuri, Cirarab, Cisadane, dan Cidurian), data hasil pemantauan kualitas udara di empat lokasi yang berbeda (transportasi, industri, permukiman/perumahan, dan perkantoran), dan data luas tutupan lahan. Berikut hasil perhitungan masing-masing indeks:

- Indeks Kualitas Air (IKA) = 55,69
- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 73,33
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 23,86

Secara keseluruhan menurunnya capaian IKLH Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terjadi peningkatan kegiatan lalu lintas kendaraan dan aktivitas industri, sehingga kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan (pemenuhan baku mutu kualitas air/udara) serta peningkatan aktivitas masyarakat atau domestik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penilaian pada IKA, IKU, IKTL maka dapat dirumuskan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang direkomendasikan disesuaikan dengan nilai masing-masing komponen IKLH. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga nilai IKLH di Kabupaten Tangerang diharapkan akan selalu mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut rekomendasi umum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKTL antara lain:

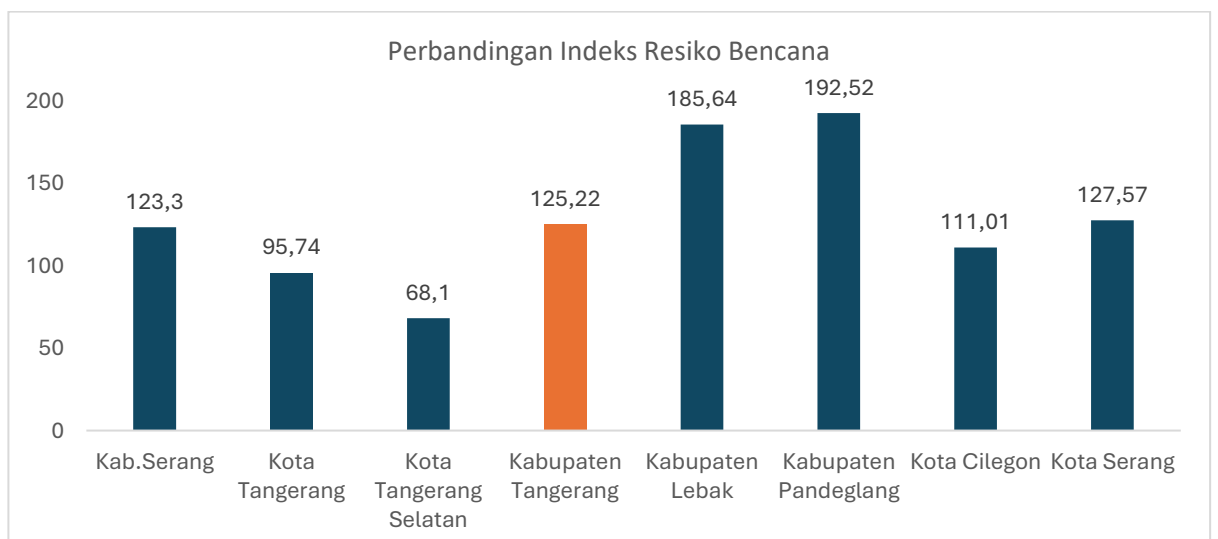
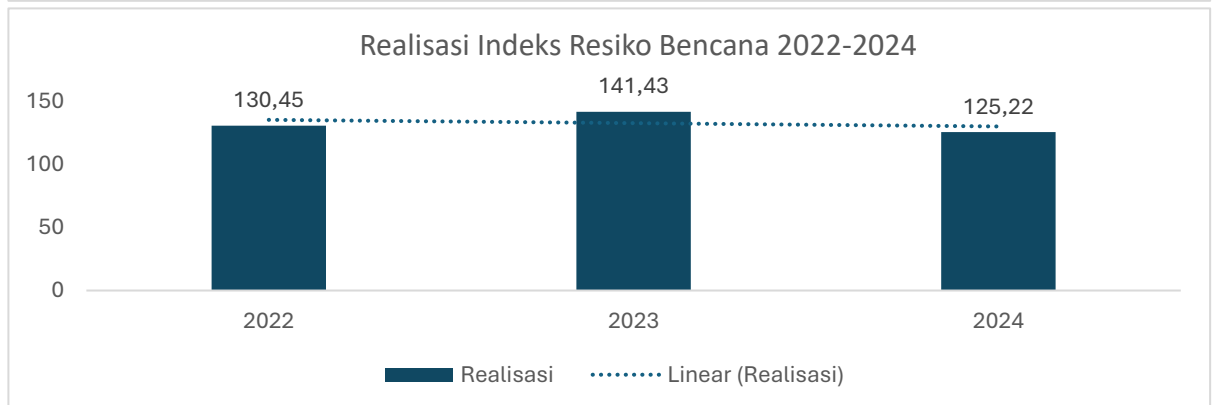
- 1) Kebijakan dan Peraturan
 - a. Mendorong indikator IKA, IKU, dan IKTL masuk ke dalam dokumen RPJMD terbaru;
 - b. Mendorong penyusunan peraturan terkait pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan di Kabupaten Tangerang;
- 2) Struktur dan Pengembangan Kompetensi
 - a. Melakukan pelatihan kepada pegawai di lingkup Kabupaten Tangerang tentang pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, dan pengendalian kerusakan lahan
- 3) Perencanaan Kegiatan
 - a. Melakukan penambahan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, dan pengendalian kerusakan lahan
- 4) Implementasi
 - a. Menetapkan target IKA, IKU, dan IKTL dalam peraturan/dokumen perencanaan daerah
 - b. Melakukan pemantauan pemenuhan data/informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, industry dan jasa terkait pemenuhan baku mutu air
 - c. Melakukan pemantauan kualitas air secara rutin
 - d. Melakukan penambahan titik pemantauan kualitas air di badan air
 - e. Melakukan pendataan penggunaan IPAL domestik maupun industri (USK)
 - f. Melakukan pemantauan pemenuhan data/informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, industry dan jasa terkait pemenuhan baku mutu air f
 - g. Melakukan pemantauan kualitas air secara rutin
 - h. Melakukan penambahan titik pemantauan kualitas air di badan air

- i. Melakukan pemantauan pemenuhan data/informasi dan sosialisasi kepada industri dan jasa terkait pemenuhan baku mutu emisi
 - j. Melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin
 - k. Melakukan penambahan titik pemantauan kualitas udara di Kawasan peruntukan (pemukiman, industri/kawasan industri, perkantoran, dan transportasi)
 - l. Melakukan pengumpulan data/informasi
 - m. Melakukan pemantauan IKTL melalui penyusunan capaian IKLH setiap tahun
- 5) Pelibatan Pemangku Kepentingan
- a. Mengumpulkan data/informasi terkait pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lahan di Kab Tangerang
 - b. Melakukan kembali program pembangunan IPAL, MCK dan Tangki Septik untuk pengurangan pencemaran air dari limbah domestic di seluruh wilayah Kab Tangerang
 - c. Melakukan kembali program CFD, uji KIR, uji emisi di Kab Tangerang
- 6) Publikasi
- a. Mengumpulkan data/informasi terkait penyerbarluasan informasi Kualitas air, udara, dan tutupan lahan dari media lokal di Kab Tangerang
- 7) Inovasi
- a. Melakukan kembali program SRASI di Kab Tangerang
 - b. Melakukan kembali program penanaman pohon di Kab Tangerang
 - c. Melakukan kembali program Urban Aqua Culture di lokasi lain di Kab Tangerang

INDEKS RESIKO BENCANA

Tabel 3.35
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
120	125,22	95,8%	115



Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2024, target IRBI ditetapkan sebesar 120, namun realisasi menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 125,22 (sumber, buku IRBI Tahun 2024, BNPB). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko bencana yang terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kejadian bencana, tingkat kerentanan masyarakat, atau belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Adapun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Meskipun demikian, capaian kinerja yang tercatat sebesar 95,8 menunjukkan bahwa berbagai langkah penanggulangan dan pengurangan risiko telah dilakukan secara efektif. Namun, untuk memastikan penurunan risiko yang lebih signifikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026 sebesar 115. Target ini mencerminkan komitmen dalam menurunkan tingkat risiko bencana melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas mitigasi, penguatan infrastruktur tahan bencana, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

Beberapa hambatan yang menyebabkan ketidaktercapaian target IRBI antara lain:

1. Peningkatan Ancaman Bencana

- Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan kejadian bencana, seperti banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan.
 - Dampak perubahan iklim memperburuk kondisi cuaca ekstrem dan mengintensifkan frekuensi serta skala bencana.
2. Peningkatan Kerentanan Masyarakat
- Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.
 - Tata ruang yang belum optimal dalam mengakomodasi prinsip mitigasi bencana, seperti alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman dan industri.
 - Ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, seperti sistem drainase, air bersih, dan layanan kesehatan, yang memperbesar dampak bencana.
- a. Kurangnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti edukasi mitigasi, simulasi bencana, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), belum berjalan optimal.
 - Keterbatasan sumber daya dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, sehingga respon terhadap kejadian bencana masih rendah.
 - Kesiapan kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek koordinasi dan pengelolaan data kebencanaan.
- b. Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana.
- Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurangan kerentanan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk infrastruktur, edukasi, serta kesiapsiagaan.
 - Dana yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk penanganan darurat bencana, dibandingkan dengan investasi pada upaya pencegahan dan mitigasi jangka panjang.

- Keterbatasan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pendanaan serta implementasi program mitigasi bencana.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat resiko bencana Kabupaten Tangerang, dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana

- Memperluas program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dengan edukasi, pelatihan, dan simulasi berkala.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi lokal dalam sistem peringatan dini dan respons cepat bencana.
- Menyediakan media informasi kebencanaan berbasis digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peringatan dini.

Optimalisasi Tata Kelola dan Infrastruktur Pengurangan Risiko

- Memperbaiki sistem drainase, tanggul, dan kawasan resapan air untuk mengurangi risiko banjir.
- Menyusun regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana.
- Meningkatkan sinergi dengan lembaga terkait seperti BPBD, BNPB, BMKG, dan akademisi dalam perencanaan mitigasi berbasis data dan kajian risiko.

III. REALISASI KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS

Pada aspek anggaran secara umum program yang dilaksanakan untuk mencapai 14 sasaran strategis pada tahun 2024 telah cukup baik. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1	SASARAN 1.1 MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	834.301.765.278	809.568.490.381	97,04
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	459.714.850,00	383.238.100,00	83,36
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	99.991.000,00	92.845.000,00	92,85
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	252.284.600,00	224.886.000,00	89,14
5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.394.820.530,00	3.301.451.730,00	97,25
2	SASARAN 1.2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN			
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	313.015.189.342,00	304.574.788.710,00	97,30
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	11.864.998.310,00	11.682.044.540,00	98,46

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
	DAYA MANUSIA KESEHATAN			
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	778.206.260,00	760.187.780,00	97,68
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.634.116.040.541,00	1.489.008.610.866,00	99,23
3	SASARAN 1.3. MENINGKATKAN DAYA SAING PEMUDA			
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.639.362.280,00	4.602.527.780,00	99,21
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	36.083.304.475,89	35.760.451.400,00	99,11
4	SASARAN 1.4 MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN			
12	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.898.572.260,00	1.857.202.059,00	97,82
13	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	724.289.030,00	690.540.530,00	95,34
14	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	394.318.910,00	393.083.110,00	99,69
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	35.956.400,00	35.846.800,00	99,7
16	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	664.864.760,00	661.503.560,00	99,49
17	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	925.146.790,00	897.777.700,00	97,04
5	SASARAN 1.5 MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENDUDUK			

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
18	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.249.362.400,00	1.193.675.300,00	95,54
19	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	16.028.388.424,00	15.718.028.315,00	98,06
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	15.217.215.000,00	15.143.623.500,00	99,52
6	SASARAN 2.1 MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF, AMAN, DAM TERTIB			
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.466.432.736,00	16.663.341.926,00	95,4
22	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	11.318.089.898,00	11.065.325.413,00	97,77
23	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	86.868.763.166,00	85.438.636.964,00	98,35
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMAYARAKATAN	1.220.422.400,00	1.086.446.400,00	89,02
25	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAY	2.642.030.000,00	2.354.811.000,00	89,13

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
26	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.842.280.840,00	3.285.323.200,00	85,5
7	SASARAN 2.1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEKTOR UNGGULAN			
27	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	253.985.580,00	252.600.900,00	99,45
28	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	111.529.790,00	111.234.100,00	99,73
29	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	150.229.630,00	149.388.300,00	99,44
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	930.767.700,00	857.928.600,00	92,17
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.159.914.000,00	2.009.472.100,00	93,03
32	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.320.543.336,00	7.894.294.463,00	94,88
33	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3.125.205.280,00	2.825.939.380,00	90,42
34	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	502.112.300,00	487.212.500,00	97,03
35	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.229.570,00	1.224.031.550,00	96,82
36	PROGRAM PELAYANANAN PENANAMAN MODAL	1.464.340.950,00	1.260.421.060,00	86,07

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
37	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	728.826.640,00	698.246.430,00	95,8
38	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.760.402.000,00	4.336.041.360,00	91,09
39	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.744.201.020,00	5.576.641.100,00	97,08
40	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.372.574.881,00	3.334.130.155,00	98,86
41	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	399.777.650,00	356.815.050,00	89,25
42	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.617.999.600,00	1.594.126.100,00	98,52
43	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISTA DAN EKONOMI KREATIF	65.027.030,00	64.964.800,00	99,9
44	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.351.418.350,00	7.136.012.490,00	97,07
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	86.770.500,00	82.975.000,00	95,63
46	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6.566.805.582,00	6.186.261.840,00	94,21
47	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	56.330.480,00	54.250.480,00	96,31
48	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.075.135.620,00	1.060.203.850,00	98,61

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
49	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	448.838.650,00	432.696.406,00	96,4
50	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	54.346.640,00	53.313.100,00	98,1
51	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.064.897.400,00	4.046.284.500,00	99,54
52	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	112.709.000,00	110.943.800,00	98,43
53	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.539.827.530,00	1.475.369.760,00	95,81
54	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.251.344.000,00	1.140.844.264,00	91,17
55	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	305.537.470,00	265.292.070,00	86,83
56	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.713.397.390,00	1.551.728.690,00	90,56
57	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.086.236.480,00	2.071.005.540,00	99,27
8	SASARAN 2.2 MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA			
58	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.524.001.640,00	9.175.256.992,00	87,18
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	42.294.983.842,00	41.422.425.930,00	97,94
60	PROGRAM PENATAAN DESA	2.039.982.750,00	1.949.462.750,00	95,56

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
61	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	919.548.750,00	914.568.750,00	99,46
9	SASARAN 2.3 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN			
62	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	648.957.400,00	557.635.500,00	85,93
63	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.443.427.060,00	3.224.856.120,00	93,65
64	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	895.295.330,00	844.272.730,00	94,3
65	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	144.178.500,00	137.230.000,00	95,18
10	SASARAN 2.4 MENINGKATKAN DAYA SAING TENAGA KERJA			
66	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	194.932.900,00	161.222.360,00	82,71
67	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	13.614.588.186,00	12.496.991.650,00	91,79
68	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.960.318.480,00	3.559.297.780,00	89,87
69	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.291.805.630,00	3.056.317.940,00	92,85
70	PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN	22.911.580,00	20.369.580,00	88,91
11	SASARAN 2.5 MENINGKATNYA CAKUPAN PENANGANAN PPKS			
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	960.253.200,00	928.261.000,00	96,67

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
72	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.506.500,00	2.618.500,00	27,54
73	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.433.703.500,00	1.413.358.200,00	98,58
74	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	45.887.126.501,00	45.142.703.100,00	98,38
75	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	710.489.800,00	673.891.100,00	94,85
12	SASARAN 3.1 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH			
76	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.283.809.150,00	1.145.230.300,00	89,21
77	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87
78	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.222.565.745,00	1.108.181.695,00	90,64
79	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880,00	49.418.800,00	98,84
80	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11.944.781.100,00	11.696.222.452,00	97,92
81	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	55.190.913.780,00	54.978.379.140,00	99,61
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.488.331.340,00	1.421.609.140,00	95,52
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	17.107.902.710,00	16.511.335.760,00	96,51
84	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.135.312.810,00	1.064.738.000,00	93,78

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
85	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	656.481.480,00	622.463.680,00	94,82
86	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	66.329.858.040,00	64.902.723.314,00	97,85
87	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.454.710.300,00	3.990.823.200,00	89,59
88	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.987.198.726,00	40.838.462.810,00	86,91
89	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.249.285.842,00	5.850.351.920,00	93,62
90	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.270.626.430,00	12.387.267.530,00	93,34
91	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	918.689.880.061,00	895.206.835.326,00	97,44
92	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.984.447.465,00	14.300.116.146,00	95,43
93	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.847.535.700,00	10.723.263.370,00	90,51
94	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.523.743.830,00	6.705.166.687,00	89,12
95	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.024.952.840,00	3.927.529.700,00	97,58
96	PROGRAM PENELITIAN DAN	5.592.912.100,00	5.171.215.900,00	92,46

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
	PENGEMBANGAN DAERAH			
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.380.526.462,00	10.166.785.100,00	89,33
98	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.142.499.900,00	4.564.938.600,00	88,77
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.372.507.081,00	334.945.611.633,00	99,58
100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.678.714.691,00	87.977.706.820,00	99,21
101	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.462.429.496,00	7.349.159.649,00	98,48
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.315.538.030,00	8.190.288.692,00	98,49
103	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.369.925.320,00	5.289.584.352,00	98,50
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.408.830.863.853,11	2.336.314.499.238,00	96,99
13	SASARAN 4.1 MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR			
105	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	130.556.360.720,00	125.606.089.589,00	96,21
106	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.466.392.600,00	4.479.208.163,00	81,94

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
107	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	40.318.904.767,00	39.861.336.619,00	98,87
108	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	55.641.046.708,00	52.907.645.531,00	95,09
109	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	112.253.365.907,00	110.944.689.322,00	98,83
110	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	250.060.500.753,00	233.876.468.433,00	93,53
111	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	21.434.134.220,00	19.833.930.800,00	92,53
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	348.470.407.864,00	339.319.347.761,00	97,37
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.434.328.401,00	5.226.505.270,00	81,23
114	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.382.218.750,00	1.371.587.950,00	99,23
115	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	30.735.570.800,00	30.607.037.000,00	99,58
116	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	181.632.034.066,00	175.555.303.251,00	96,65
117	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	301.586.185,00	283.370.698,00	93,96
118	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	423.914.116.344,00	405.168.053.125,00	95,58
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	90.542.253.445,00	86.168.864.034,00	95,17
14	SASARAN 4.2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH TERHADAP BENCANA			

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
120	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.601.915.000,00	1.460.615.600,00	91,18
121	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13.975.362.600,00	13.731.238.200,00	98,25
122	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.408.876.500,00	1.354.151.750,00	96,12
123	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	584.678.710,00	570.891.410,00	97,64
124	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.310.262.063,00	5.205.995.806,00	98,04
125	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	353.174.100,00	281.174.100,00	79,61
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	578.463.500,00	572.103.500,00	98,9
127	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	437.789.000,00	432.591.300,00	98,81
128	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	18.051.622.855,00	17.560.123.245,00	97,28

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALIASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
129	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	97.367.410.906,00	93.862.660.995,00	96,4
JUMLAH ANGGARAN		9.092.893.599.225,00	8.714.754.421.629,00	95,84

IV. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,69	0,68	98,55	838.508.576.258,00	813.570.911.211,00	97,03	1,55
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,78	0,851	109,10	1.959.774.434.453,00	1.806.025.631.896,00	92,15	10,45
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks pembangunan Pemuda	52	52,13*	100,3	40.722.666.755,00	40.362.979.180,00	99,12	1,18
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	64	63,84*	99,75	4.643.148.150,00	4.535.953.759,00	97,69	2,06

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3	1,25	104	32.494.965.824,00	32.055.327.115,00	98,65	5.15
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	2,14	1	214	123.358.019.040,00	119.893.884.903,00	97,19	54,58
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	2	-0,28	-714	61.685.262.049,00	58.700.669.738,00	95,16	-
		Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	5,12	-11,5	-224,61				
		Persentase Daya saing produk unggulan lokal	22,73	28,83	126,84				
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3,41	2,6	76,25				
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks desa membangun	0,76	0,78	102,63	55.778.516.982,00	53.461.714.422,00	95,85	6.75

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	77,5	77,6	100,13	5.131.858.290,00	4.763.994.350,00	92,83	7.29
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,85	65,88	97,10	21.061.645.196,00	19.273.829.730,00	91,51	5,76
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang berdaya	1,44	1,48	102,78	49.001.079.501,00	48.160.831.900,00	98,29	4.37
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip	76	75,2	98,95	4.061.897.737.382,11	3.947.687.340.393,00	97,19	8,79
		Nilai indeks kemandirian fiskal	0,52	0,53	101,92				
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP				
		Indeks profesionalitas ASN	71	82,28	115,89				
		Maturitas SPIP terintegrasi	3	3	100,00				
		Indeks SPBE	3,4	3,91	115,00				
		Indeks Pelayanan publik	4,2	4,17	99,29				
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	98	97	98,98	1.699.143.221.530,00	1.631.209.437.546,00	96,00	-9,79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
		Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	37	37	100,00				
		Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	0,9439	0,9453	100,15				
		Rasio konektivitas kabupaten	0,79	0,4	50,63				
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,25	55,87	99,32	139.669.555.234,00	135.031.545.906,00	96,68	5,06
		Indeks resiko bencana (IRBI)	120	125,22	104,35				

Berdasar tabel diatas dari 14 sasaran terdapat 12 sasaran yang efisien, dan 2 sasaran yang tidak efisien. Sasaran yang tidak efisien dapat disebabkan oleh :

1. Penganggaran Program yang kurang mendukung pada capaian target Indikator kinerja;
2. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi program;

3. Kurang selarasnya Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Rencana Tindaklanjut :

1. **Perencanaan yang Terintegrasi** – Menyusun dokumen perencanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra.
2. **Efisiensi Penganggaran** – Mengalokasikan anggaran sesuai target indikator kinerja (money follow function).
3. **Evaluasi dan Monitoring Berkala** – Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan pencapaian target.
4. **Optimalisasi Sumber Daya** – Memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien (value for money).
5. **Peningkatan SDM** – Memberikan pelatihan terkait perencanaan, penganggaran, dan analisis kinerja.
6. **Koordinasi Lintas Sektor** – Memastikan sinergi antar unit dalam penyusunan dan pelaksanaan program.
7. **Fleksibilitas dan Adaptasi** – Menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi dan perubahan faktor eksternal.



**KABUPATEN
TANGERANG**

BAB IV PENUTUP

LKIP

TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja yang tertuang dalam PK tahun 2024 Kabupaten Tangerang. Secara umum, pada tahun 2024 Kabupaten Tangerang telah mencapai target kinerja. Dari 27 indikator kinerja utama, 15 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan memenuhi capaian $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, 12 indikator belum memenuhi target yang diperjanjikan.

LAMPIRAN

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	
	2024	
Kab Pandeglang		7,16
Kab Lebak		6,61
Kab Tangerang		9,06
Kab Serang		7,88
Kota Tangerang		11,14
Kota Cilegon		10,39
Kota Serang		8,93
Kota Tangerang Selatan		11,86
Provinsi Banten		9,23

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	13,72	13,73	13,74
Kab Lebak	12,09	12,10	12,11
Kab Tangerang	12,85	12,87	12,88
Kab Serang	12,78	12,86	12,87
Kota Tangerang	13,88	13,89	13,90
Kota Cilegon	13,20	13,21	13,23
Kota Serang	12,81	12,82	12,83
Kota Tangerang Selatan	14,67	14,68	14,70
Provinsi Banten	13,05	13,09	13,10

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	7,11	7,13	7,15
Kab Lebak	6,41	6,59	6,60
Kab Tangerang	8,61	8,92	8,93
Kab Serang	7,51	7,78	7,79
Kota Tangerang	10,83	10,84	10,91
Kota Cilegon	10,08	10,34	10,38
Kota Serang	8,89	8,90	8,91
Kota Tangerang Selatan	11,82	11,84	11,85
Provinsi Banten	8,93	9,13	9,15

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	73,10	73,22	73,63
Kab Lebak	72,93	73,04	73,43
Kab Tangerang	74,56	74,59	74,91
Kab Serang	73,70	73,81	74,22
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51
Kota Serang	74,43	74,54	74,84
Kota Tangerang Selatan	75,16	75,16	75,40
Provinsi Banten	74,12	74,17	74,46

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	
	2023	2024
Kab Pandeglang	74,01	74,22
Kab Lebak	73,80	73,99
Kab Tangerang	75,18	75,34
Kab Serang	74,62	74,91
Kota Tangerang	75,30	75,50
Kota Cilegon	74,81	75,03
Kota Serang	75,13	75,31
Kota Tangerang Selatan	75,64	75,80
Provinsi Banten	74,77	74,97

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten	
	2023	
Kab Pandeglang	65,22	
Kab Lebak	60,08	
Kab Tangerang	63,84	
Kab Serang	61,91	
Kota Tangerang	63,02	
Kota Cilegon	52,16	
Kota Serang	62,98	
Kota Tangerang Selatan	72,36	
Provinsi Banten	69,87	

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)	
	2023	2024
Kab Pandeglang	1,13	1,10
Kab Lebak	1,22	1,18
Kab Tangerang	1,30	1,25
Kab Serang	1,32	1,28
Kota Tangerang	1,05	0,95
Kota Cilegon	1,29	1,25
Kota Serang	1,64	1,61
Kota Tangerang Selatan	0,99	0,88
Provinsi Banten	1,22	1,16



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Jl. KH. Sarbini No. 1 Telp. (021) 5993545 Fax. (021) 5993561
TIGARAKSA – TANGERANG

KODE POS 15720

NOTA DINAS

Kepada : Yth. P1t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
 Dari : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
 Tanggal : Senin, 3 Februari 2025
 Perihal : Laporan Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang Triwulan IV.

Berdasarkan data realisasi investasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 31 Januari 2025, Pencapaian realisasi investasi Kabupaten Tangerang periode Oktober – Desember (Triwulan IV) Tahun 2024 mencapai Rp. 7.4 triliun. Angka ini meningkat 7,9% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada Triwulan IV Tahun 2023, yang mencapai Rp 6,8 triliun. Namun, secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang Januari–Desember Tahun 2024 hanya mencapai Rp 26,2 triliun, turun 11,5% dibandingkan Tahun 2023 yang mencatatkan Rp 29,6 triliun. Namun, Pencapaian realisasi Investasi tahun 2024 sebesar 26,2 triliun ini melebihi target 110,8% dari target 23,7 triliun yang ditetapkan oleh Renstra Pemerintah Daerah.

Capaian Bidang kemitraan dan Promosi

No	Kegiatan	Jumlah
1	pameran bandara 2024	63
2	Festival AIAMjd	23
3	Festival kuliner Sepatan	40
4	Festival Mauk	27
5	Pameran Dekranasda Solo	6
6	Pameran Apkasi	46
7	Pameran Indoma	33
8	Pameran Hut RI	95
9	Tangexpo	90
10	Food Festival	60
11	Digital Marketing 1	50
12	Digital Marketing	120
13	Fasilitas Kemitraan	50
Total		703

Produk ke luar daerah (Tujuan IKU)

1	Pameran Dekranasda Solo	6
2	Pameran Apkasi	46
3	Pameran Indoma	33
4	IKN Expo	33
5	Pameran Hari UMKM Nasional	40
6	Pameran Produk Unggulan 2024 yang bertempat di Mall Discover	15
Total		173

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2024

KABUPATEN TANGERANG

No	Destinasi	Januari		Februari		Maret		April		Mai		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		KET
		WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	WISATA	WISAMA	
1	Aria Residences Paramount Serpong	3.880	120	3.852	120	4.250	98	4.125	106	4.128	115	4.150	17	4.000	23	4.011	21	4.015	25	4.045	32	4.060	28	4.079	15	
2	ARA/Vega Hotel Gading Serpong***	3.568	40	3.520	35	3.625	30	3.640	32	3.650	35	3.665	37	3.660	19	3.652	12	3.720	15	3.750	17	3.765	18	3.780	15	
3	LEMO HOTEL	4.879	88	4.765	20	4.780	50	4.821	52	4.825	60	4.840	60	4.873	41	4.865	45	4.725	40	4.810	35	4.825	37	4.857	30	
4	HOTEL JHE SOLITAIRE INDONESIA	5.469	100	5.220	150	5.350	0	5.425	100	5.428	112	5.428	112	5.410	81	5.421	75	5.478	78	5.378	55	5.390	65	5.410	55	
5	Fame Hotel	2.980	35	2.920	30	3.010	25	3.015	18	3.025	20	3.040	25	3.040	11	3.012	13	3.056	13	3.078	20	3.090	25	3.098	17	
6	Arya Duta Hotel Lippo Village	5.350	1.245	5.360	1.250	5.568	1.380	5.672	1.392	5.678	1.402	5.680	1.410	5.691	720	5.699	502	5.716	525	5.754	570	5.764	575	5.790	590	
7	Hotel Yasmin Anugerah Lestari	1.560	20	1.540	15	1.568	20	1.725	15	1.740	10	1.755	12	1.760	6	1.742	9	1.821	15	2.079	20	2.110	11	2.231	20	
8	Hotel Episode Gading Serpong	4.887	142	4.950	138	5.020	142	5.115	150	5.130	155	5.235	168	5.225	100	5.321	110	5.368	122	5.398	97	5.410	75	5.440	78	
9	HOTEL "GRAND HERITAGE BSD CITY"***	1.677	22	1.550	15	1.620	17	1.645	20	1.652	15	1.658	17	1.658	10	1.617	15	1.654	20	1.660	15	1.678	18	1.787	21	
10	TRAVEL "SMART VACATIONS"	2.138	0	2.139	0	2.145	0	2.163	0	2.165	0	2.169	0	2.160	0	2.131	0	2.120	0	2.095	0	1.980	0	1.975	0	
11	TOUR & TRAVEL "MADINA PRIMA INDONESIA"	1.853	0	1.863	0	1.877	0	1.882	0	1.885	0	1.892	0	1.877	0	1.867	0	1.862	0	1.900	0	1.915	0	1.895	0	
12	TOUR & TRAVEL "PRAMBANAN"	2.136	0	2.140	0	2.149	0	2.156	0	2.160	0	2.169	0	2.155	0	1.995	0	1.980	0	1.780	0	1.735	0	1.996	0	
13	TOUR & TRAVEL (MEDANG)	1.742	0	1.753	0	1.763	0	1.773	0	1.775	0	1.752	0	1.741	0	1.745	0	1.755	0	1.723	0	1.711	0	1.852	0	
14	TOUR & TRAVEL (CHUMI)	1.885	0	1.890	0	1.889	0	1.912	0	1.912	0	1.889	0	1.880	0	1.887	0	1.880	0	1.735	0	1.722	0	1.822	0	
15	TOUR & TRAVEL "CASVA"	1.245	0	1.252	0	1.245	0	1.256	0	1.258	0	1.266	0	1.230	0	1.238	0	1.234	0	1.200	0	1.211	0	1.225	0	
16	TOUR & TRAVEL (SAMPORA)	1.320	0	1.328	0	1.342	0	1.353	0	1.359	0	1.359	0	1.310	0	1.300	0	1.310	0	1.050	0	1.063	0	1.150	0	
17	PWS TOUR & TRAVEL	1.309	0	1.319	0	1.326	0	1.335	0	1.330	0	1.330	0	1.328	0	1.321	0	1.333	0	1.318	0	1.294	0	1.324	0	
18	TAKANA TOUR & TRAVEL	1.230	0	1.237	0	1.243	0	1.332	0	1.320	0	1.320	0	1.328	0	1.335	0	1.319	0	1.110	0	987	0	1.050	0	

19	Restoran Warung Sunda	1796	5	1.793	5	1.802	0	1.811	0	1.705	0	1.711	0	1.721	0	1.736	0	1.745	0	1.756	0	1.762	0	1.810	0
20	Starlet Hotel	1.986	0	1.999	11	1.991	5	2.006	0	2.010	0	2.020	2	2.025	5	2.010	5	2.015	9	2.035	0	2.042	0	2.100	0
21	Restoran Blues Stok	2.450	26	2.455	20	2.555	13	2.575	16	2.577	10	2.581	0	2.570	2	2.577	6	2.537	10	2.600	20	2.455	0	2.465	0
22	Qubika Hotel	2.373	20	2.385	29	2.380	5	2.390	9	2.395	7	2.399	10	2.391	12	2.380	18	2.392	11	2.430	10	2.439	14	2.455	8
23	Water World Citra Raya	8.190	25	8.209	13	8.223	15	8.230	18	8.240	10	8.246	0	8.255	0	8.261	0	8.281	0	8.330	0	7.959	5	8.211	5
24	Hotel Sahid Mutiara***	1.500	85	1.535	95	1.565	100	1.587	120	1.595	80	1.600	85	1.606	75	1.620	79	1.620	85	1.630	90	1.635	93	1.700	110
25	Hotel Binong	1.100	95	1.150	100	1.175	110	1.190	115	1.200	90	1.205	80	1.215	75	1.220	78	1.237	85	1.243	90	1.248	85	1.300	100
26	Hotel Anugrah Inn	500	50	565	75	585	80	600	85	650	95	655	100	640	80	645	75	660	80	665	85	668	87	710	100
27	Hotel Ibis Gading Serpong***	5.500	100	5.535	115	5.575	120	5.595	130	5.625	145	5.630	150	5.640	130	5.645	125	5.650	130	5.655	135	5.660	93	6.010	150
28	HOTEL SAPPHIRE SKY	6.500	75	6.545	95	6.575	100	6.589	115	6.595	125	6.615	135	6.620	120	6.625	125	6.640	135	6.650	145	6.658	148	6.850	170
29	HOKBEN SUPERMALL KARAWACI	15.085	120	15.110	115	17.550	135	17.575	140	17.595	150	17.625	165	17.615	150	17.620	155	17.638	165	17.645	170	17.649	173	17.850	200
30	Ramsayana Sabar Subur	4.500	0	4.575	0	6.500	0	6.535	0	6.575	0	6.605	0	6.620	0	6.625	0	6.625	0	6.630	0	6.635	0	6.710	0
31	Restoran Templebar	870	115	900	120	1.200	145	1.315	150	1.335	155	1.350	165	1.355	150	1.360	125	1.375	130	1.385	150	1.387	169	1.420	0
32	Restoran Saku Food City Sumarecon	6.750	75	6.785	85	8.505	100	8.515	105	8.530	115	8.545	125	8.550	150	8.555	115	8.569	127	8.575	130	8.578	135	8.850	150
33	Restoran Kitchenette Sumarecon	4.750	65	4.778	70	6.575	100	6.587	115	6.598	130	6.615	145	6.620	135	6.625	140	6.635	150	6.640	155	6.644	158	6.870	170
34	Restoran Eastern Sumarecon	5.880	110	5.905	115	7.510	135	7.525	145	7.545	155	7.570	170	7.575	180	7.580	150	7.595	160	7.605	165	7.610	168	7.830	180
35	Food Court Taman Sari Sumarecon	12.505	95	12.525	90	15.775	120	15.797	140	15.805	150	15.825	165	15.830	150	15.835	145	15.840	155	15.850	165	15.855	169	16.010	180
36	Pizza Hut Sumarecon	16.750	100	16.775	120	18.850	135	18.875	150	18.895	165	18.915	175	18.920	165	18.925	155	18.945	175	18.955	179	18.959	183	19.050	200
37	Richene Factory Cikupa	20.450	0	20.560	0	20.560	0	20.590	0	20.700	0	20.800	0	20.920	0	21.050	0	21.180	0	21.185	0	21.230	0	21.390	0
38	Pizza Hut Citra Raya	22.550	0	22.650	0	22.650	0	22.700	0	22.800	0	22.900	0	23.015	0	23.180	0	23.180	0	23.180	0	23.180	0	23.480	0

39	TEKKO CIKUPA	14.500	0	14.650	0	14.650	0	14.700	0	14.820	0	14.970	0	15.045	0	15.200	0	15.290	0	15.320	0	15.390	0	15.500	0	
40	HOKBEN CITRA RAYA	20.590	0	20.650	0	20.650	0	20.790	0	20.905	0	20.985	0	21.030	0	21.170	0	21.210	0	21.300	0	21.400	0	21.500	0	
41	STARBUCKS COFFEE	13.450	0	13.600	0	13.600	0	13.750	0	13.870	0	13.980	0	14.050	0	14.200	0	14.250	0	14.320	0	14.450	0	14.580	0	
42	KEDAI ZIMPEL	4.030	0	4.200	0	4.200	0	4.320	0	4.380	0	4.450	0	4.750	0	4.820	0	4.890	0	4.920	0	5.160	0	5.300	0	
43	ZIZOBA RESTO DAN CAFFE	6.075	0	6.150	0	6.150	0	6.210	0	6.470	0	6.580	0	6.630	0	6.790	0	6.830	0	6.900	0	7.120	0	7.310	0	
44	Gubuk Mang Engking	8.640	0	8.700	0	8.700	0	8.850	0	8.950	0	9.020	0	9.150	0	9.180	0	9.210	0	9.290	0	9.320	0	9.400	0	
45	Solaris Citra Raya	17.480	0	17.586	0	17.586	0	17.740	0	17.820	0	17.980	0	18.020	0	18.110	0	18.200	0	18.220	0	18.310	0	18.490	0	
46	Burger Bangor Citra Raya	2.220	0	2.340	0	2.450	0	2.420	0	2.500	0	2.625	0	2.700	0	2.870	0	2.895	0	2.920	0	3.140	0	3.290	0	
47	KERAMAT SOLEAR	5.770	0	5.800	0	5.800	0	5.970	0	6.010	0	6.050	0	6.120	0	6.300	0	6.380	0	6.400	0	6.500	0	6.640	0	
48	TEBING KIDIA	1.117	0	1.102	0	1.094	0	1.102	0	800	0	807	0	783	0	795	0	710	0	620	0	628	0	524	0	
49	DANAU CIBRU CIGARU CISKA	1.012	0	1.024	0	300	0	660	0	663	0	670	0	595	0	700	0	717	0	700	0	712	0	718	0	
50	Pantai Pulau Cangkir	2.934	0	2.947	0	2.147	0	2.168	0	2.152	0	2.155	0	2.161	0	2.195	0	2.200	0	2.210	0	2.215	0	2.310	0	
51	Pantai Tanjung Kait	2.734	0	2.748	0	2.211	0	2.245	0	2.248	0	2.250	0	2.259	0	2.265	0	2.275	0	2.108	0	2.115	0	2.128	0	
52	Amaris Hotel by Sentika**	3.442	11	3.450	0	3.438	0	3.442	0	3.440	0	3.445	0	3.452	0	3.459	0	3.320	0	2.879	0	2.884	0	2.864	0	
53	Pantai Tanjung Pasir	9.677	0	8.680	0	8.120	0	8.134	0	8.105	0	8.111	0	8.121	0	8.118	0	7.990	0	7.532	0	7.652	0	7.758	0	
54	Pantai Muara/Taman Mangrove	2.999	0	3.010	0	2.880	0	2.889	0	2.890	0	2.810	0	2.821	0	2.828	0	2.831	0	2.430	0	2.520	0	2.650	0	
55	Sumarecon Mall Serpong	1.120.400	0	960.780	0	997.800	0	102.540	0	102.540	0	102.602	0	102.800	25	102.715	29	102.884	0	102.992	0	102.998	0	103.107	0	
56	Mall Aeon	766.345	0	724.520	0	898.687	0	910.254	0	910.325	0	910.500	0	910.600	15	910.610	23	910.780	0	989.162	0	910.987	0	911.275	0	
57	Super Mall Lippo Karawaci	962.340	0	944.572	0	987.620	0	995.460	0	994.750	0	988.721	0	988.780	13	988.761	15	988.972	0	910.976	0	989.202	0	989.780	0	
58	SDC Building	110.760	0	105.524	0	125.450	0	125.780	0	12.500	0	12.565	0	12.600	5	12.613	8	10.255	0	10.260	0	10.245	0	8.950	0	
		3.267.608		3.088.375		3.913.324		2.618.276		2.816.790		2.811.622		2.862.060		2.883.991		2.862.086		2.861.896		2.883.251		2.887.256		30.862.990

10

Search:

ODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB/KOTA	NAMA KABUPATEN	TIPE	TAHUN	IKP	PERINGKAT KAB/KOTA	KELOMPOK IKP
	Banten	3601	Pandeglang	Kabupaten	2024	75.63	329	5
	Banten	3602	Lebak	Kabupaten	2024	72.76	368	5
	Banten	3603	Tangerang	Kabupaten	2024	77.60	290	6
	Banten	3604	Serang	Kabupaten	2024	81.39	196	6
	Banten	3671	Kota Tangerang	Kota	2024	85.92	96	6
	Banten	3672	Kota Cilegon	Kota	2024	80.12	236	6
	Banten	3673	Kota Serang	Kota	2024	71.95	375	6
	Banten	3674	Kota Tangerang Selatan	Kota	2024	88.67	45	6

- k. Telah menyusun pohon kinerja (*logical framework*) penanganan kemiskinan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting (CSF) penyebab kemiskinan di Kabupaten Tangerang, serta memetakan strategi (taktikal), dan aktivitas (operasional) yang secara logis dapat menyelesaikan penyebab kemiskinan di Kabupaten Tangerang;
- l. Kabupaten Tangerang telah memanfaatkan pohon kinerja untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat sesuai pohon kinerja dan mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Tangerang yang memadai untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- m. Telah melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dengan nama dan alamat yang tepat serta memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar SKPK dengan melibatkan peran serta masyarakat terkait.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi *outcome* serta masih terdapat indikator kinerja yang belum relevan dalam mengukur ketercapaian sasaran kinerja;
- b. Masih terdapat pohon kinerja level perangkat daerah yang belum mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan perangkat daerah lain (*crosscutting* kinerja);
- c. Masih terdapat perangkat daerah yang tidak menggunakan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa nilai sebesar **75,20** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

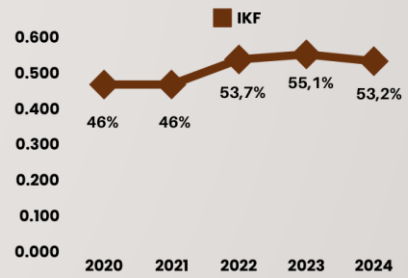
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	24,18	25,00
2. Pengukuran Kinerja	30	17,96	18,55
3. Pelaporan Kinerja	15	11,94	12,02
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,93	19,63
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,01	75,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

PERKEMBANGAN INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH KAB. TANGERANG

TAHUN	INDEKS KEMANDIRIAN	KETERANGAN
2020	0,4666	MENUJU MANDIRI
2021	0,4667	MENUJU MANDIRI
2022	0,5376	MANDIRI
2023	0,5515	MANDIRI
2024*	0,5324	MANDIRI

*2024 unaudited



Keterangan

URAIAN	INDEKS KEMANDIRIAN
Sangat Mandiri	(IKF \geq 0,75)
Mandiri	(0,50 \leq IKF < 0,75)
Menuju Kemandirian	(0,25 \leq IKF < 0,50)
Belum Mandiri	(IKF < 0,25)

Pemerintah Kab. Tangerang	PNS	9.465	21,02	34,72	24,94	5,00	85,68	Tinggi
	PPPK	4.124	24,92	19,87	24,68	5,00	74,48	Sedang
	ASN	13.589	22,20	30,21	24,86	5,00	82,28	Tinggi
Pemerintah Kota Bandung	PNS	11.410	21,50	32,96	24,72	5,00	84,18	Tinggi
	PPPK	2.833	24,99	19,85	24,76	5,00	74,60	Sedang
	ASN	14.243	22,19	30,35	24,73	5,00	82,27	Tinggi
Pemerintah Kota Serang	PNS	3.534	21,68	30,61	25,70	5,00	82,99	Tinggi
	PPPK	461	24,97	20,43	25,35	5,00	75,75	Sedang
	ASN	3.995	22,06	29,44	25,66	5,00	82,15	Tinggi
Pemerintah Kota	PNS	2.947	21,76	31,64	24,99	5,00	83,39	Tinggi
	PPPK	545	24,97	19,63	24,54	5,00	74,15	Sedang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
114.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,32	4,75	4,59	4,22	A-
115.	Kabupaten Bojonegoro	4,04	4,77	3,83	4,21	A-
116.	Kabupaten Kayong Utara	3,90	4,31	4,43	4,21	A-
117.	Kabupaten Nias Utara	4,13	4,31	4,2	4,21	A-
118.	Kabupaten Bone Bolango	3,53	4,52	4,57	4,21	A-
119.	Kabupaten Probolinggo	4,29	3,67	4,65	4,20	A-
120.	Kabupaten Bulungan	4,24	4,20	4,17	4,20	A-
121.	Kabupaten Konawe	4,17	4,53	3,91	4,20	A-
122.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,98	4,03	4,57	4,19	A-
123.	Kabupaten Bantul	4,36	4,1	4,09	4,18	A-
124.	Kabupaten Kubu Raya	3,57	4,34	4,63	4,18	A-
125.	Kabupaten Bireuen	4,30	4,11	4,12	4,18	A-
126.	Kabupaten Rokan Hulu	4,23	4,15	4,15	4,18	A-
127.	Kabupaten Boalemo	3,61	4,34	4,57	4,17	A-
128.	Kabupaten Tangerang	4,37	4,21	3,93	4,17	A-
129.	Kabupaten Klungkung	3,77	4,48	4,22	4,16	A-
130.	Kabupaten Pandeglang	4,11	4,16	4,2	4,16	A-
131.	Kabupaten Cianjur	4,07	4,46	3,94	4,16	A-
132.	Kabupaten Gresik	4,03	4,30	4,14	4,16	A-